



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SESUAI *SARBANES-OXLEY ACT SECTION 404*:
STUDI KASUS PADA
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**LUKI PRASTYARIANTI
0806320036**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Luki Prastyarianti

NPM : 0806320036

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Luki Prastyarianti
NPM : 0806320036
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Evaluasi Pengendalian Internal sesuai *Sarbanes-Oxley Act Section 404*: Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Lindawati Gani

Penguji : Thomas H. Setjokusumo, SE, MBA, MSc.

Penguji : Dr. Gede Harja Wasistha

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam perjalanan panjang penulisan karya ilmiah ini penulis dibantu dalam berbagai bentuk, secara langsung dan tidak langsung, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis ingin sangat berterimakasih kepada:

1. Papa (Prasetio), Mama (Betty Roestanti), Mas Wawan (Hardianto Prastyawan), Mas Aji (Bramantio Prastyaji) dan Mas Tion (Bramantio Prastyono) yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, dan dukungannya baik material maupun immaterial serta melimpahkan banyak waktu untuk kemajuan pendidikan penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Lindawati Gani selaku dosen pembimbing, atas waktu, kesabaran, tenaga, pikiran, arahan, bimbingan, ide, dukungan moral, dan terutama semangat yang telah diberikan dari awal pencarian topik sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ramadi Ken Permana, *my very best friend*, yang begitu banyak mendukung penulis, memberi masukan-masukan, dan semangat setiap harinya.
4. Keluarga kedua penulis, Keluarga Praseno (Om Rudy, Tante Titiek, Mbak Via, Ken, Ega, Arya) dan Keluarga Hasan (Aba Hasan, Umi Nadjiba, Nabila, Kak Umar, Kak Latief, Kak Farhan) atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Narasumber dari pihak PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Bandung dan Jakarta, pemberi data skripsi ini yang telah dengan sabar menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan:
 - a. Direktorat *Compliance & Risk Management*: Bapak Prasetio, Bapak Djarot Widiatmoko, Mbak Mugi Rahayu, Bapak Muhartono, Bapak Agus, Bapak Jati, Bapak Wayan, Mbak Mala, dan nama-nama lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

- b. Direktorat Keuangan: Bapak Agus Suprayitno.
 - c. Internal Audit: Bapak Tjatur Purwadi dan Mbak Ijun.
 - d. Unit Hubungan Investor: Bapak Agus Murdiyatno.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dari awal perjalanan di FEUI sampai dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi tempat melepas penat dalam perkuliahan, permainan, dan dalam pengerjaan skripsi:
- a. Genggong, tempat untuk menjadi diri sendiri, bercerita, dan melupakan permasalahan sejenak. Rizki Adinda dan Riska Dewinta, teman penulis sejak awal menjalankan studi di FEUI. Lulu Meutia, Felisa Fildzah Ichwan, dan Nuramini Novina Dewi, teman seperjuangan dalam menjalankan studi di Jurusan Akuntansi, terima kasih untuk informasi-informasi *update*-nya. *Good luck*, kita! Semoga bisa selalu kumpul sampai nenek-nenek ☺
 - b. Sahabat-sahabat lain. Ratih Megaswari Miraza, teman penyemangat dan seperjuangan dalam menjalankan studi di FEUI, terutama dalam pembelajaran bersama mata kuliah Akuntansi, serta Sari Rosalina, atas bimbingan pengalamannya kepada Ratih dan penulis. Yusselyanti & Vidya Anggraini, atas semangat-semangatnya.
 - c. Keluarga Besar BSO Band FEUI, Keluarga Besar SPA-FEUI, dan Keluarga Besar Dies Natalis 60th FEUI, di mana penulis menghabiskan masa-masa berorganisasi di FEUI.
 - d. Teman-teman Akuntansi 2008, FEUI 2008 dan seluruh warga FEUI yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu .
8. Karyawan Departemen Akuntansi dan Biro Pendidikan, terutama Bapak Matsani dan Bapak Katno.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan ekonomi syariah secara khusus.

Depok, Januari 2012

Penulis
Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luki Prastyarianti
NPM : 0806320036
Program Studi : Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

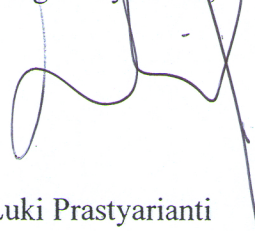
**EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SESUAI SARBANES-OXLEY ACT SECTION 404:
STUDI KASUS PADA
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, Jawa Barat
Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan,



Luki Prastyarianti

ABSTRAK

Nama : Luki Prastyarianti
Program Studi : Akuntansi
Judul : Evaluasi Pengendalian Internal sesuai *Sarbanes-Oxley Act Section 404*: Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Penelitian ini membahas penyebab terjadinya temuan eksternal auditor pada pengendalian atas pelaporan keuangan (ICOFR) TELKOM, terutama pada siklus pelaporan keuangan, yang menyimpulkan TELKOM mendapatkan hasil penilaian berupa *significant deficiency* pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Evaluasi ini didasarkan pada SOX 404, PCAOB *Auditing Standard No. 5*, dan COSO *Internal Control Framework* sebagai dasar-dasar dilakukannya pengendalian internal, khususnya ICOFR. Evaluasi dilakukan dengan mempergunakan *gap analysis* antara Bisnis Proses Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM dengan hasil temuan eksternal auditor dari Laporan *Management Assessment*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh *human error*, karena sebagian sistem yang masih manual dan sumber daya manusia yang masih kurang memadai sehingga pengendalian internal untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data dianggap masih belum efektif.

Kata kunci: ICOFR, SOX 404, pengendalian internal, COSO, defisiensi

ABSTRACT

Name : Luki Prastyarianti
Study Program : Accounting
Title : An Evaluation of Internal Control over Financial Reporting based on Sarbanes-Oxley Act Section 404: A Case Study of PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

This research is aimed to answer the question of why there is still auditor's findings in a well-designed internal control over TELKOM's financial reporting (ICOFR). It is focused on the Financial Reporting Cycle that proves a major static result of deficiency evaluation in 2008 until 2010. This evaluation is based on SOX Section 404, PCAOB Auditing Standard No. 5, and COSO Internal Control Framework as the basis of internal control best practice, for instance ICOFR. This research done by assigning gap analysis within Financial Reporting Cycle Business Process and the audit findings taken from Management Assessment Report. The evaluation shows that it is majorly caused by human error because of the semi-manual accounting system of financial reporting and the insufficient human resources skill as indicates that internal control ensuring accuracy and completeness is still going ineffective.

Key words: ICOFR, SOX 404, internal control, COSO, deficiency

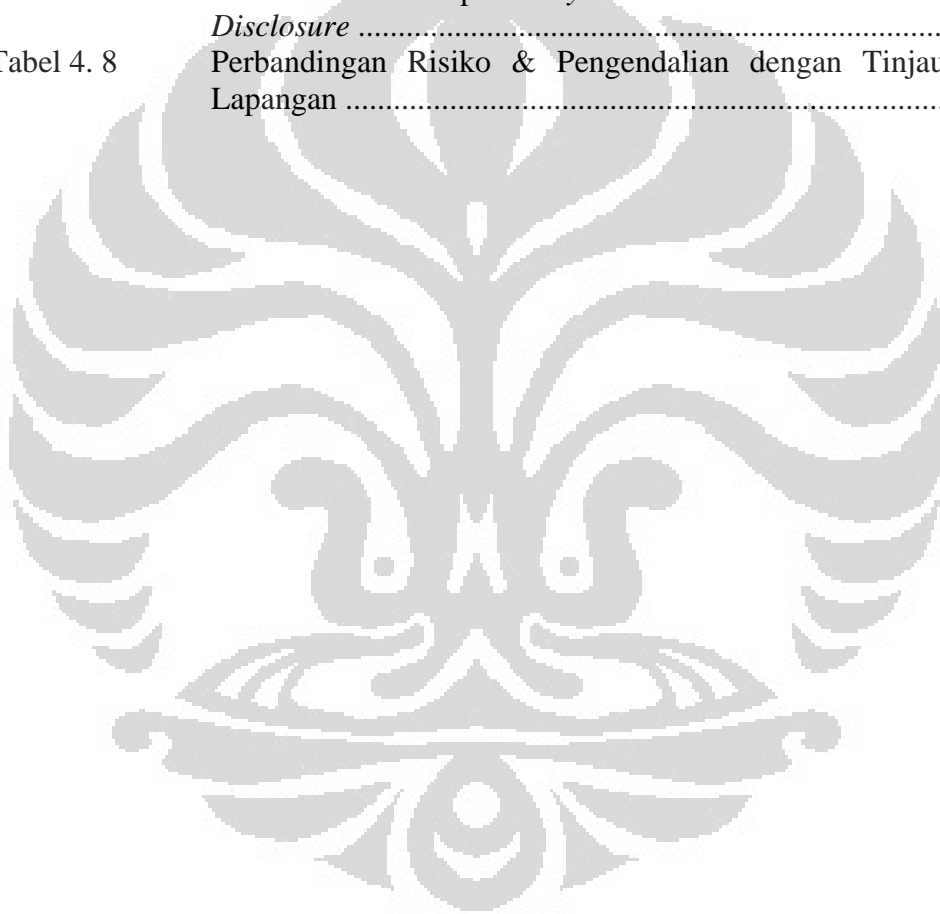
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengendalian Internal	11
2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal	11
2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal	13
2.1.3 Fungsi Pengendalian Internal	14
2.2 COSO <i>Internal Control Framework</i>	15
2.3 <i>Sarbanes-Oxley Act of 2002</i>	20
2.4 <i>SOX 404: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i>	22
2.5 Siklus Pelaporan Keuangan	23
2.6 Tujuan Audit dan Asersi Manajemen	24
2.7 Proses Audit	26
2.8 Defisiensi	28
3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	31
3.1 Latar Belakang Perusahaan	31
3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Inisiatif Strategi Perusahaan	32
3.3 Struktur Organisasi dan Kelompok Usaha Perusahaan	33
3.4 Produk dan Layanan Perusahaan	35
3.5 <i>Stakeholders</i> TELKOM	38
3.6 Struktur <i>Governance</i>	39
3.7 <i>Financial Reporting Governance</i>	42
3.8 Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (<i>Internal Control over Financial Reporting-ICOFR</i>)	44

3. 9	Ruang Lingkup ICOFR TELKOM	46
3. 10	<i>Top-Down Approach</i>	49
3. 11	<i>Integrated Audit</i>	52
3. 12	Audit ICOFR	54
3. 13	Evaluasi ICOFR dan Materialitas	56
3. 14	Bisnis Proses SOX	58
4.	PEMBAHASAN	61
4. 1	Siklus Pelaporan Keuangan	62
4. 1. 1	Proses H.01.01: Kebijakan dan Pedoman Akuntansi ..	63
4. 1. 2	Proses H.01.02: Pemeliharaan <i>General Ledger</i>	64
4. 1. 3	Proses H.01.03: <i>Pra-Closing</i>	64
4. 1. 4	Proses H.01.04: <i>Closing</i>	65
4. 1. 5	Proses H.01.05: Konsolidasi	65
4. 1. 6	Proses H.01.06: Penyesuaian	66
4. 1. 7	Proses H.01.07: Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (<i>Basic Financial Statement</i>)	66
4. 1. 8	Proses H.01.08: Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (<i>Disclosure</i>)	66
4. 1. 9	Proses H.01.09: Penyusunan Laporan Keuangan TELKOM ke Bapepam-LK	67
4. 1. 10	Proses H.01.10: Laporan SEC	67
4. 2	Laporan Manajemen	68
4. 2. 1	Defisiensi secara Agregat	69
4. 2. 2	Defisiensi berdasarkan Kerangka COSO	74
4. 3	<i>Area Presentation & Disclosure</i>	83
4. 3. 1	Proses H.01.07: Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (<i>Basic Financial Statement</i>)	84
4. 3. 2	Proses H.01.08: Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (<i>Disclosure</i>)	85
4. 3. 3	Proses H.01.09: Penyusunan Laporan Keuangan TELKOM ke Bapepam-LK	86
4. 4	Analisis	86
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	99
5. 1	Kesimpulan	99
5. 2	Saran	101
	DAFTAR REFERENSI	102
	LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Asersi Manajemen	25
Tabel 3. 1	Perbedaan <i>Traditional Audit & Integrated Audit</i>	54
Tabel 3. 2	Kriteria Kualitatif Evaluasi ICOFR TELKOM	58
Tabel 4. 1	Defisiensi Agregat	69
Tabel 4. 2	Defisiensi COSO	75
Tabel 4. 3	Matriks <i>Key Control</i> – COSO Tahun 2008	81
Tabel 4. 4	Matriks <i>Key Control</i> – COSO Tahun 2009	81
Tabel 4. 5	Matriks <i>Key Control</i> – COSO Tahun 2010	82
Tabel 4. 6	<i>Key Control Area Presentation & Disclosure</i>	83
Tabel 4. 7	Intensitas Temuan pada <i>Key Control</i> di Area <i>Presentation Disclosure</i>	87
Tabel 4. 8	Perbandingan Risiko & Pengendalian dengan Tinjauan Lapangan	90



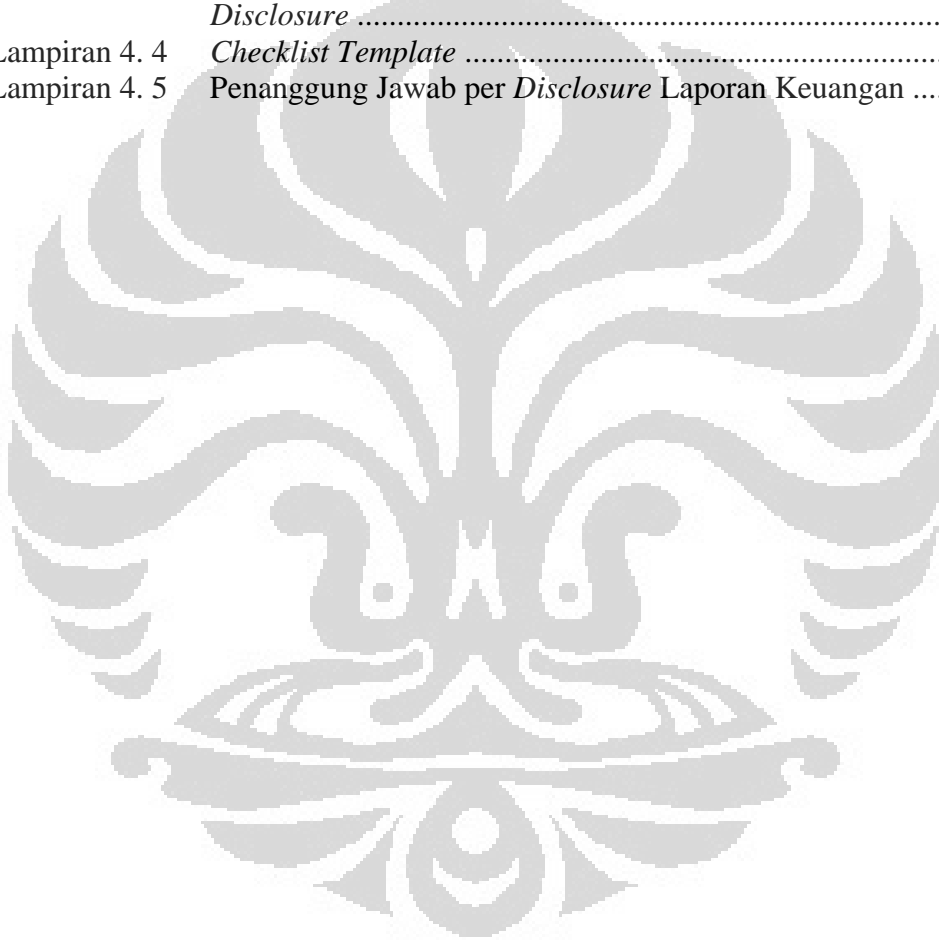
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	<i>COSO Internal Control Framework</i>	16
Gambar 2. 2	<i>Mapping</i> Penentuan Defisiensi	30
Gambar 3. 1	Struktur Organisasi TELKOM	34
Gambar 3. 2	Struktur Anak Perusahaan TELKOM	35
Gambar 3. 3	Bagan Kerangka Kerja GCG TELKOM	40
Gambar 3. 4	Kriteria Kuantitatif Evaluasi ICOFR TELKOM	57
Gambar 4. 1	Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM	63
Gambar 4. 2	Rekapitulasi <i>Consolidated Trial Balance</i> (Microsoft Excel) menjadi Catatan atas Laporan Keuangan pada Akun “Kas dan Setara Kas”	94
Gambar 4. 3	<i>Reciprocal Account</i>	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. 1	Sarbanes-Oxley Act of 2002	106
Lampiran 3. 1	Bisnis Proses SOX PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	111
Lampiran 4. 1	Hasil Temuan <i>Integrated Audit</i> Tahun 2008, 2009, dan 2010	114
Lampiran 4. 2	Bisnis Proses Area <i>Presentation & Disclosure</i>	126
Lampiran 4. 3	Rincian Subproses dan <i>Key Control Area Presentation & Disclosure</i>	140
Lampiran 4. 4	<i>Checklist Template</i>	143
Lampiran 4. 5	Penanggung Jawab per <i>Disclosure</i> Laporan Keuangan	145



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2001 lalu, dunia akuntansi dan audit dikejutkan oleh suatu kejadian yang berpengaruh secara signifikan dalam pelaporan keuangan. Kejadian tersebut berkaitan dengan pelaporan kebangkrutan dari ENRON, suatu perusahaan Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas (Bratton, 2002). Secara singkat, di balik kebangkrutan perusahaan terbesar ketujuh di AS pada masanya dengan penghasilan sebesar USD101 miliar pada tahun 2000 itu, terdapat suatu tindak kecurangan akuntansi yang terstruktur dan pada akhirnya terungkap melalui seorang *whistleblower* dari pihak manajemen. Kecurangan tersebut bukan hanya berasal dari internal manajemen tapi juga adanya keterlibatan Kantor Akuntan Arthur Andersen di dalamnya. Sebelumnya Arthur Andersen masuk jajaran “*Big Five*” *accounting firm* (termasuk di dalamnya PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG, yang sekarang dikenal dengan “*Big Four*”) tetapi harus dihentikan operasinya karena ketidakpercayaan publik akibat kasus ENRON. Selain ENRON, hal serupa juga terjadi pada perusahaan lain, yaitu WorldCom (Benston, 2003).

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki andil paling besar atas terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Karena manajemen adalah pihak yang menjalankan operasi perusahaan sehingga manajemen tahu persis di mana titik-titik kesempatan yang dapat diambil untuk melakukan kecurangan. Manajemen juga merupakan pihak yang seharusnya dapat mempertanggungjawabkan kewajaran pelaporan keuangannya, akan tetapi pada kasus ini juga melakukan kolusi dengan pihak ketiga yaitu auditor eksternal. Kejadian ini sangat ironis karena auditor eksternal seharusnya merupakan institusi yang wajib menjaga independensi dan akuntabilitas, tapi justru menjadi pemeran pendukung kecurangan internal perusahaan. Kejadian ini membuat sistem pengendalian internal suatu perusahaan menjadi penting dan sangat diharapkan dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham.

Manajemen harus berperan aktif dalam menjalankan pengendalian internal dalam meminimalisir potensi terjadinya *error* dan *fraud* secara internal terutama untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Oleh karena itu, atas dasar tujuan tersebut, regulator pasar modal Amerika Serikat, atau yang biasa dikenal dengan US SEC (*United States Securities and Exchange Commission*) menetapkan bahwa semua perusahaan publik yang *listing* di *New York Stock Exchange* (NYSE) diminta untuk memiliki suatu sistem/prosedur untuk bagaimana memastikan laporan keuangan tiap perusahaan tersebut dapat diuji keandalannya. NYSE berasumsi mengandalkan auditor dan standar-standar audit yang ada tidaklah cukup untuk menjamin sebuah laporan keuangan terbebas dari salah saji yang material. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi pemicu dipublikasikannya suatu peraturan yang disebut dengan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX).

SOX mewajibkan perusahaan yang *listing* di NYSE untuk merancang dan memiliki pengendalian untuk menjamin laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan sejak tahun 2002. Bukan hanya laporan keuangan perusahaan, laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan juga wajib diasersi dan diungkapkan oleh pihak manajemen yaitu oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan.

Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang dirancang dalam rangka menjamin keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan kepada Undang-undang yang berlaku. Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menata perusahaan agar tetap pada jalurnya yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan melalui keseluruhan kegiatannya seefektif dan seefisien mungkin. Pengendalian internal diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi yang akan menghambat kerja operasional perusahaan. SOX yang dikeluarkan oleh SEC berisi sejumlah prosedur beserta sanksi-sanksi atas kewajiban diterapkannya pengendalian internal di dalam perusahaan yang *listing* di NYSE. Prosedur berikut sanksi yang dipaparkan akan memicu perusahaan untuk menjaga lingkungan bisnis dan kinerja operasional tetap terkendali dengan pengendalian

internal yang sudah diberlakukan. Hal ini menyebabkan pentingnya diberlakukan pengendalian internal atas laporan keuangan atau *internal control over financial reporting* (ICOFR). ICOFR dapat dinilai efektivitasnya dengan menggunakan indikator-indikator yang secara umum terdapat di dalam *COSO framework*.

Akuntabilitas yang tidak beraturan merupakan sasaran utama SOX (Kieso, *et al.*, 2011). Akuntabilitas yang baik dapat dilihat salah satunya dari integritas laporan keuangannya. Sesuai dengan kerangka konseptual yang disusun oleh IASBI, laporan keuangan yang berintegritas berarti mencakup dua karakteristik kualitatifnya, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*). Laporan keuangan yang relevan berarti informasi yang terkandung di dalamnya mampu mempengaruhi keputusan ekonomi entitas. Sedangkan laporan keuangan yang andal berarti bebas dari salah saji material dan disajikan dengan sebenarnya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat memberikan gambaran seutuhnya bagi kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Sebuah perusahaan pasti memiliki bentuk usahanya masing-masing. Semakin rumit struktur kepemilikan modal suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan perusahaan tersebut akan tata kelola yang baik. Pada suatu perusahaan perseorangan, pemilik modal akan sekaligus merangkap sebagai pengelola sehingga akan lebih mudah untuk mengelolanya. Namun suatu perusahaan dengan skala yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak modal sehingga jumlah penanam modal atau pemegang sahamnya pun akan lebih dari satu. Dibutuhkan beberapa pemegang saham yang di antaranya memiliki persentasi kepemilikan yang berbeda-beda, baik mayoritas maupun minoritas. Pemegang saham juga sudah mulai tidak terlibat dalam perusahaan; yang biasanya pengelolaan diserahkan kepada manajemen profesional. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menjadi lebih besar lagi dan menuntut ekspansi, perusahaan akan memutuskan untuk *go public*. Hal tersebut berarti akan lebih sulit untuk mengidentifikasi siapa pemilik perusahaan sebenarnya, hanya porsi-porsi modal lah yang terlihat.

Pada perusahaan dengan kompleksitas yang semakin tinggi, pemilik modal dan pihak manajemen akan pula berpotensi mengalami konflik kepentingan

karena di satu sisi perusahaan tidak bisa berjalan pada awalnya tanpa setoran modal dari pemegang saham, namun di sisi lain manajemen sangat berperan dalam membuat perusahaan tetap dapat berjalan sesuai rencana dan memiliki kinerja yang baik. Untuk itu diharapkan pemilik dan manajemen memiliki visi dan misi yang sama sehingga diharapkan tidak terjadi kecurangan. Masalah lain juga terjadi ketika pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan RUPS dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu memperjuangkan hak-hak dari pemegang saham minoritas tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik sering pula dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Pasal 66, perusahaan persero diwajibkan untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan berupa Laporan Tahunan yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan di dalamnya. Tidak seperti perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem *One-Tier Board*, sebagian besar negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis, Slovenia, dan Austria, begitu pula dengan Indonesia menganut suatu sistem organisasi yang disebut dengan *Two-Tier Board* yang berarti dalam menjalankan perusahaan terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan di bawah RUPS, yaitu *Board of Director (BOD/Dewan Direksi)* dan *Board of Commissioner (BOC/Dewan Komisaris)*. BOC akan mengawasi kinerja BOD sekaligus menjadi jalur komunikasi langsung manajemen dengan pemegang saham dalam RUPS.

Bermula dari US SEC menerbitkan SOX, secara otomatis pernyataan-pernyataan yang ada di dalam SOX wajib dipatuhi oleh perusahaan yang *listing* di NYSE. Indonesia memiliki BUMN yang namanya tercatat di bursa efek New York tersebut, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM). Sehingga selain terhadap Bapepam-LK, TELKOM juga wajib tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh US SEC, salah satunya SOX yang telah diterbitkan. Perusahaan yang boleh *listing* secara resmi bukan hanya perusahaan lokal Amerika Serikat, tapi ada pula perusahaan yang berasal dari luar Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *Foreign Private Issuers (FPI)*, salah satunya adalah

TELKOM. Pada saat itu FPI belum diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangannya yang *comply* terhadap SOX hingga tahun 2006. Sehingga pada waktu SOX diterbitkan, yaitu tahun 2002, TELKOM belum wajib menerapkan SOX. Waktu ini diberikan sebagai masa transisi untuk merancang pengendalian internal perusahaan. Sedangkan perusahaan lokal Amerika Serikat tetap diwajibkan sejak tahun 2002.

TELKOM merupakan salah satu perusahaan persero milik pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi. TELKOM telah menjadi perusahaan yang *go public* sejak tahun 1995. Sejak saat itu saham TELKOM diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dan wajib tunduk pada Undang-undang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dari BAPEPAM-LK. TELKOM juga *listing* di pasar modal negara lain, seperti NYSE dan *London Stock Exchange* (LSE). TELKOM merupakan satu-satunya BUMN di Indonesia yang *listing* di NYSE dan telah menerapkan ICOFR. Beberapa perusahaan dan institusi dalam negeri telah melakukan *benchmark* ICOFR TELKOM, seperti Semen Gresik dan Bank Indonesia. TELKOM sebagai satu-satunya perusahaan dalam negeri, yang secara resmi harus menerapkan prinsip-prinsip SOX, diharapkan mampu menjadi panutan bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang telah diatur di dalam SOX, yang memang secara ideal menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dikelola.

Dari waktu ke waktu TELKOM berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dibuat dengan memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan dengan menerapkan *integrated audit*. *Integrated audit* memiliki indikator berupa 3 (tiga) hasil evaluasi, berupa *control deficiency* (rancangan atau pelaksanaan pengendalian mengakibatkan manajemen tidak dapat melakukan tindakan preventif atau detektif atas terjadinya salah saji secara tepat waktu), *significant deficiency* (kombinasi dari *control deficiency*), dan *material weakness* (kombinasi dari *significant deficiency*). Apabila tidak ada temuan apapun pada saat proses audit hasil penilaiannya *clean*.

Walaupun SOX telah diterbitkan mulai tahun 2002, perusahaan yang berstatus FPI, seperti yang telah disebutkan di atas dan salah satunya adalah TELKOM, boleh menyerahkan laporan hasil ICOFR mulai tahun 2006. Mulai

tahun pertama TELKOM melakukan audit atas ICOFR, hasil pemeriksaan auditor eksternal sudah menunjukkan adanya *material weakness* dalam sistem pengendalian internalnya hingga tahun 2007. Hasil penilaian tersebut mengalami penurunan defisiensi menjadi *significant deficiency* pada tahun 2008 ditandai dengan berkurangnya jumlah pengendalian yang ditetapkan. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak berubahnya penilaian tersebut di level *significant deficiency* hingga tahun 2010. Hasil yang tidak berubah diperkirakan disebabkan oleh adanya pengendalian yang kurang efektif pada operasional. Untuk itu agar memperoleh gambaran yang lebih luas akan dampak ketidakefektifan pengendalian, analisis akan dilakukan pada siklus pelaporan keuangan dikarenakan saldo salah saji yang paling signifikan dibanding siklus yang lain. Analisis dilakukan dengan melihat perbedaan antara prosedur bisnis proses yang ada dengan implementasi di lapangan yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi untuk meningkatkan hasil penilaian atas pengendalian internal perusahaan ke tingkat yang lebih baik, dalam rangka menyelaraskan dengan target perusahaan meraih “Zero-SD” yang seharusnya dicapai pada tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Status TELKOM yang *listed* di NYSE membuatnya wajib mematuhi peraturan US SEC sebagai pihak regulator pasar modal Amerika Serikat. Pengendalian yang lebih baik lagi dengan ICOFR sangat dibutuhkan mengingat hasil penilaian yang diperoleh masih menunjukkan *significant deficiency*, yang berarti masih banyak kekurangan dalam sistem pengendaliannya. Oleh karena itu studi yang dilakukan di dalam penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana perwujudan masing-masing elemen COSO pada Siklus Pelaporan Keuangan di TELKOM berdasarkan hasil defisiensi COSO?
2. Apa penyebab defisiensi yang masih selalu terjadi pada *monitoring area presentation & disclosure* Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM tahun 2008 hingga 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Menjelaskan perwujudan masing-masing elemen COSO pada Siklus Pelaporan Keuangan di TELKOM berdasarkan hasil defisiensi COSO.
2. Mengetahui penyebab defisiensi yang masih selalu terjadi pada *monitoring area presentation & disclosure* Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM tahun 2008 hingga 2010.

Defisiensi-defisiensi di atas dapat menandakan pengendalian yang awalnya telah ditentukan di bisnis proses tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan atau implementasinya yang belum berjalan efektif. Dengan begitu akan muncul suatu rekomendasi pada akhir penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, berupa:

1. Perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis permasalahan dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Akademisi, penelitian ini dapat memberikan keluasan wawasan serta referensi bagi penelitian selanjutnya karena penelitian dilangsungkan bukan hanya sesuai teori yang berlaku, tetapi juga ditinjau langsung secara praktis ke perusahaan yang telah berkecimpung cukup lama di bidangnya

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *gap analysis* antara hasil penilaian defisiensi temuan *integrated audit* dengan rancangan pengendalian yang kemudian pelaksanaannya dilihat langsung ke lapangan. Metode pengumpulan informasi-informasi seputar teori-teori relevan dan data-data penelitian diperoleh dengan cara:

1. Pengumpulan Data secara Primer
Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam terhadap narasumber langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan dan

dokumen-dokumen terkait juga bersumber langsung dari perusahaan. Wawancara yang sebelumnya telah dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dalam rangka melihat permasalahan secara luas, yang selanjutnya akan dilakukan wawancara terstruktur untuk mengidentifikasi masalah secara lebih kritis (Sekaran, 2003). Data-data tersebut didapat dari observasi dan wawancara tatap muka serta *focus group discussion* yang dilakukan oleh peneliti di PT TELKOM, Bandung dan Jakarta, domisili kantor pusat, ke Direktorat *Compliance and Risk Management* (CRM), unit *Risk Management, Legal & Compliance*, dan *Business Effectiveness*, serta Direktorat Keuangan pada unit *Financial Accounting*.

2. Pengumpulan Data secara Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain yang melakukan studi mutakhir, berupa buku, publikasi pemerintah, data-data statistik, media, laporan tahunan perusahaan, dan lain-lain (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan berupa penelitian sebelumnya, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama tinjauan ke *framework* COSO, media cetak, dan Laporan Tahunan PT TELKOM.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis perbandingan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu periode tahun buku 2008-2010. Ruang lingkup studi ini mencakup pengkajian teoretis terhadap aspek-aspek pengendalian internal dan *gap analysis* antara bisnis proses pada siklus pelaporan keuangan yang ada dengan temuan-temuan di lapangan seputar pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Pemilihan ditujukan pada siklus pelaporan keuangan didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus pelaporan keuangan memberikan gambaran secara luas atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Selain itu masih banyak proses-proses bisnis signifikan yang tidak mengalami peningkatan penilaian dari *significant deficiency* dari tahun 2008-2010 terutama yang teridentifikasi pada proses bisnis H.01.07 (penyusunan laporan pokok), H.01.08

(penyusunan *disclosure*), dan H.01.09 (laporan Bapepam). Siklus pelaporan keuangan berkaitan erat dengan *Section 404* dalam SOX mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau ICOfR dan prosedurnya diatur di dalam PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) *Auditing Standard No. 5*.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan akan dibagi ke dalam beberapa bagian guna mempermudah pemahaman pembaca. Sistematika pembagian penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini secara keseluruhan menjelaskan alasan dipilihnya topik penelitian dan gambaran umum dari keseluruhan makalah.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini mengulas mengenai teori-teori yang dianggap relevan dan penting untuk mendukung atau mempertimbangkan kembali temuan-temuan dalam penelitian. Isi dari bagian ini di dapat dari buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, artikel internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bagian ini mengandung informasi-informasi yang berkaitan seputar perusahaan yang diangkat dalam studi kasus, dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM). Di bagian ini juga akan dijelaskan secara umum bagaimana mekanisme sistem pengendalian internal TELKOM secara komprehensif.

Bab IV Pembahasan

Bagian ini berisi analisis yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bagian yang merupakan penutup ini berisi tentang keseluruhan atau kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi kepada perusahaan yang dijadikan sebagai objek studi kasus untuk pengembangan di masa yang akan datang.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal, atau yang biasa disebut juga dengan *internal control*, memiliki arti yang luas. Bukan hanya terbatas pada teori yang ada, tetapi juga penerapannya secara teknis, bagaimana seharusnya pengendalian internal yang baik. Moeller pada tahun 2005 dalam bukunya *Brink's Modern Internal Auditing*, menyebutkan secara umum definisi dari pengendalian internal.

“Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinate methods adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies. This definition recognized that a system of internal control extends beyond those matters which relate directly to the functions of the accounting and financial departments.”

Pengelolaan usaha yang baik tidak terlepas dari sistem pengendalian internal yang dimiliki suatu entitas bisnis. Pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang sama tentang pengendalian internal yang efektif merupakan suatu hal yang sangat penting. Terlebih dalam era persaingan global dengan perkembangan sistem operasi dan persaingan bisnis yang begitu kompleks.

Sebuah langkah penting telah dilakukan oleh COSO, atau *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission*, pada tahun 1992 yaitu berhasil membuat *Control Integrated Framework* yang isinya antara lain rumusan pengertian pengendalian internal, yang kemudian diterima secara luas di dunia. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai *“.....a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- *Effectiveness and efficiency of operations*

- *Reliability of financial reporting*
- *Compliance with applicable laws and regulations*

Kemudian pada tahun 2004, COSO mengembangkan *Internal Control Framework* yang telah ada dengan memasukkan cakupan tentang manajemen dan strategi risiko dan selanjutnya hal tersebut dikenal dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). Sesuai dengan kerangka pengendalian internal yang baru tersebut, pengendalian internal merupakan bagian integral dari manajemen risiko.

Indonesia juga mendukung Kerangka COSO mengenai pengendalian internal dengan Standar Auditnya (SPAP) yang dikeluarkan IAI dalam SPAP SA Seksi 319. Di dalamnya disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai akan adanya efektivitas dan efisiensi usaha, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan akan peraturan yang berlaku.

Menurut Romney dan Steinbart (2006), pengendalian internal adalah "rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan."

Dari beberapa pengertian di atas terdapat tiga kategori yang menjadi inti pengendalian internal yaitu:

1. Kategori pertama meliputi kinerja perusahaan dan tingkat keuntungan serta pengamanan sumber-sumber daya.
2. Kategori kedua berhubungan dengan persiapan penerbitan laporan keuangan termasuk laporan keuangan interim dan laporan keuangan ringkas serta data keuangan terseleksi.
3. Kategori ketiga berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dimana perusahaan menjadi subyek.

Studi Universitas-universitas di Amerika dalam *Reference Guide for Managing University Best Practice* (University of California) menyatakan bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, poin yang dapat diambil terkait pengendalian internal adalah:

- Seluruh pihak yang ada di dalam suatu entitas, terlibat dalam proses pengendalian internal
- Efektivitas pengendalian internal akan membantu suatu entitas untuk mencapai tujuan operasinya, pelaporan keuangan, dan kepatuhan akan peraturan yang berlaku
- Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bagi tujuan perusahaan, bukan semata-mata pengendalian internal yang sempurna dan tidak ada kesalahan sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengendalian internal merupakan proses karena meliputi kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen. Dalam hal ini berarti pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan yang absolut, karena kemungkinan adanya kesalahan manusia, kolusi dan penolakan manajemen atas pengendalian akan membuat proses tersebut menjadi tidak sempurna.

2. 1. 2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut *Standards of the Professional Practice of Internal Auditing (Standard 300)* yang tercakup dalam COSO adalah sebagai berikut:

1. Keandalan dan integritas informasi
COSO memiliki komponen yaitu *information and communication* yang memberikan penekanan terhadap informasi yang andal dan terintegrasi antara elemen satu dengan elemen lainnya terkait seluruh informasi yang ada dalam organisasi.
2. Ketaatan pada kebijakan, perencanaan, dan prosedur organisasi
Ketaatan pada Kebijakan, Perencanaan, dan Prosedur Organisasi *Control Activities* yang merupakan salah satu elemen COSO *Internal Control Framework* memberikan suatu perangkat dalam mengendalikan operasional

organisasi sesuai dengan perencanaan yang diatur dalam berbagai kebijakan dan prosedur dalam organisasi.

3. Pengamanan harta, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ekonomis, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Organisasi menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Organisasi kemudian akan memanfaatkan semua sumber daya dan harta yang dimiliki secara efisien untuk tujuan ekonomis sehingga tujuan dapat tercapai. Hal ini dilakukan dengan pengendalian internal.

2.1.3 Fungsi Pengendalian Internal

Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting (Wilkinson, et al. 2000). Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut saling mendukung agar sistem yang ada memperoleh hasil yang maksimal bagi perusahaan.

Adapun fungsi pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. ***Preventive Control*** (Pencegahan)

Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

2. ***Detective Control*** (Pemeriksaan)

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari *detective control* adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3. ***Corrective Control*** (Korektif/pembetulan)

Berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam *preventive* dan *detective control*. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari *corrective*

control adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut.

2.2 COSO *Internal Control Framework*

Hampir di semua organisasi atau perusahaan, pada setiap level manajemennya memiliki kebutuhan akan perspektif pengendalian yang berbeda antara level yang satu dengan level yang lain. Dalam rangka mewujudkan pengendalian internal yang efektif, suatu perusahaan harus memiliki suatu landasan yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, bahkan pada tiap level organisasi. Landasan itupun sebaiknya berupa suatu pedoman yang telah diakui secara umum sebagai *best practice* yang akan menjamin efektivitas pengendalian internal.

Pada September 1992, *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission* mengeluarkan suatu kerangka dasar pengendalian internal yang bernama *COSO framework* (Moeller, 2005). Kerangka ini merupakan bentukan dasar dari pendefinisian pengendalian internal secara umum, yang kemudian dapat disesuaikan dengan masing-masing industri di mana suatu perusahaan dijalankan. Penggunaan COSO sebagai pedoman kerangka dasar pengendalian internal perusahaan direkomendasikan oleh US SEC. COSO bertujuan untuk memandu para manajemen atau pengelola perusahaan dalam mengelola organisasinya untuk mencapai pengendalian internal yang efektif dan peka terhadap risiko-risiko yang potensial pada organisasi.

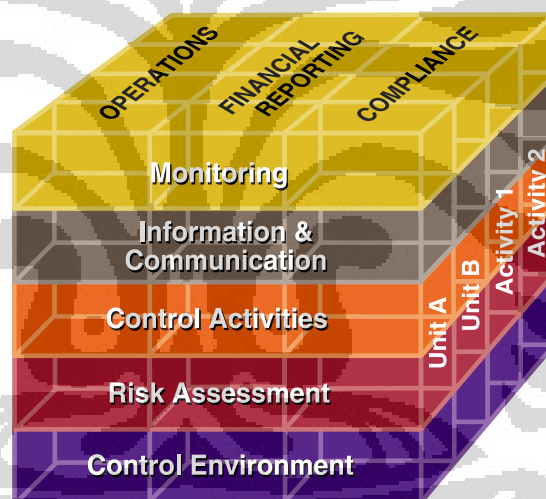
Disebutkan oleh Moeller (2005), COSO mendeskripsikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control is a process, affected by an entry’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Reliability of financial reporting*
- *Compliance with applicable laws and regulations”*

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan bagian lain dari suatu perusahaan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan akan peraturan yang berlaku. Terdapat suatu istilah menarik, yaitu “keyakinan yang memadai.” Yang dimaksud dengan keyakinan yang memadai adalah keterbatasan pengendalian internal akan dalam pelaksanaannya karena pengendalian internal merupakan suatu proses yang sangat melibatkan campur tangan manusia yang rentan terhadap kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (*human error*). Pengendalian internal hanya berfungsi meminimalkan itu semua.

Atas pandangan COSO terhadap pengendalian internal, maka dibentuklah kerangka COSO sebagai berikut.



Gambar 1.1 COSO Internal Control Framework

Sumber: www.coso.org

Tampilan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengendalian internal COSO memiliki 5 elemen, yaitu *Control Environment*, *Risk Assessment*, *Control Activities*, *Information & Communication*, serta *Monitoring* yang di terapkan pada tiap level di suatu organisasi untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengendalian Internal menurut COSO *Internal Control Framework* terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. ***Control Environment***

Control environment atau lingkungan pengendalian merupakan elemen yang menjadi payung bagi elemen-elemen lainnya dalam hal ini menjadi pedoman/dasar bagi dijalankannya elemen-elemen selanjutnya. Lingkungan pengendalian menetapkan keadaan lingkungan di suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pihak-pihak manajemen perusahaan akan pentingnya pengendalian internal. Elemen ini menciptakan kondisi yang mampu mempengaruhi kepedulian atas pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, serta perhatian dan arahan yang dilakukan direksi.

2. ***Risk Assessment***

Risk assessment atau penilaian risiko merupakan elemen yang menjelaskan bagaimana cara perusahaan menyikapi risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Penilaian risiko ini harus relevan dan menunjukkan hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan terutama yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3. ***Control Activities***

Control activities atau aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap level organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Akan ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan, baik manual maupun melalui aplikasi otomatis dalam rangka memisahkan kewenangan (*approval*), otorisasi (*authorization*), verifikasi, rekonsiliasi,

penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas (*segregation of duties*), serta keamanan atas aset perusahaan. Secara umum, Elder, *et al.* membagi aktivitas pengendalian menjadi 5 macam, yaitu:

a. *Adequate Separation of Duties* (Pemisahan Tugas yang memadai)

Terdapat 4 pembagian di dalam aktivitas pengendalian ini, yaitu:

- *Separation of Custody of Asset from Accounting*
Dalam rangka mencegah terjadinya penggelapan aset perusahaan, orang yang menyimpan aset tidak boleh bertanggung jawab terhadap pencatatan aset tersebut. Apabila dilakukan oleh orang yang sama, kedua fungsi tersebut akan berisiko besar mengalami kecurangan (contoh: seorang kasir bertugas menerima kas sekaligus mencatat kas dan penjualan, kasir dapat saja tidak mencatat adanya penjualan dan melakukan pengkreditan fiktif pada akun piutang pelanggan tersebut).
- *Separation of the Authorization of Transaction from the Custody of Related Asset*
Mencegah orang yang melakukan otorisasi transaksi untuk memiliki kendali terhadap aset terkait untuk mengurangi kemungkinan penggelapan aset (contoh: orang yang mengesahkan suatu faktur pembayaran dengan yang menandatangani cek pembayaran tagihan tersebut tidak boleh sama)
- *Separation of Operational Responsibility from Record-Keeping Responsibility*
Pengawasan pencatatan sebaiknya dilakukan oleh departemen atau divisi yang berbeda (contoh: departemen atau divisi yang menyiapkan pencatatannya sendiri dapat saja melakukan perubahan untuk seolah-olah meningkatkan hasil kinerjanya).
- *Separation of IT Duties from User Departments*
Walaupun tingkat kompleksitas sistem teknologi informasi meningkat, pemisahan otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan harus tetap jelas pada tiap departemennya (contoh: ada pengendalian otorisasi aplikasi).

b. *Proper Authorization of Transactions and Activities* (Otorisasi yang Tepat terhadap Transaksi dan Aktivitas)

Otorisasi harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi pemanfaatan aset perusahaan sesuka hati pihak-pihak tertentu. Otorisasi dapat berupa **otorisasi umum** (manajemen membuat kebijakan kepada bawahan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang telah ditetapkan dalam kebijakan perusahaan, contoh: penerbitan daftar harga tetap) atau **otorisasi khusus** (diterapkan pada transaksi khusus, contoh: otorisasi atas sebuah transaksi penjualan oleh manajer penjualan untuk sebuah perusahaan mobil bekas).

c. *Adequate Documents and Records* (Dokumen dan Catatan yang Memadai)

Dokumen dan catatan (*sales invoice, purchase order*, catatan tambahan, jurnal penjualan, dan kartu kehadiran karyawan) merupakan objek fisik utama di mana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan. Banyak di antara dokumen tersebut yang disimpan dalam arsip komputer hingga dokumen dicetak (contoh: jika departemen penerima mengisi laporan penerimaan ketika bahan baki diterima, departemen utang dagang dapat melakukan verifikasi dalam atas kuantitas dan deskripsi barang pada faktur pemasok dengan membandingkannya dengan informasi yang ada pelaporan penerimaan).

d. *Physical Control over Assets and Records*

Aset perusahaan harus dilindungi. Apabila aset tidak dilindungi, dapat terjadi pencurian. Apabila catatan tidak dilindungi, dapat terjadi kerusakan, kehilangan, yang pencurian yang akan menyulit pencatatan keseluruhan operasi. Apabila aplikasi yang terkomputerisasi tidak dilindungi, dapat terjadi kerusakan dan kehilangan data.

e. *Independent Checks on Performance*

Komponen-komponen di atas harus dicek secara terus-menerus dan seksama karena pengendalian akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan waktu. Manajemen harus peka dan langsung

mengambil suatu tindakan apabila harus ada perubahan pengendalian internal.

4. *Information & Communication*

Information & communication atau informasi & komunikasi berupa elemen yang berfungsi dalam pemberian informasi yang diperlukan untuk *stakeholders* dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian operasi perusahaan. Informasi yang relevan harus disampaikan secara benar agar masing-masing pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya berkenaan dengan *timeline* yang telah disepakati sejak awal. Komunikasi yang efektif tersedia pada keseluruhan level organisasi.

5. *Monitoring*

Monitoring atau pemantauan merupakan proses penilaian dan pemantauan terhadap seluruh fungsi dan pelaksanaan pengendalian internal pada setiap level organisasi termasuk di dalamnya fungsi audit internal untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal dilaksanakan secara optimal. Proses ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pelaku (auditor internal) yang independen agar yang telah tertata sesuai dengan yang seharusnya tidak kembali melenceng, karena pengendalian internal akan terus berubah seiring dengan perubahan kondisi. Hasil-hasil temuan dari proses evaluasi harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti. Pengawasan yang intensif dari auditor internal ini juga berfungsi mengurangi biaya audit terhadap auditor eksternal karena auditor internal akan memberikan bantuan langsung terhadap tugas auditor eksternal seperti yang tercantum pada PSA 33 (SA 322).

2.3 *Sarbanes-Oxley Act of 2002*

Sarbanes-Oxley Act yang biasa disebut dengan SOX merupakan sebuah peraturan yang ditandatangani oleh Presiden George W. Bush dan diberlakukan oleh *United States Federal Law* pada tahun 2002 untuk perusahaan publik dan kantor akuntan publik di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya perusahaan-

perusahaan asing yang sahamnya diperdagangkan di NYSE (Arryman, 2010). Nama SOX berasal dari nama anggota legislator yang mensponsorinya, yaitu US *Senator* Paul Sarbanes dari Maryland dan US *Representative* Michael G. Oxley dari Ohio. Secara umum SOX berisi peraturan mengenai profesi akuntan dan pelaku institusi keuangan serta pengendalian di dalam perusahaan. Seperti yang tercantum di muka peraturan ini tujuan diberlakukannya adalah, “*to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosure made pursuant to the securities laws, and for other purposes,*” yang berarti secara umum peraturan ini ditujukan untuk melindungi hak-hak pemegang saham dengan menjaga kualitas pengendalian internal terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi tata kelola korporasi dalam penyusunan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, SOX juga dikenal dengan nama lain, yaitu *Public Accounting Reform and Investor Protection Act* dan *Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act*.

Selain itu, SOX juga dibuat untuk merestorasi kepercayaan investor yang sebelumnya sempat meredup karena kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kantor akuntan publiknya. Hal ini sekaligus menjelaskan latar belakang dibuatnya SOX yang bermula dari terkuaknya skandal ENRON, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis energi. Sebelumnya ENRON selalu menyatakan diri meraih keuntungan selama 4 tahun terakhir. Sebelum kebangkrutannya, akhirnya ENRON mengakui bahwa keuntungan tersebut hanya fiktif. Rekayasa akuntansi dibentuk salah satunya dengan menjadikan utang seolah-olah merupakan pendapatan. Modus dilakukan dengan cara menjual *future energy* ke bank. Tapi di samping itu, ENRON kemudian melakukan *buy back* atau membeli kembali *future energy* yang sama. Dengan kata lain, transaksi tersebut secara tidak langsung sebenarnya merupakan utang. Dalam pelaporan keuangan, ENRON menempatkan itu ke dalam akun khusus, bukan utang. Tetapi penjualan yang dilakukan apada awalnya, tetap diakui sebagai pendapatan yang berjumlah cukup signifikan yaitu USD 8,6 miliar pada tahun 1992 hingga 2001. Modus lain terjadi pada perusahaan lain seperti WorldCom, Global Crossing, Tyco International, AOL Time Warner, dan lain-lain (Arryman, 2010).

SOX berisikan 11 *tittle* (bab) dan 66 *section* (seksi) yang penjelasan secara umum dan perincian seksinya dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.4 SOX 404: *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR)

Salah satu seksi yang penting untuk dilakukan dalam SOX ini adalah Seksi 404 (SOX 404). Secara umum seksi ini menjelaskan soal peningkatan keterbukaan keuangan, secara khusus menjelaskan tentang penilaian manajemen dan pengendalian internal.

“SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS.

1. RULES REQUIRED.—

The Commission shall prescribe rules requiring each annual report required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) to contain an internal control report, which shall—state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting; and contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting.

2. INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—

With respect to the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment made by the management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made in accordance with standards for attestation engagements issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement.

SOX 404 mengharuskan manajemen membuat pernyataan mengenai tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal dan pelaporan keuangan

(ICOFR) yang dibuat oleh pelakunya. Diikuti dengan *management assessment* atas efektivitas pengendalian internal yang telah dilakukannya dengan membuat pengujian-pengujian. Selanjutnya adapula auditor eksternal yang diminta untuk melakukan atestasi atas *management assessment* tersebut untuk menjamin keefektifan pengendalian internalnya. Seksi ini secara terpirinci diatur di dalam PCAOB *Auditing Standard No. 5* yang berjudul *An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements*.

Laporan ini diminta sekaligus untuk membantu melengkapi informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka mengembangkan efisiensi dan efektivitas Seksi 404. Pelaksanaan bagian ini tidak murah harganya, karena dibutuhkan biaya lebih untuk mendukung pelaporan ini (tambahan biaya auditor dan lain-lain). Akan tetapi menurut *best practice* beban-beban yang dikeluarkan ini nantinya akan menjadi suatu investasi perusahaan di masa yang akan datang berupa kualitas perusahaan yang semakin baik sehingga efektivitas dan efisiensi perusahaan meningkat, selanjutnya akan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan.

2. 5 Siklus Pelaporan Keuangan

Pengendalian membagi laporan keuangan ke dalam komponen yang lebih kecil. Proses ini untuk mempermudah pengauditan dalam hal pembagian tugas kepada anggota pengaudit. Terdapat beberapa cara dalam mengelompokkan audit, salah satunya adalah dengan memperlakukan tiap saldo akun dalam laporan keuangan sebagai kelompok yang terpisah. Pengelompokkan dengan cara tersebut biasanya tidak efisien. Pengelompokan semacam itu akan mengakibatkan audit yang terpisah atas akun-akun yang berhubungan dekat.

Sebuah cara yang umum dilakukan untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat dalam satu siklus yang sama. Pembagiannya sebagai berikut.

1. Siklus Penjualan dan penagihan
2. Siklus Pembelian dan pembayaran
3. Siklus Penggajian dan kepegawaian

4. Siklus Persediaan dan pergudangan
5. Siklus Akuisisi modal dan pelunasan

Pembagian ini tidak mutlak harus seperti itu. Pembagian dilakukan sesuai dengan industri, skala, dan kebutuhan operasi perusahaan.

Di dalam siklus laporan keuangan ini dilakukanlah proses *general ledger* (GL) dan reporting. Proses yang terdapat di dalamnya antara lain:

1. *Accumulating Accounting Transaction*

Semua transaksi akuntansi yang berada pada GL harus diakumulasi, diklasifikasi, dan dirangkum secara tepat ke akun-akunnya masing-masing.

2. *Properly Consolidating Accounting Transactions*

Mengkonsolidasikan transaksi akutansinya secara tepat, misalnya transaksi antara divisi, harus dilakukan eliminasi agar tidak terjadi *double counting*.

3. *Placing Appropriate Controls over Closing*

Semua transaksi haru dicatat secara tepat sesuai dengan waktu pisah batas yang telah ditentukan.

4. *Properly Preparing Accounting Reports*

Ada sebuah laporan yang dipersiapkan di akhir periode akuntansi laporan keuangan sesuai dengan data pada GL.

2.6 Tujuan Audit dan Asersi Manajemen

Auditor beranggapan bahwa cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait (Elder et al., 2008). Sedangkan asersi Manajemen adalah pernyataan tertulis atau tersirat oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Keduanya saling berhubungan dalam rangka pemenuhan hasil akhir audit, yaitu asersi manajemen membantu auditor eksternal untuk melakukan pengujian keyakinan akan asersi tersebut sehingga terpenuhilah tujuan audit.

Berdasarkan SAS 106, berikut adalah pembagian tujuan audit beserta asersinya.

Tabel 2.1 Asersi Manajemen

Asersi Manajemen atas Tujuan Audit terkait Transaksi (<i>Transaction</i>)	Asersi Manajemen atas Tujuan Audit terkait Saldo (<i>Balance</i>)	Asersi Manajemen atas Tujuan Audit terkait Penyajian & Pengungkapan (<i>Presentation & Disclosure</i>)
Occurrence (Keterjadian) Transaksi dan kejadian yang telah dicatat memang benar-benar terjadi dan terkait dengan entitas tersebut.	Existence (Keberadaan) Aset, kewajiban, dan ekuitas benar-benar ada.	Occurrence and Rights & Obligation (Keterjadian dan Hak & Kewajiban) Mengungkapkan kejadian-kejadian dan transaksi yang telah terjadi dan terkait dengan entitas tersebut.
Completeness (Kelengkapan) Semua transaksi dan kejadian yang seharusnya dicatat telah dicatat.	Completeness (Kelengkapan) Semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.	Completeness (Kelengkapan) Seluruh pengungkapan yang seharusnya dicatat telah dicatat.
Accuracy (Akurasi) Jumlah dan data yang terkait dengan transaksi yang dicatat dan kejadian-kejadian telah dicatat dengan tepat.	Valuation & Allocation (Penilaian & Alokasi) Aset, kewajiban, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat serta setiap hasil penilaian penyesuaian telah dicatat dengan tepat.	Accuracy & Valuation (Akurasi & Penilaian) Informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan dengan tepat pada jumlah yang tepat.
Classification (Klasifikasi) Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian telah dicatat pada akun yang tepat.		Classification & Understandability (Klasifikasi & Pemahaman) Informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan dengan tepat pada jumlah yang tepat.
Cutoff (Pisah Batas) Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian telah dicatat di periode pembukuan yang benar.		
	Rights & Obligation (Hak & Kewajiban) Aset yang dimiliki atau berada di bawah kendali entitas merupakan hak dari entitas tersebut, serta kewajiban merupakan kewajiban dari entitas tersebut.	

Sumber: Elder, *Auditing and Assurance Services*

Asersi manajemen yang relevan menurut PCAOB AS 5 hanya ada 5, yaitu:

1. *Existence or occurrence*
2. *Completeness Valuation or allocation*

3. *Rights and obligations*
4. *Presentation and disclosure*

2.7 Proses Audit

Hal yang terpenting dari suatu proses audit adalah tersedia bukti-bukti audit yang memadai untuk mendukung seluruh asersi manajemen atas laporan keuangannya. Auditor harus menentukan tujuan audit yang tepat dan bahan bukti yang tepat pula untuk mencapai tujuan tersebut setiap kali melakukan pengauditan. Hal-hal di atas akan memungkinkan untuk dicapai dengan melakukan serangkaian **proses audit** yang merupakan suatu metodologi untuk melakukan pengauditan yang efektif. Proses ini harus berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal apabila perusahaan yang diaudit adalah perusahaan publik, sesuai dengan yang tercantum pada PCAOB *Auditing Standard* No. 5 yang merupakan revisi dari *Auditing Standard* No. 2.

Proses audit terdiri dari 4 (empat) fase, yaitu:

1. Merencanakan dan Merancang Sebuah Pendekatan Audit

Banyak cara yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai, tergantung pada dua pertimbangan, seperti jumlah bukti yang harus mencukupi untuk menunjang profesionalisme auditor dan biaya pengumpulan bukti seminimal mungkin. Dalam merencanakan proses audit terhadap suatu perusahaan, terdapat tiga faktor informasi penting pada fase ini, yaitu

 - a. Pemahaman atas industri perusahaan dan lingkungannya
 - b. Pemahaman atas pengendalian internal dan melakukan penilaian atas risiko pengendaliannya
 - c. Penilaian terhadap risiko salah saji material
2. Melakukan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif Transaksi (***Test of Controls & Substantive Test of Transaction***)

Test of controls merupakan prosedur audit untuk menguji efektivitas pengendalian untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian yang dinilai. Tujuan yang dapat dicapai melalui proses ini adalah mendapatkan

bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang memiliki andil dalam penilaian risiko pengendalian.

Sedangkan *substantive test of transaction* merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji nominal untuk menentukan apakah tujuan-tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksi. Tujuan yang dapat dicapai melalui proses ini adalah mendapatkan bukti yang mendukung transaksi-transaksi.

3. Melakukan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo (***Analytical Procedures & Test of Details of Balances***)

Dalam *Analytical procedures*, auditor menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Proses ini dilakukan sebelum dan sesudah tanggal neraca. Prosedur ini dapat dilakukan kapan saja karena biayanya yang cenderung murah. Sebaiknya prosedur ini dilakukan sebelum *test of details of balances* agar dapat diketahui seberapa luas pengujian saldo yang dilakukan.

Dilanjutkan dengan *test of details of balances* yang akan menguji salah saji nominal untuk menentukan apakah tujuan-tujuan terkait saldo telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksi. Prosedur ini dilakukan setelah tanggal neraca sekaligus mengetahui apakah pengendalian internal efektif atau tidak.

4. Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit

Fase ini pada dasarnya adalah fase penyelesaian sekaligus pengumpulan bukti tambahan terkait tujuan penyajian dan pengungkapan (*presentation & disclosure*), ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan bentuk-bentuk terbitan lainnya. Prosedur untuk mendukung tujuan *presentation & disclosure* dapat dilakukan sama seperti untuk tujuan terkait transaksi dan saldo. Pada saat manajemen menerapkan pengendalian internal untuk meyakinkan apakah semua informasi yang harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan telah lengkap seluruhnya dan diungkapkan secara akurat, maka

auditor melakukan *test of controls* untuk untuk mendapatkan bukti dalam rangka mencapai tujuan audit terkait *presentation & disclosure* kelengkapan (*completeness*) & akurasi (*accuracy*). Kemudian tahapan selanjutnya adalah menerbitkan hasil audit berupa laporan untuk dikomunikasikan kepada pihak manajemen dan investor.

2.8 Defisiensi

Pada dasarnya suatu pengendalian yang baik berarti ada pencapaian efisiensi pada desain dan prosedur pengendalian internalnya. Sehingga apabila pengendalian internal tidak efisien maka terjadilah suatu defisiensi. Sesuai dengan PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) Auditing Standard No. 5, ada 3 (tiga) defisiensi pada pengendalian internal yang digunakan sebagai indikator hasil penilaian seberapa efektif dan efisienkah pengendalian internal pada suatu perusahaan, yaitu dengan apa yang disebut dengan *control deficiency*, *significant deficiency*, dan *material weakness*. Defisiensi ini pada dasarnya adalah pencocokan apakah implementasi di lapangan sama dengan desain pengendalian internal yang sebelumnya telah dirancang dan disepakati bersama. Penentuannya didasarkan pada materialitas salah sajinnya. Semakin mendekati batas materialitas atau bahkan melebihi, maka semakin tinggi pula tingkat defisiensi dan semakin besar kemungkinan mendapatkan penilaian *material weakness* yang berarti mengindikasikan bahwa pengendalian internal sepenuhnya belum efektif dilakukan.

Pengertian **defisiensi** menurut PCAOB AS 5 adalah sebagai berikut.

“A deficiency in internal control over financial reporting exists when the design or operation of a control does not allow management or employees, in the normal course of performing their assigned functions, to prevent or detect misstatements on a timely basis.

- *A deficiency in design exists when (a) a control necessary to meet the control objective is missing or (b) an existing control is not properly designed so that, even if the control operates as designed, the control objective would not be met.*
- *A deficiency in operation exists when a properly designed control does not operate as designed, or when the person performing the control does not possess the necessary authority or competence to perform the control effectively.”*

Pengertian di atas merupakan *control deficiency*. Kesalahan pada *control deficiency* tidak terlampaui signifikan karena kesalahan ada pada desain pengendalian. *Control deficiency* merupakan kondisi di mana rancangan atau pelaksanaan pengendalian mengakibatkan manajemen atau karyawan tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji (*misstatement*) secara tepat waktu pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam kondisi normal.

*“A **significant deficiency** is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting that is less severe than a material weakness, yet important enough to merit attention by those responsible for oversight of the company's financial reporting.”*

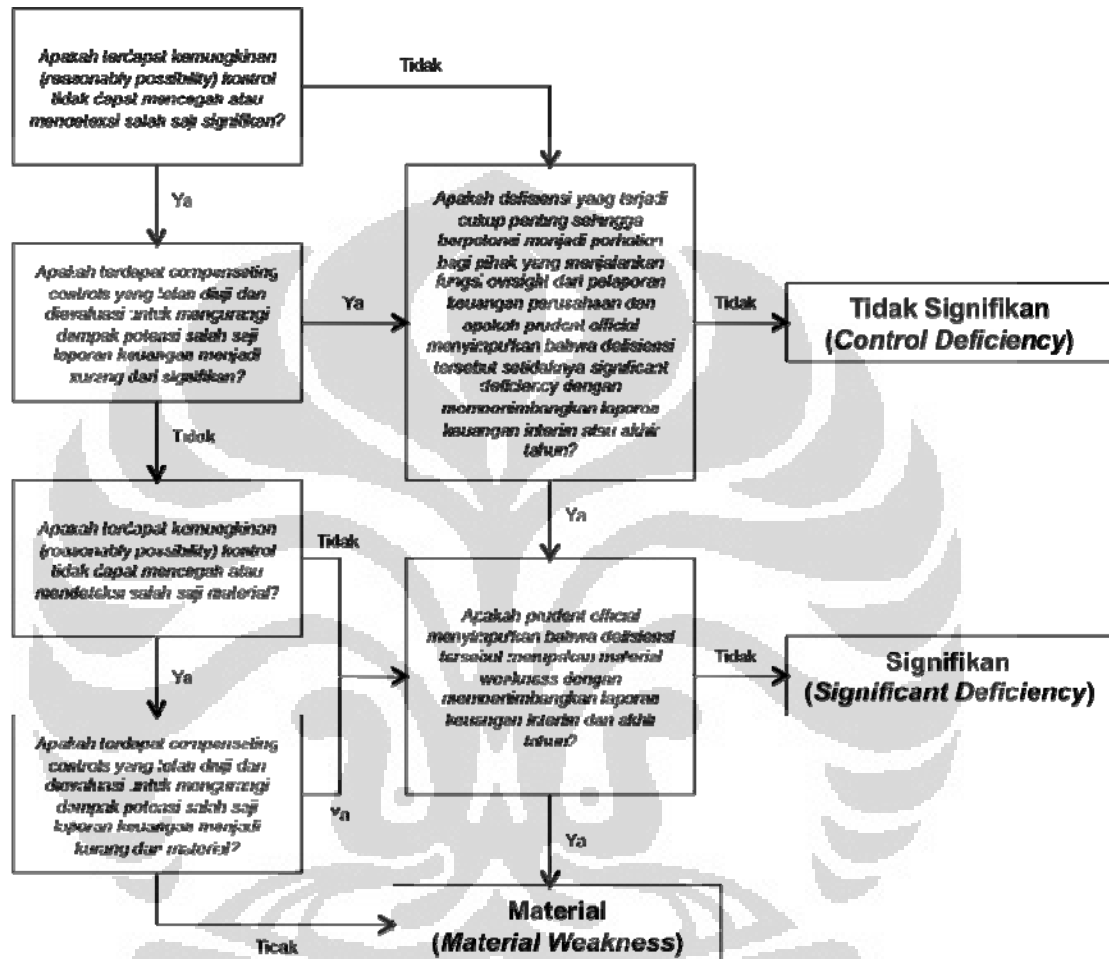
Pengertian *significant deficiency* menurut PCAOB AS 5 di atas menjelaskan bahwa kondisi ini berada di tengah yang berarti kesalahan belum mencapai batas materialitas akan tetapi tetap penting untuk ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan keberadaannya dalam laporan keuangan. *Significant deficiency* merupakan satu atau kombinasi dari beberapa *control deficiency* yang secara negatif mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan proses inisiasi (*initiate*), otorisasi (*authorize*), pencatatan (*record*), pengolahan (*process*), atau pelaporan (*report*) data keuangan yang handal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga besar kemungkinan (*more than a remote likelihood*) terjadinya salah saji (*misstatement*) yang cukup material (*more than inconsequential*) pada laporan keuangan Perusahaan (akhir tahun maupun interim) yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

*“A **material weakness** is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, such that there is a **reasonable possibility** that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.”*

Dari definisi di atas dapat terlihat bahwa *material weakness* merupakan kombinasi dari defisiensi-defisiensi yang ada sehingga menyebabkan salah saji yang melebihi batas materialitas pada pelaporan keuangan (PCAOB AS 5). *Material weakness* merupakan adalah satu atau kombinasi dari beberapa *significant deficiency* yang mengakibatkan besar kemungkinan (*more than a remote likelihood*) terjadinya salah saji yang material (*material misstatement*) pada

laporan keuangan Perusahaan (akhir tahun maupun interim) yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Sesuai dengan PCAOB AS 5, dapat dirumuskan suatu bagan metode untuk mengevaluasi defisiensi.



Gambar 2.2 Mapping Penentuan Defisiensi

Sumber: TELKOM, PCAOB AS No. 5

BAB 3

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Perusahaan

Berdasarkan uraian pada Laporan Tahunan 2010, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) memulai sejarahnya dari pengoperasian telegraf elektromagnetik pertama oleh Belanda pada tahun 1856 antara Batavia (Jakarta) dan *Buitenzorg* (Bogor). Permulaan ini membuat Pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu lembaga milik pemerintah dalam rangka mengembalikan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Tahun 1965 perusahaan bentukan Belanda tersebut mengalami pemisahan menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Selanjutnya pada tahun 1974 PN Telekomunikasi dibagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) dan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel). Masing-masing memproduksi perangkat telekomunikasi dan melayani jasa telekomunikasi domestik dan internasional. Status Perumtel kemudian berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) pada tahun 1991 dan memiliki 12 (dua belas) wilayah telekomunikasi (witel). 12 witel tersebut lalu mengalami perampingan menjadi 7 (tujuh) divisi regional hingga kini, berupa Divisi I Sumatera, Divisi II Jakarta dan sekitarnya, Divisi III Jawa Barat, Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divisi V Jawa Timur, Divisi VI Kalimantan, dan Divisi VII Indonesia Bagian Timur.

Tahun 1995 Telkom mengalami 2 (dua) peristiwa penting di antaranya didirikannya Anak Perusahaan yang bergerak di bidang seluler, TELKOMSEL, pada tanggal 26 Mei 1995. Yang menjadikan TELKOM satu-satunya penyelenggara jasa telepon tidak bergerak di Indonesia. Riwayat *go public* TELKOM juga dimulai sejak tanggal 14 November 1995. TELKOM melakukan penawaran saham perdananya atau IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sejak itu saham TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), *New York Stock Exchange (NYSE)*, dan *London Stock Exchange (LSE)*. Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing/POWL*) di *Tokyo Stock Exchange*.

Peristiwa IPO TELKOM bisa dianggap sebagai sebuah titik balik pertama yang telah dilalui TELKOM. Konsekuensi dari keputusan *go public* dan *go international* tersebut adalah munculnya pemegang saham baru yang mengurangi persentase kepemilikan pemerintah sehingga risiko terkait pasar modal akan lebih besar. Selain itu TELKOM juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan bukan hanya pasar modal dalam negeri, tapi juga pasar modal Amerika Serikat.

Titik balik kedua yang dialami oleh TELKOM adalah diberlakukannya UU Telekomunikasi Baru No. 36 Tahun 1999 yang sekaligus menjadi akhir dari sistem monopoli sektor telekomunikasi Indonesia yang selama ini dipegang oleh TELKOM. Sehingga, dalam rangka menjawab tantangan industri telekomunikasi yang terus berkembang TELKOM mencoba mengembangkan bisnisnya sekaligus budaya operasi internalnya menjadi lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman dan perkembangan industri. Pada tahun 2009 TELKOM melakukan suatu transformasi yang menyeluruh di seluruh lini bisnisnya yang mencakup transformasi bisnis dan portfolio. Yang semula merupakan perusahaan *Infocomm* berubah menjadi perusahaan penyelenggara TIME (*Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment*). Pada tahun tersebut TELKOM meluncurkan logo dan *tagline* baru perusahaan, "*the world in your hand.*"

3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Inisiatif Strategi Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, TELKOM memiliki tujuan berupa visi, yaitu (Laporan Tahunan TELKOM Tahun 2010):

“Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan *Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment* (TIME) di kawasan regional”

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang dimiliki TELKOM adalah:

- Menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif
- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia

Tujuan TELKOM adalah menciptakan posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis *legacy* dan meningkatkan bisnis *new wave* untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.

Inisiatif strategi perusahaan:

1. Mengoptimalkan layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak/*fixed wireline* (FWL).
2. Memperkuat dan mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak/*fixed wireless access* (FWA) dan mengelola portfolio nirkabel.
3. Melakukan investasi pada jaringan *broadband*.
4. Mengintegrasikan solusi bagi UKM, *Enterprise*, dan berinvestasi di bisnis *wholesale*.
5. Mengembangkan layanan Teknologi Informasi termasuk *e-payment*.
6. Berinvestasi di bisnis media dan *edutainment*.
7. Berinvestasi pada peluang bisnis internasional yang strategis.
8. Mengintegrasikan *Next Generation Network* (NGN) dan OBCE (*Operational support system, Business support system, Customer support system, and Enterprise support system*)
9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portfolio.
10. Melakukan transformasi budaya perusahaan.

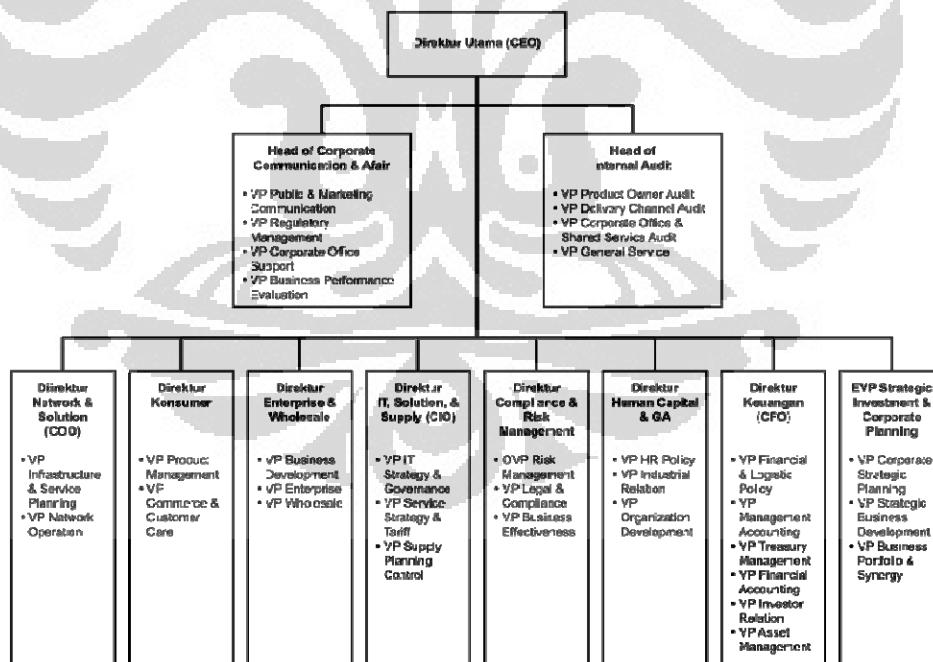
3.3 Struktur Organisasi dan Kelompok Usaha Perusahaan

Struktur organisasi TELKOM terdiri dari:

1. *Corporate Office group*, yang terdiri dari:
 - a. Direktorat *Human Capital & General Affairs*, memfokuskan pada manajemen sumber daya manusia perusahaan serta mengelola fungsi dan operasional sumberdaya manusia secara terpusat.
 - b. Direktorat Keuangan, memfokuskan pada pengelolaan keuangan Perusahaan, mengelola operasi keuangan secara terpusat.
 - c. Direktorat *Information Technology & Supply*, memfokuskan pada manajemen IT perusahaan serta *supply management* dan *Information Center* dan *Supply Center*.

- d. Direktorat *Compliance & Risk Management*, memfokuskan pada kepatuhan, manajemen hukum, dan risiko manajemen perusahaan.
 - e. Unit *Strategic Investment & Corporate Planning*
 - f. *Internal Audit Department*
 - g. *Corporate Affairs*
 - h. *Corporate Communications Department*.
2. *Business Operation Group*, yang terdiri dari:
 - a. Direktorat Konsumer, memfokuskan pada pengelolaan pelayanan bagi segmen pasar retail serta pengelolaan tujuh divisi regional.
 - b. Direktorat *Enterprise & Wholesale*, memfokuskan pada pengelolaan jalur pelayanan bagi segmen pasar *enterprise & wholesale*.
 - c. Direktorat *Network & Solution*, memfokuskan pada pengembangan infrastruktur dan manajemen jasa.

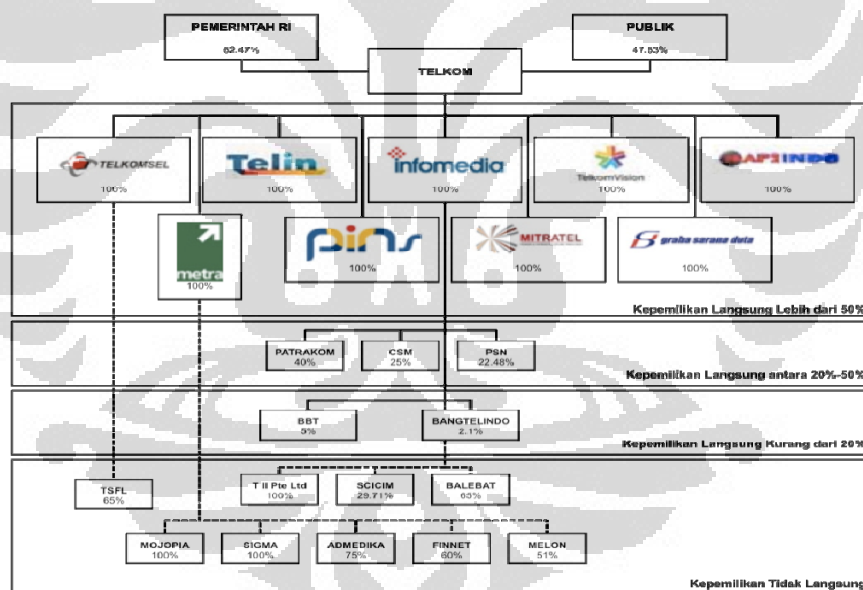
Berikut adalah bagan Struktur organisasi TELKOM.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi TELKOM

Sumber: Laporan Tahunan TELKOM Tahun 2010

Sementara itu, TELKOM pun memiliki jajaran Anak Perusahaan yang bidang usahanya terdiri dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh TELKOM sendiri, maupun berupa ekspansi bentuk usaha. Jajaran tersebut disebut dengan TELOKOMGroup. Anak perusahaan ini ditumbuhkembangkan dalam upaya mengantisipasi tantangan yang muncul di Indonesia dari meningkatnya dinamika industri telekomunikasi baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Agar tercapai sinergi antara TELKOM dengan anak-anak perusahaannya, beberapa posisi strategis telah dibentuk, seperti *Senior Vice President (SVP)* yang secara langsung melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama TELKOM atas nama anak perusahaan. Pada akhir periode tahun akuntansi, anak-anak perusahaan melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan induknya yaitu TEKOM, yang membentuk suatu Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOMGroup. Berikut adalah susunan kepemilikan modal TELKOM.



Gambar 3.2 Struktur Anak Perusahaan TELKOM

Sumber: Laporan Tahunan TELKOM Tahun 2010

3.4 Produk dan Layanan Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telekomunikasi, bisnis TELKOM akan selalu mengalami perubahan. Untuk menjawab tantangan tersebut TELKOM bertekad melakukan transformasi fundamental dan menyeluruh ke seluruh lini bisnis yang mencakup transformasi

bisnis dan portfolio, transformasi infrastruktur dan sistem, transformasi organisasi dan sumber daya manusia serta transformasi budaya. Pelaksanaan transformasi tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kesinambungannya sebagai pemimpin pasar dalam bisnis telekomunikasi domestik dan mendukung upaya diversifikasi bisnis TELKOM dari ketergantungan pada portfolio *Legacy* yang terkait dengan telekomunikasi, yakni layanan telepon tidak bergerak (*Fixed*), layanan telepon seluler (*Mobile*), dan Multimedia menjadi portfolio TIME (*Telecomunication, Information, Media, dan Edutainment*).

Berdasarkan portfolio bisnisnya, TELKOM mengelompokkan kegiatan usahanya sebagai berikut (Laporan Tahunan TELKOM Tahun 2010):

1. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak

- TELKOMLokal
Layanan untuk panggilan antar pelanggan, dalam jarak kurang dari 30 km atau di dalam satu wilayah lokal (Jakarta 021, Surabaya 031, dan seterusnya). Tarif telepon lokal Rp250 per pulsa (enam detik).
- TELKOMSLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh)
Layanan telepon jarak jauh dalam wilayah Indonesia.
- TELKOM SLI-007
Layanan jasa telekomunikasi antar negara dengan menggunakan kode akses 007.
- TELKOMSpeedy
Layanan internet *broadband* dengan kecepatan tinggi hingga 3 Mbps berupa layanan data, multimedia, dan telepon/fax secara bersamaan dengan hanya menggunakan saluran telepon kabel yang sudah ada.

2. Sambungan Telepon Nirkabel Tidak bergerak

- TELKOMFlexi
Layanan telekomunikasi suara dan data yang berbasis nirkabel dengan teknologi CDMA (*Code Division Multi Access*) 2000-IX (terbatas pada satu kode area tertentu, biaya pemakaian mengacu pada tarif telepon rumah).

3. Seluler

Disediakan oleh TELKOMSEL sebagai penyedia layanan telekomunikasi seluler dengan teknologi GSM dan 3G.

- kartuHALO, layanan seluler pascabayar.
- simPATI, layanan Prabayar isi ulang.
- kartu AS, produk *entry-model* dan kartu Prabayar dengan tarif per detik.

4. Data dan Internet

- TELKOMGlobal-01017

Layanan premium panggilan VoIP internasional yang memanfaatkan jaringan internet dengan kode akses 01017 untuk panggilan ke lebih dari 231 kode negara tujuan.

- TELKOMSave

Layanan panggilan jarak jauh dan panggilan VoIP internasional yang sejenis dengan TELKOMGlobal-01017, namun menggunakan metode *dialing* dua tahap.

- TELKOMNet Instan

Layanan akses internet *dial-up* tanpa perlu berlangganan dan khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas (Konfigurasi koneksi internet di komputer dengan *dial-up* 0809 8 9999)

- plasa.com

layanan portal web yang menyajikan layanan informasi serta komunitas internet berbahasa Indonesia dengan fokus layanan pada komunitas pendidikan nasional.

- Kartu i-VAS (*Internet Value Added Service*)

Merupakan alat pembayaran (*micropayment*) Prabayar untuk menjadi alat Prabayar *online* yang dapat memfasilitasi proses pembayaran dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar dan tidak bisa menggunakan kartu kredit.

5. Jaringan dan Interkoneksi

- TELKOMIntercarrier

Layanan interkoneksi dan *wholesale* untuk penyelenggara jasa dan jaringan lainnya yang dikenal dengan OLO (*Other Licensed Operator*).

6. *TELKOM Solution Business Partner (TSBP)*

Digunakan untuk penyelenggaraan konektivitas yang digunakan oleh pelanggan perusahaan atau UKM yang melibatkan seluruh produk dan layanan TELKOM dan TELKOMGroup maupun mitra pendukung.

7. Lain-lain

- **TELKOMVision**

Merupakan produk dari Anak Perusahaan TELKOM, PT Indonusa Telemedia berupa produk TV berlangganan.

3.5 *Stakeholders TELKOM*

Pihak-pihak yang termasuk sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di TELKOM adalah (Arryman, 2010):

1. **Pemerintah Republik Indonesia**

Pemerintah memiliki multiperan dalam kelangsungan bisnis TELKOM, yaitu pemegang saham, regulator, pemberi pinjaman, sekaligus pelanggan. Sampai tahun 2008, pemerintah memiliki 52,47% saham TELKOM.

2. **Bursa Efek Indonesia**

BEI membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh TELKOM terkait masalah pendaftaran, perdagangan, dan keanggotaan di bursa.

3. **Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)**

Sebagai perusahaan dalam negeri yang tercatat di BEI, TELKOM wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh Bapepam-LK dan Bapepam-LK sendiri juga harus memastikan bahwa TELKOM menaati semua peraturan mengenai emiten yang salah satunya mencakup masalah prlaporan keuangan pada Bapepam-LK.

4. **Otoritas Pasar Modal AS (US SEC - *United States Securities and Exchange Commission*)**

US SEC membuat peraturan yang harus dipatuhi TELKOM terkait tercatatnya TELKOM di bursa saham AS dan regulasi terkait lainnya yang dikeluarkan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*).

5. **Investor**

Dampak investor adalah yang terkait dengan imbal hasil baik yang berasal dari nilai saham maupun dividen. Investor juga menuntut pengelolaan perusahaan berdasarkan standar dan prinsip-prinsip etika bisnis. Oleh karena itu, TELKOM menerapkan GCG dalam perusahaan.

6. **Pelaku dan lingkungan bisnis**

Stakeholder ini mencakup seluruh entitas bisnis yang dapat memengaruhi kelangsungan TELKOM seperti kompetitor, mitra kerja, pemasok, pelanggan, serikat pekerja, serta publik secara umum yang menuntut perusahaan mempraktikkan etika bisnis.

7. **Komunitas Keuangan**

Komunitas keuangan meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, Bapepam-LK, US SEC, dan Departemen Keuangan RI.

3.6 **Struktur Governance**

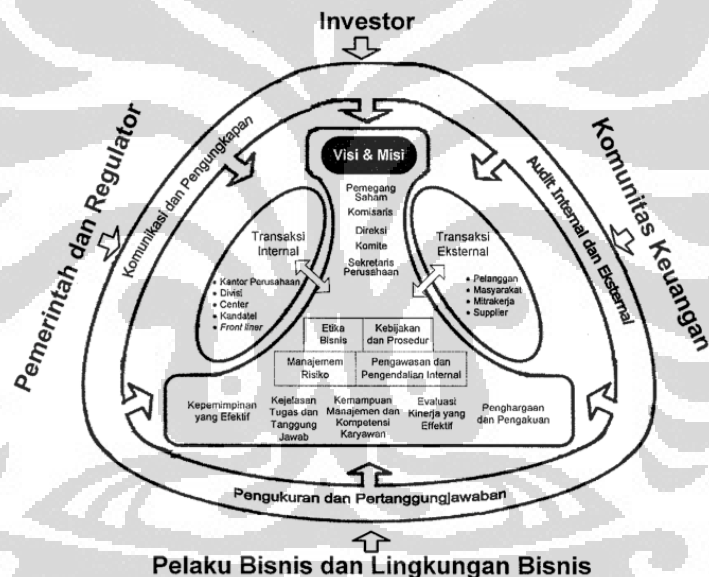
Salah satu prinsip GCG adalah *responsibility* (OECD, 2004). *Responsibility* atau pertanggungjawaban dalam hal ini mengandung arti bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan haruslah memastikan bahwa perusahaan memiliki perdoman strategis, *monitoring* yang efektif kepada manajemen, serta adanya akuntabilitas dari pihak manajemen terhadap pemegang saham yang kesemuanya diperankan oleh dewan.

Dewan dalam hal ini mencakup dewan komisaris, sebagai pengawas, dan dewan direksi, sebagai pelaksana. Dewan harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan dan mencegah kebentrokkan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu dewan haruslah independen dan objektif dalam mengambil keputusan.

Jika OECD membagi tanggung jawab dewan atas dua sistem, *one-tier board* (hanya ada satu dewan dengan fungsi dewan sebagai pembuat strategi perusahaan dan yang menjalankan manajemen serta dewan sebagai pengawas

kinerja manajemen) dan *two-tier board* (fungsi dewan sebagai pembuat strategi dan pelaksana manajemen terpisah dengan dewan dengan fungsi sebagai pengawas). TELKOM menggabungkan kedua sistem tersebut dan menghasilkan istilah *dewan hibrida* (Arryman, 2010). Dewan hibrida berarti secara struktur mengacu pada *two-tier board* namun dengan semangat kerja mengacu pada *one-tier board*. Dalam hal ini, komisaris tetap memiliki otoritas untuk mengawasi kinerja dan memberi nasihat kepada manajemen atau direksi tapi di sisi lain juga memiliki kewenangan untuk turut serta dalam penyusunan strategi dan kebijakan TELKOM.

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang penerapan GCG, TELKOM memiliki kerangka *governance* sebagai berikut:



Gambar 3.3 Bagan Kerangka Kerja GCG TELKOM

Sumber: KD 29/2007 TELKOM

Sesuai dengan kerangka di atas, struktur tata kelola perusahaan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Selain memegang peran sebagai wewenang tertinggi dalam perusahaan, juga sekaligus sebagai forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan.

2. Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TELKOM yang dijalankan oleh Direksi, termasuk perencanaan pengembangan, operasi, dan anggaran, juga faktor kepatuhan akan peraturan.

3. Dewan Direksi

Secara umum tanggung jawab Direksi adalah memimpin dan mengelola operasional Perusahaan serta mengendalikan dan mengelola aset-aset TELKOM atas pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Direksi terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Keuangan
- Direktur *Human Capital & General Affairs*
- Direktur *Network & Solution*
- Direktur Konsumer
- Direktur *Enterprise & Wholesale*
- Direktur *Information Technology, Solution, & Supply*
- Direktur *Compliance & Risk Management*

4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Terdiri dari:

- Komite Audit

Tugas komite audit secara umum adalah memastikan pengendalian atas pelaporan keuangan dan pengendalian risiko sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Bapepam-LK, SEC, dan SOX berdasarkan *Audit Committee Charter*. Per 31 Desember 2010 komite audit TELKOM terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga orang anggota (2 merupakan komisaris independen).

- Komite Nominasi dan Remunerasi

Tujuan utama dibentuk komite nominasi dan remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur, dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen serta menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi.

- Komite Evaluasi dan Monitoring, Perencanaan, dan Risiko
Tujuan dibentuknya KEMPR adalah untuk melakukan peninjauan atas rencana jangka panjang perusahaan serta rencana kerja anggaran tahunan perusahaan dan menyampaikan rekomendasi pada Dewan Komisaris.

5. Komite-komite di bawah Dewan Direksi

Terdiri dari:

- Komite Etika & SDM
 - Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
 - Komite Regulasi
 - Komite Pengelolaan Anak Perusahaan
 - Komite Risiko
6. Sekretaris Perusahaan dan unit-unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan

3.7 *Financial Reporting Governance*

Untuk memenuhi kebutuhan akan laporan keuangan yang berintegritas, yaitu laporan yang relevan dan andal, TELKOM membuat berbagai aturan dan aktivitas yang pada intinya memberi pedoman bagi pelaksanaan tata kelola dalam pelaporan keuangannya. Keseluruhan proses inilah yang disebut dengan *Financial Reporting Governance* (FRG).

Pihak-pihak yang terlibat dalam FRG adalah:

1. **Bagian keuangan dan akuntansi**

Laporan keuangan secara umum memang dijamin oleh direksi. Akan tetapi ada sebuah bagian yang menjalankan pelaksanaan dari penyusunan laporan keuangan, yaitu bagian keuangan dan akuntansi. Dalam pelaksanaannya, unit akuntansi dan keuangan tidak bekerja sendiri. Karena TELKOM *multilisting*, penyusunan laporan keuangan harus tunduk pada peraturan di tempat TELKOM *listing* tersebut. Untuk memastikan bahwa TELKOM benar-benar tunduk pada peraturan, ada pula keterlibatan unit *corporate risk compliance & legal*. Bagian ini bertugas memberikan masukan mengenai aturan-aturan yang relevan untuk diakomodasi ke dalam laporan keuangan TELKOM.

Melengkapi itu semua, dilibatkan pula unit hubungan investor yang akan memberi masukan berdasarkan interaksi langsungnya dengan pihak-pihak terkait, yaitu investor, analis saham, dan lembaga pemeringkat. Dengan ini diharapkan laporan keuangan yang sudah tersusun akan dapat berguna bagi penggunaannya.

2. **Unit Internal Audit**

Untuk memastikan akan kebenaran dari laporan keuangan, maka diperlukan suatu mekanisme keyakinan (*assurance*) dan atestasi terhadap sistem pengendalian internal. Secara internal perusahaan, unit audit internal lah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal atas laporan keuangan dan meninjau atau mengaudit laporan keuangan secara internal. Unit ini juga bertugas untuk menilai bagaimana efektivitas dan efisiensi bukan hanya di bidang operasional, tetapi juga dalam hal keuangan dan akuntansi sesuai dengan peraturan Bapepam-LK IX.1.7.

3. **Auditor Eksternal**

Sesuai dengan SOX 2002, auditor eksternal bertugas untuk melakukan audit terintegrasi atas pengendalian internal dan pelaporan keuangan dari sisi eksternal. Sangat penting untuk menenkankan independensi pada auditor eksternal demi keandalan dan relevansi laporan keuangan yang akan dihasilkan. Auditor eksternal dipilih oleh pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan rekomendasi komite audit. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas auditor sehingga pemilihan ditujukan bukan kepada direksi (pihak manajemen) melainkan kepada pemegang saham, sesuai dengan prinsip V *Corporate Governance* OECD.

4. **Dewan Komisaris: Komite Audit**

Dewan komisaris pada umumnya dan komite audit pada khususnya bertugas untuk melakukan pengawasan atas direksi. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga agar kewajaran pelaporan keuangan selalu terkendali. Bukan hanya direksi yang diawasi, tapi juga seluruh unit-unit yang telah disebutkan di atas.

Komite audit diharapkan dapat menjamin integritas laporan keuangan serta memperbaiki pengendalian internal yang kurang memadai.

FRG memiliki 4 (empat) lapisan tahapan, yaitu:

1. Manajemen menyusun desain pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR)

Desain ini disusun untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan. Desain menentukan efektivitas dan efisiensi langkah-langkah selanjutnya.

2. Melaksanakan ICOFR

Aktivitas pelaksanaan ini nantinya akan dievaluasi oleh unit internal audit dan menilai efektivitasnya. Manajemen juga harus memberikan laporan dan penilaian atas ICOFR yang telah mereka lakukan. Desain sebelum pelaksanaan diharapkan mampu membuat tahapan ini berjalan efektif dan efisien serta laporan keuangan yang dihasilkan berintegritas.

3. Dilakukannya audit terintegrasi (*Integrated Audit*)

Integrated Audit akan dilakukan oleh auditor eksternal/eksternal auditor. Auditor eksternal bukan hanya memberi penilaian atas kewajaran laporan keuangan tapi juga penilaian terhadap ICOFR. *Integrated Audit* lebih lanjut akan dijelaskan pada subbab setelah ini.

4. Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dewan komisaris, yang dalam hal ini dibantu oleh komite auditnya, akan melakukan pengawasan, baik terhadap ICOFR, kerja internal audit, maupun auditor eksternal.

3.8 Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control over Financial Reporting-ICOFR*)

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control over Financial Reporting – ICOFR*) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pelaksanaan

ICOFR ini diatur di dalam SOX *Section* 404 yang berjudul “*Management Assessment of Internal Control.*” *Section* ini mengatur bahwasanya manajemen dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat (NYSE) wajib melakukan pelaporan atas efektivitas ICOFR serta wajib menyertakan attestasi auditor pula atas efektivitas ICOFR-nya.

ICOFR bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan pengelolaan transaksi perusahaan. Tujuan ini selanjutnya akan memerikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta keyakinan yang memadai akan upaya pencegahan atau identifikasi perolehan, penggunaan, atau pengelolaan aset perusahaan tanpa otorisasi yang berdampak material atas pelaporan keuangan. Pada TELKOM, ICOFR dilaksanakan pada tiap lapisan level organisasi.

ICOFR tidak dapat menjanjikan bahwa perusahaan akan mutlak tidak akan mengalami kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya yang bebas dari salah saji material (*material misstatement*) yang merupakan tujuan pengendalian (*control objective*) secara tepat waktu oleh manajemen. Desain dan pelaksanaan yang secermat apapun tidak mampu meniadakan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Keterbatasan ICOFR akan tetap ada karena dalam pelaksanaannya ICOFR merupakan suatu proses yang sangat melibatkan campur tangan manusia yang rentan terhadap kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (*human error*). ICOFR hanya dapat meminimalkan itu semua. Oleh karena itu, terdapat konsep yang disebut dengan “keyakinan yang memadai” (*reasonable assurance*).

Dalam rangka mewujudkan pengendalian internal yang efektif, sesuai dengan rekomendasi US SEC, perusahaan harus menggunakan dan mengacu pada suatu kerangka dasar pengendalian internal yang telah diakui secara global sebagai *best practice* untuk menjamin efektivitasnya. Dalam hal ini, TELKOM menggunakan COSO *Framework*, sebuah kerangka pengendalian internal yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission*. Tujuan COSO adalah menjadi panduan bagi manajemen eksekutif dan para pengelola perusahaan dalam pengelolaan organisasi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan penyusunan pelaporan keuangan.

3.9 Ruang Lingkup ICOFR TELKOM

Aktivitas pengendalian yang nantinya akan dilakukan pada ICOFR TELKOM antara lain akan diterapkan pada tingkat:

1. *Entity-Level Control* (Pengendalian Entitas)

Pengendalian yang dibangun oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah terdapat pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang sesuai pada seluruh organisasi perusahaan. Pengendalian pada tingkat perusahaan adalah proses meliputi; identifikasi, pemahaman, dan evaluasi untuk memastikan hasil rancangan dan penerapan pengendalian internal efektif diterapkan oleh perusahaan.

Yang sudah dilaksanakan antara lain adalah:

- Penyusunan formulasi kebijakan dan implementasi ICOFR dan pengendalian pengungkapan sesuai dengan *Section 404* dan *302 SOX*, Audit Standard No.5
- Menumbuhkan komitmen pengelolaan perusahaan sesuai etika melalui tata kelola yang baik dengan cara penerapan etika bisnis, mencegah benturan kepentingan, *wistleblower*, penerapan *risk management* di setiap unit bisnis, penerapan program *antifraud* pakta integritas, dan lain-lain.
- Menyelenggarakan penilaian risiko rutin dan *risk profiling* sebagai *early detection system*
- Melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan *Entity-Level Control*.

2. *Transactional-Level Control* (Pengendalian Transaksi)

Pengendalian pada tingkat transaksional menunjukkan pengendalian yang lebih difokuskan pada akun-akun signifikan dan proses serta transaksi terkait yang memungkinkan terjadi kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang berdampak pada salah saji pada laporan keuangan. Pengendalian di tingkat ini meliputi:

- *Accounts*, mengidentifikasi akun material yang diperoleh dari laporan keuangan. Akun-akun signifikan ini dipilih berdasarkan:
 - a. Seberapa penting tingkat kesalahan yang dikandung
 - b. Besaran dan komposisi akun
 - c. Perhitungan kerugian atau kecurangan
 - d. Tingginya volume transaksi
 - e. Seberapa besar akun itu mempengaruhi neraca
 - f. Sifat akun itu sendiri
- *Processes*, mengidentifikasi proses material yang terkait dengan akun material dan pengungkapan akun terkait yang ada di laporan keuangan. TELKOM memiliki delapan bisnis proses, yaitu:
 - a. Siklis Pendapatan
 - b. Siklus Pengeluaran
 - c. Siklus Aset Tetap
 - d. Siklus Pajak
 - e. Siklus Perbendaharaan
 - f. Siklus Persediaan
 - g. Siklus Investasi dan Divestasi
 - h. Siklus Pelaporan Keuangan

Beberapa bisnis proses tidak diaudit karena dianggap tidak signifikan.
- *Risks*, mengidentifikasi risiko *error* dan *fraud* yang mungkin terjadi dari proses yang sudah dibentuk dengan memperhatikan prinsip asersi audit yang berpotensi menyebabkan salah saji pelaporan keuangan.
- *Controls*, mengidentifikasi dan merancang pengendalian untuk mencegah risiko yang sebelumnya telah dirumuskan.

Yang sudah dilaksanakan oleh TELKOM antara lain:

- Merancang bisnis proses dengan menggunakan *risk based control* dan menerapkan pemisahan kewenangan berdasarkan prinsip *segregation of duties*
- Memberlakukan disiplin kerja sesuai ketentuan bisnis proses

- *Redesign* bisnis proses secara rutin untuk memastikan agar konsisten dengan perubahan kebijakan dan organisasi, tuntutan bisnis, dan temuan audit
- Melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan *Transactional-Level Control*.

3. **IT Control** (Pengendalian Teknologi Informasi)

Pengendalian teknologi informasi adalah pengendalian yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian di tingkat aplikasi untuk mendukung efektivitas dari pengendalian aplikasi. *IT Control* terbagi menjadi:

- *IT Entity Level Control*, mengatur pengendalian IT di keseluruhan perusahaan. Pengendalian meliputi:
 - a. Rencana strategis sistem informasi
 - b. Manajemen risiko teknologi informasi
 - c. Manajemen kepatuhan
 - d. Kebijakan, prosedur, dan standar teknologi informasi
 - e. Monitoring dan sistem sistem pelaporan teknologi informasi
- *IT General Control (ITGC)*, pengendalian yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian di tingkat aplikasi. Pengendalian meliputi:
 - a. *Computer operations*
 - b. *Access to program and data*
 - c. *Program development*
 - d. *Program change*
- *Application Control*, mencakup pengendalian di tingkat aplikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan transaksi yang meliputi otorisasi, validasi, dan pemrosesan, termasuk pengendalian manual yang terkait dengan pengendalian aplikasi tersebut. Pengendalian meliputi:
 - a. *Balancing control activities*
 - b. *Check digits*
 - c. *Logic tests*

3.10 *Top-Down Approach*

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian internal, khususnya ICOFR suatu perusahaan, maka diperlukan suatu mekanisme pengauditan bagi pengendalian internal itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan di dalam PCAOB *Auditing Standard* No. 5, TELKOM melakukan pengelolaan ICOFR dengan menggunakan pendekatan ***Top-Down***. Pendekatan ini dimulai dari laporan keuangan dan pengendalian pada tingkat entitas (ELC) yang dilanjutkan pada pengelolaan atas akun signifikan, pengungkapan laporan keuangan yang signifikan, asersi keuangan yang relevan, proses signifikan, dan aplikasi yang mendukung proses signifikan. Lima hal di atas menjadi perhatian manajemen untuk melakukan peninjauan terhadap salah saji pelaporan keuangannya. Pendekatan ini mengarahkan manajemen untuk fokus terhadap *key controls* atau pengendalian utama/signifikan sehingga proses ICOFR akan berjalan lebih efisien dan memberi keyakinan bahwa tidak ada *material weakness* (MW) pada hasil proses audit.

1. Akun Signifikan dan Pengungkapan Signifikan

Suatu akun dianggap signifikan bila terdapat kemungkinan bahwa akun tersebut mengandung salah saji (misstatement) yang secara individu, atau bila digabungkan dengan yang lain, dapat memiliki pengaruh material pada laporan keuangan. Identifikasi akun signifikan dilakukan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat komponen akun biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif (saldonya melebihi materialitas di tingkat akun) dan faktor kualitatif (ukuran dan komposisi akun, tingkat kerentanan pada kesalahan dan kecurangan, volume aktivitas, kompleksitas dan keseragaman transaksi individual yang diproses melalui akun tersebut, sifat akun).

Untuk pengungkapan signifikan, semua pengungkapan atau catatan dalam laporan keuangan adalah dipandang signifikan dan termasuk dalam lingkup rancangan pengendalian internal.

2. Asersi Laporan Keuangan yang Relevan

Asersi laporan keuangan yang relevan yang terkait dengan akun signifikan diperlukan untuk menunjukkan bahwa akun disajikan secara wajar. Penentuan asersi laporan keuangan dilakukan di tingkat konsolidasi atas akun-akun dan pengungkapan signifikan di tingkat konsolidasi. Asersi keuangan terkait dengan akun dan pengungkapan signifikan di unit pelaporan harus konsisten dengan asersi keuangan di tingkat konsolidasi. Tidak semua asersi laporan keuangan relevan untuk semua akun. Contohnya, asersi yang terkait dengan aktivitas pengendalian berupa *cash count* untuk akun kas adalah keberadaan (*existence*) dan kelengkapan (*completeness*). Asersi penilaian (*valuation*) mungkin tidak relevan, kecuali akun kas terdiri dari mata uang asing sehingga diperlukan konversi nilai mata uang.

3. Kelompok Transaksi dan Proses yang Signifikan

Penentuan kelompok transaksi dan proses signifikan diperlukan untuk dapat memahami bagaimana suatu transaksi yang berhubungan dengan akun dan pengungkapan signifikan diinisiasi, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan. Dalam proses penetapan proses signifikan dilakukan identifikasi dan dokumentasi catatan, proses, dan prosedur yang signifikan, termasuk identifikasi atas personil dan departemen/unit yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan transaksi. Dalam identifikasi proses signifikan, harus diperhatikan juga penggunaan teknologi informasi dalam proses tersebut. Identifikasi dan dokumentasi yang dihasilkan pada tahapan penetapan proses signifikan akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang dapat terjadi kesalahan/penyimpangan dan kecurangan yang berdampak signifikan pada laporan keuangan.

4. *Top-Down Risk Based Approach*

Dalam rangka mendeteksi sedini mungkin risiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan pada suatu bagian bisnis prosesnya dalam proses pelaporan keuangan, dibuatlah suatu mekanisme yang disebut dengan ***Top-Down Risk Based Approach*** yang secara spesifik menyoal hal-hal yang dapat

menyebabkan pelaporan keuangan menghasilkan informasi yang bias sehingga menyesatkan penggunaannya. Risiko terjadi dapat disebabkan oleh kecurangan-kecurangan (*fraud*) atau salah saji (*error*) yang material atau signifikan sifatnya, dan termasuk pula di dalamnya kesalahan penerapan prinsip-prinsip akuntansi.

Proses penetapan risiko dimulai dari penetapan akun-akun signifikan yang terdapat di dalam laporan keuangan. Akun signifikan ini ditetapkan dengan standarisasi nominal 2,5% dari EBT (*Earning Before Tax*). Setelah akun signifikan teridentifikasi, pemantauan selanjutnya dilakukan ke dalam proses bisnis tempat di mana letak akun signifikan tersebut. Setelah itu diperoleh risiko apa saja yang berpotensi terjadi pada proses tersebut lalu akan diperoleh tindakan, dalam hal ini pengendalian apa yang seharusnya dilakukan di operasional. Penentuan risiko dan pengendalian sesuai dengan aktivitas di atas disebut dengan *Risk-Based Selection of Controls*, yang juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko. Kemudian dilakukanlah identifikasi yang terpenting di dalam identifikasi risiko, yaitu identifikasi “*what can go wrong, how and where.*” Maksudnya adalah identifikasi hal apa yang kira-kira yang dapat disalahgunakan, bagaimana kira-kira bentuk penyalahgunaan itu, dan di mana potensi terjadinya penyalahgunaan. Identifikasi “*what can go wrong*” dapat dilihat di titik-titik proses bisnis yang berpotensi.

Langkah-langkah penilaian risiko di TELKOM adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian dimulai dari *Entity-Level*, dengan mempertimbangkan:
 - Masukan-masukan dari manajemen
 - Kelemahan-kelemahan pengendalian (*deficiencies*) dari periode sebelumnya
 - Inisiatif dan perubahan bisnis yang berkembang
 - Isu-isu yang terkait dengan industri maupun kondisi eksternal di mana perusahaan beroperasi.

b. Berdasarkan masukan-masukan di atas, disusunlah *key business risk*. Isinya mencakup dua hal;

- **Akuntansi pelaporan dan pengungkapan**, terkait dengan ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan semua laporan keuangan. Risiko atas dasar cakupan ini berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan bisnis yang buruk dan menyesatkan investor.
- **Pengendalian internal**, terkait dengan tidak memadainya pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Risiko atas dasar cakupan ini berpotensi menyebabkan adanya *material weakness*.

c. Menentukan *Group Financial Risk* berikut *register*-nya. Penilaian yang dilakukan mencakup:

- *Account risk*
- *Financial statement assertion risk*
- *Process risk*
- *Location risk*

Hasilnya berupa area-area risiko yang disertai dengan deskripsi risiko beserta *rating*-nya yaitu *risk rating* final yang menjadi dasar untuk menentukan *key controls* yang nantinya akan menjadi obyek *assessment* dalam ICOFR.

3.11 ***Integrated Audit***

Integrated audit adalah cakupan yang lebih luas dari tugas auditor eksternal semenjak SOX diterbitkan. Sebelumnya, auditor eksternal hanya bertugas melakukan peninjauan atau mengaudit laporan keuangan. Setelah SOX diterbitkan auditor eksternal juga melakukan peninjauan terhadap sistem pengendalian internal TELKOM. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas karena pencatatan dan pengendalian hanya dilakukan oleh pihak-pihak internal yang tidak bebas dari kemungkinan adanya *kongkalikong* antar pihak internal yang berkepentingan.

Integrated audit (audit terpadu) terdiri atas dua hal, yaitu:

1. **Audit terhadap laporan keuangan** (*General Audit*)

Auditor eksternal memberikan opininya terkait pada kewajaran dari penyajian laporan keuangan ditinjau dari seluruh aspek material, posisi keuangan, kegiatan usaha, dan arus kas.

2. **Audit terhadap ICOFR**

Auditor eksternal memberikan opininya terhadap efektivitas ICOFR pada akhir tahun buku

Pelaksanaan *integrated audit* oleh TELKOM sudah dimulai sejak tahun 2006. Pada tahun-tahun pertama yaitu 2006-2007, auditor eksternal masih menemukan temuan-temuan yang hasil penilaiannya bersifat *material weakness* (MW). MW didefinisikan sebagai sebuah kelemahan pengendalian atau gabungan dari beberapa kelemahan pengendalian, yang mengakibatkan adanya kemungkinan yang lebih dari sekedar kecil bahwa salah saji dalam laporan keuangan tahunan atau interim tidak dapat dicegah atau dideteksi. Karena itu auditor eksternal menyatakan ICOFR TELKOM pada tahun 2006 dan 2007 tidak efektif. Seiring berjalannya waktu MW mengalami peningkatan untuk proses-proses bisnis tertentu menjadi *significant deficiency* atau tingkatan yang paling tinggi adalah *control deficiency*. Walaupun ada beberapa proses bisnis yang jalan di tempat. Pengembangan dilakukan dengan identifikasi berdasarkan COSO *Framework*.

Secara keseluruhan, *integrated audit* tidak hanya menelisik kewajaran angka-angka pada laporan keuangan, tapi juga lebih kepada penekanan pada kualitas dan keandalan proses penyusunannya. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan mekanisme audit di TELKOM sebelum penerapan ICOFR ini dilakukan.

Tabel 3.1 Perbedaan *Traditional Audit* dan *Integrated Audit*

<i>Traditional Audit</i>	<i>Integrated Audit</i>
<p>Atestasi</p> <p>Hanya dilakukan pada pelaporan keuangan secara keseluruhan, kewajaran angka-angka di dalamnya</p>	<p>Selain dilakukan pada pelaporan keuangan secara keseluruhan, kewajaran angka-angka di dalamnya, juga dilakukan terhadap peninjauan terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau ICOFR.</p>
<p>Assessment terhadap pengendalian internal</p> <p>Digunakan untuk menentukan risiko dan kedalaman audit yang akan dilakukan</p>	<p>Dilakukan juga sebagai fokus dari audit itu sendiri dan diberikan opini atas pengendalian internal.</p>

Sumber: KD 13/2009 TELKOM (telah diolah)

Sebelumnya atestasi hanya dilakukan pada pelaporan keuangan secara keseluruhan, kewajaran angka-angka di dalamnya. Pada *integrated audit* atestasi juga dilakukan terhadap peninjauan terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau ICOFR.

3.12 Audit ICOFR

Audit ICOFR sangat dipengaruhi oleh besar dan kompleksitas perusahaan, unit bisnis dan proses yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan audit ICOFR, auditor akan merancang dan melaksanakan program pengujian untuk mengetahui efektivitas perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan. Auditor juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi industri perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, hukum, dan regulasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *top down risk based assessment*, yang berarti risiko ICOFR melekat sifatnya (inherent) dengan risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Judgement awal terkait materialitas, risiko, dan faktor signifikan terkait audit ICOFR ditetapkan oleh auditor. Kemudian, auditor akan mengidentifikasi dan mengevaluasi *control deficiency* (CD) dari hasil audit sebelumnya. Selanjutnya auditor akan memahami risiko perusahaan.

Proses audit ICOFR adalah sebagai berikut:

1. ***Walkthrough***

Pelaksanaan walkthrough dilakukan secara berkala agar dicapai efektivitas sasaran pengendalian. Walkthrough dilakukan terhadap semua proses signifikan dan key control. Dalam melaksanakan walkthrough, auditor akan mengikuti transaksi dari awal termasuk sistem informasi (IT) yang terkait sampai dengan akhir pencatatan, juga akan mengikuti arus proses transaksi dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait. Tujuan walkthrough dalam audit ICOFR adalah untuk melakukan verifikasi bahwa auditor telah mengidentifikasi seluruh titik-titik dalam proses yang kemungkinan mengandung salah saji material dikaitkan dengan asersi yang relevan, bahwa auditor telah paham atas rancangan pengendalian, termasuk pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi fraud, mengetahui desain/rancangan pengendalian, serta apakah pengendalian yang telah dirancang sesuai dengan implementasi di lapangan.

2. ***Test Of Control (TOC)***

TOC dilakukan secara interim dan akhir tahun. Pemilihan pengendalian yang akan diuji dalam audit ICOFR dilakukan karena dibutuhkan oleh auditor untuk menyimpulkan apakah perusahaan telah cukup melakukan pengendalian internal mengacu pada hasil penilaian risiko dari setiap asersi yang relevan. Dari asersi yang relevan, kemungkinan lebih dari satu pengendalian dalam memitigasi risiko tertentu, atau sebaliknya beberapa risiko dimitigasi oleh satu pengendalian. Penetapan pengendalian yang dipilih untuk diuji ditentukan berdasarkan pelaku pengendalian, pengendalian individual, atau kombinasi dan kecukupan pengendalian dalam memitigasi risiko salah saji, kemudian pengendalian dimaksud dikelompokkan sesuai kategorinya: ELC, TLC, *monitoring*, pengendalian pencegahan, dan lain-lain.

Semakin luas jumlah maupun area yang menerapkan pengendalian, maka semakin banyak bukti (evidence) yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian. Bukti atas penilaian efektivitas pengendalian

diperoleh berdasarkan pengujian masing-masing TOC yang didasarkan pada risiko yang dikendalikan. Apabila ditemukan deviasi atas pengendalian yang dilakukan, maka akan ditetapkan risiko yang berkaitan dan selanjutnya menjadi bukti atas hasil TOC. Dalam proses pengujian TOC akan dihasilkan penilaian auditor bahwa pengendalian telah efektif atau tidak efektif, bila tidak efektif maka berpotensi munculnya *material weakness* (MW).

3. Akhir Periode Pelaporan Keuangan (*Period End Financial Reporting Process*)

Proses akhir periode pelaporan keuangan dipandang sangat penting dalam penentuan pemberian opini atas efektivitas ICOFR dan opini Laporan Keuangan. Pengujian proses akhir periode pelaporan keuangan termasuk meliputi pengujian *General Ledger* (GL), pengujian jurnal, pengujian transaksi, dan pengujian Laporan Keuangan

3.13 Evaluasi ICOFR dan Materialitas

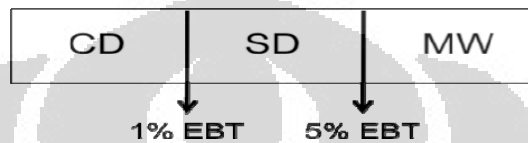
Hasil penilaian ICOFR berupa suatu istilah yang dinamakan **defisiensi**. Proses terjadinya suatu penilaian defisiensi dimulai dari identifikasi proses, risiko apa saja yang berpotensi menghambat, dan pengendalian yang dibutuhkan apa saja. Dari ketiga hal tersebut dilakukan suatu *assessment* untuk memilih mana di antaranya yang bersifat signifikan. Setelah itu, dilakukanlah proses *walkthrough*. Pada proses ini dilakukan proses pencocokan apakah implementasi di lapangan sesuai dengan desain/rancangan pengendalian internal atau tidak. Apabila sesuai, berarti pengendalian sudah efisien. Apabila tidak sesuai, maka proses dilanjutkan ke tahapan TOC, dan dapat dikatakan bahwa proses pengendalian tidak efisien atau mengalami defisiensi.

Evaluasi dinilai dengan 2 kriteria, kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif.

1. Kriteria Kuantitatif

Kriteria kuantitatif yang digunakan untuk evaluasi ICOFR adalah materialitas. *Threshold* materialitas yang digunakan oleh TELKOM adalah 5%

dari EBT (*Earning Before Tax*). Nominal salah saji yang berada di atas *threshold* akan menghasilkan penilaian *material weakness* (MW). Terdapat 2 kemungkinan hasil penilaian secara kualitatif apabila salah saji bernominal di bawah *threshold*. Batas terendah adalah 20% dari 5% EBT atau 1% EBT, dan hasil salah saji di bawah ini memiliki kemungkinan mendapatkan penilaian *control deficiency* (CD). Sedangkan antara 1% EBT dengan 5% EBT penilaian yang dihasilkan adalah *significant deficiency*.



Gambar 3.4 Kriteria Kuantitatif Evaluasi ICFR TELKOM

2. **Kriteria Kualitatif**

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa faktor:

- a. Kesalahan pada desain/rancangan. Ketika ketidakefektifan pengendalian internal terjadi karena kesalahan ada pada rancangan padahal pelaksana sudah melakukan sesesuai mungkin dengan rancangan, maka penilaiannya adalah CD.
- b. Kesalahan pada lingkungan. Ketika salah saji yang dihasilkan dilakukan tanpa alasan, maka penilaiannya adalah MW.
- c. Kesengajaan. Jika salah saji dihasilkan karena unsur kesengajaan dan yang melakukan adalah pihak top manajemen, maka penilaiannya adalah MW. Sedangkan apabila kesengajaan dilakukan berdasarkan faktor frekuensi yang dilakukan oleh pelaku pengendalian, penilaiannya adalah SD untuk yang frekuensinya sering dan CD untuk yang frekuensinya jarang (karena kelalaian). Semuanya dilihat dari *likelihood* dan *magnitude*-nya.

Tabel 3.2 Kriteria Kualitatif Evaluasi ICOFR TELKOM

Tipe	Potensi Terjadi Salah Saji Pelaporan Keuangan			Nilai Kuantitatif
	Likelihood		Magnitude	
CD	<i>Remote</i>	dan/atau	<i>Insignificant</i>	<1% EBT
SD	<i>Reasonably Possible</i>	dan	<i>Significant</i>	1%-5% EBT
MW	<i>Probable</i>	dan	<i>Material</i>	>5% EBT

Keterangan:

EBT = *Earning Before Tax*

CD = *Control Deficiency*

SD = *Significant Deficiency*

MW = *Material Weakness*

Sumber: KD 13/2009 TELKOM (telah diolah)

3.14 Bisnis Proses SOX

Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan yang *multilisting* terutama di NYSE, TELKOM harus merancang suatu sistem yang menunjang pengendalian internalnya. Perancangan ini merupakan hasil dari Proyek Integrasi Internal Control (ProIIC) yang pada saat itu dibantu oleh konsultan dari KAP Ernst & Young dan dapat mandiri pada tahun 2005. Sistem yang dibentuk ini disebut dengan **Bisnis Proses SOX**.

Bisnis Proses SOX terdiri dari 8 siklus yang juga terdiri dari beberapa bisnis proses di dalamnya. Keseluruhannya dikelola di bawah naungan SOX berdasarkan prinsip-prinsip ICOFR menggunakan kerangka COSO *Internal Control Framework*. Proses di dalam tiap siklus dilanjutkan dengan beberapa subproses. Proses-proses ini tercantum di atas kertas berbentuk *flowchart* dilengkapi dengan risiko (R1, R2, R3, dan seterusnya) apa aja saja yang berpotensi terjadi pada subproses berikut pengendalian (C1, C2, C3, dan seterusnya) yang harus dilakukan (contoh *flowchart* dapat dilihat pada lampiran). Tidak seluruh risiko dan pengendalian signifikan dampaknya sehingga diperlukan pula proses *risk assessment* dan pemilihan *key control* agar pelaksanaan pengendalian lebih terfokus pada bagian yang signifikan. Pada bisnis proses ini tercantum pula letak divisi mana yang melaksanakan kegiatan termasuk pengendaliannya.

Terdapat 8 siklus dengan 144 proses di dalamnya, yang secara umum menjelaskan (perincian proses dapat dilihat pada Lampiran 3.1):

1. Siklus Pendapatan

Terdiri dari 7 subsiklus yang terbagi berdasarkan produk TELKOM, yaitu POTS, Flexi, Non POTS, TG 017, TG 007, ITSL, dan Speedy. Siklus Pendapatan secara umum berisi proses-proses untuk mengakui pendapatan. Terdapat hal-hal signifikan di dalam siklus ini, seperti proses *billing*, pengakuan pendapatan, dan penyisihan piutang.

2. Siklus Beban

Terdiri dari 5 proses yang menjelaskan mengenai proses perusahaan dalam mengakui suatu beban. Terdapat hal-hal signifikan di dalam siklus ini, seperti proses *payroll*, akrualisasi dan penyesuaian, serta amortisasi.

3. Siklus Pengadaan dan Aset Tetap

Terdiri dari 2 subsiklus, siklus pertama terdiri dari 5 proses dan siklus kedua terdiri dari 8 proses. Hal-hal signifikan yang terdapat di dalam proses ini adalah pengadaan barang atau jasa, tambah kurang pekerjaan, monitoring kontrak pengadaan barang atau jasa, penerimaan barang atau jasa, amandemen kontrak, sampai ke perlakuan akunatansinya seperti pengakuan dan penetapan aset tetap dan aset tidak berwujud serta pencatatan uang muka untuk aset tetap.

4. Siklus Persediaan

Siklus ini memiliki 2 subsiklus dengan 2 proses pada subsiklus pertama dan 3 proses pada subsiklus kedua. Pada dasarnya siklus ini menceritakan pengadaan inventornya yang berupa kartu telepon. Industri ini dapat dikatakan sudah tidak berkembang sehingga nilainya pun untuk TELKOM sudah tidak material. Oleh karena itu, siklus ini **tidak diaudit**.

5. Siklus Perpajakan

Siklus ini memiliki 7 subsiklus. Karena ini adalah Siklus Perpajakan, 7 siklus tersebut terdiri dari penggolongan pajak, PPh, PPN, Bea Materai, PBB Perhitungan Pajak Kini & Tanggahan, Kebijakan Perpajakan, dan Transaksi Hubungan Istimewa. Semua jenis pajak tersebut signifikan kecuali Bea Materai, PBB, dan Transaksi Hubungan Istimewa.

6. Siklus Perbendaharaan

Siklus ini memiliki 4 subsiklus, pengaturan kas masuk dan kas keluar. Masing-masing memiliki 10 dan 5 proses. Sedangkan 2 subsiklus lainnya tidak signifikan, yaitu transaksi Palapa Ring dan pemberian Pinjaman kepada Anak Perusahaan. Proses yang signifikan antara lain penerimaan kas dan bank, penerimaan piutang pendapatan terpusat, pengeluaran kas dan bank, kas kecil (*imprest fund*), manajemen valuta asing, monitoring, pendanaan melalui bond dan loan.

7. Siklus Investasi/Divestasi

Siklus Investasi/Divestasi berisi proses TELKOM melakukan kegiatan investasinya terutama ke Anak Perusahaan. Siklus ini hanya terdiri dari 4 proses, yaitu perencanaan, pematangan konsep, eksekusi dan pascaeksekusi, serta monitoring, tetapi yang signifikan hanya proses pematangan konsep serta eksekusi dan pascaeksekusi.

8. Siklus Pelaporan Keuangan

Siklus ini berisi proses penyusunan laporan keuangan dari penyusunan kebijakan, *update* akun-akun baru, pembuatan *trial balance*, proses eliminasi dalam konsolidasi, penyusunan menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan kepemilikan modal, penyusunan *disclosure*, sampai dengan pembuatan laporan ke Bapepam-LK dan SEC. Keseluruhan proses tersebut terdapat pada 10 proses dan semuanya signifikan. Untuk siklus pelaporan keuangan lebih lanjut akan dijelaskan pada bab selanjutnya, Pembahasan.

Seluruh transaksi terhubung ke satu sistem, yaitu SAP.

BAB 4 PEMBAHASAN

TELKOM memiliki serangkaian bisnis proses SOX yang terdiri dari delapan siklus. Bisnis Proses SOX terdiri dari siklus penerimaan, beban, pengadaan dan aset tetap, persediaan, pajak, *treasury*/perbendaharaan, investasi/divestasi, serta pelaporan keuangan. Bisnis proses ini bukan hanya menjelaskan prosedur transaksi akuntansi perusahaan, tetapi di dalamnya terdapat pula rincian potensi risiko dan pengendalian seperti apa yang harus dilakukan sehingga diharapkan akan mampu menjadi panduan bagi divisi terkait ketika menjalankan tugasnya.

Bisnis proses ini dapat dikatakan sebagai sebuah panduan operasional dalam menjalankan pengendalian internal perusahaan. Setiap tahun output dari proses ini akan diaudit oleh auditor eksternal dengan auditor internal yang akan mengawasi kinerja divisi yang bersangkutan. Prosedur audit dilakukan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menghasilkan temuan-temuan apabila ada. Temuan-temuan ini merupakan indikator bahwa masih kurangnya efektifitas pengendalian internal yang dijalankan seiring dengan proses yang sudah dirancang. Pada akhirnya muncullah penilaian yang disebut dengan **defisiensi**. Defisiensi terdiri dari *control deficiency*, *significant deficiency*, dan *material weakness* yang dinilai berdasarkan intensitas kondisi yang menunjukkan rancangan atau pelaksanaan pengendalian membuat manajemen tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji pada saat melaksanakan tugasnya.

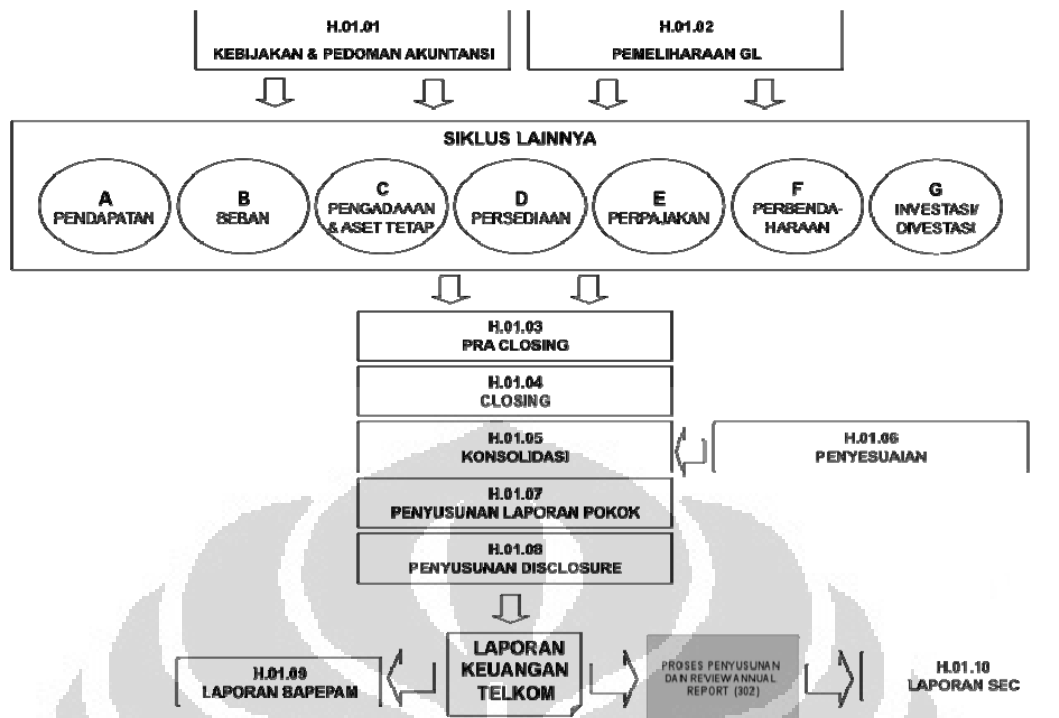
Berdasarkan data temuan *integrated audit* tiap tahunnya dan diskusi dengan pihak internal perusahaan, Siklus Pelaporan Keuangan yang paling rentan terhadap salah saji dengan hasil penilaian yang diperoleh tetap dari tahun ke tahunnya, yaitu *significant deficiency* padahal hampir seluruh bisnis proses di dalam siklus ini signifikan keberadaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan *management assessment* tahun 2008, salah saji yang dihasilkan pada Siklus Pelaporan Keuangan sangat material dibandingkan dengan siklus lainnya. Oleh karena itu analisis ini akan lebih difokuskan pada Siklus Pelaporan Keuangan dimulai dari penjelasan mengenai bisnis prosesnya. Penjelasan akan

dilanjutkan dengan meninjau temuan *integrated audit* akhir tahun dari auditor eksternal yang dalam tiga tahun tinjauan analisis ini dilakukan oleh PwC. Analisis akan difokuskan terutama pada proses yang defisiensinya tidak berubah dan yang mengalami penurunan. Untuk itu akan dilakukan suatu *gap analysis* antara bisnis proses dengan temuan auditor eksternal yang kemudian ditinjau ke tingkat implementasi di lapangan sehingga pada akhir pembahasan ini akan didapat apakah penyebab utama dari eksistensi *significant deficiency* pada *integrated audit* Siklus Pelaporan Keuangan dan akan dipaparkan pula rekomendasi agar *significant deficiency* dapat semakin berkurang. Defisiensi muncul karena adanya ketidaksesuaian implementasi dengan desain pengendalian.

4.1 Siklus Pelaporan Keuangan

Siklus Pelaporan Keuangan berisi aktivitas TELKOM dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan pada siklus-siklus sebelumnya. Termasuk di dalam siklus ini adalah pembuatan pedoman akuntansi yang akan dipergunakan dalam penyusunan sampai jadinya laporan secara keseluruhan yang nantinya akan diserahkan kepada Bapepam-LK dan US SEC. Siklus Pelaporan Keuangan terdiri dari 10 proses (per 1 September 2010) yang secara umum tergambar dalam diagram pada Gambar 4.1.

Semua proses dilangsungkan sesuai ketentuan yang pada awal proses disusun oleh unit FLP (*Financial & Logistic Policy*) dan berupa hasil rekapitulasi standar akuntansi, kebijakan perusahaan, Peraturan Pemerintah, dan industri. Oleh karena itu proses yang paling awal, H.01.01 dan H.01.02, sangat berperan sebagai pedoman dijalankannya proses-proses selanjutnya. Keseluruhan proses pada siklus ini dilaksanakan pada unit FA (*Financial Accounting*) dan beberapa divisi terkait lain tergantung dari informasi apa yang dibutuhkan oleh laporan keuangan. Subbab-subbab di bawah ini akan menjelaskan masing-masing dari proses dan subproses yang terdapat di dalam Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM (Revisi 1 September 2010).



Gambar 4.1 Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM

Sumber: Sosialisasi Siklus Pelaporan Keuangan TELKOM R.2011_rev010511

4.1.1 Proses H.01.01: Kebijakan dan Pedoman Akuntansi

Proses pertama dalam Siklus Pelaporan Keuangan adalah menyusun kebijakan dan pedoman akuntansi untuk pencatatan transaksi. Proses ini dimulai dengan penyusunan **Kebijakan Akuntansi, Pedoman Akuntansi, dan Juklak Akuntansi** yang dilakukan oleh FLP. FLP akan mengidentifikasi peraturan-peraturan baru, kebijakan-kebijakan TELKOM, serta kebijakan dan pedoman terkait akuntansi yang digunakan TELKOM sekarang. Setelah itu dianalisis perbedaannya (*gap*) dan melakukan komparasi pedoman-pedoman seperti PSAK, Peraturan Bapepam, IAS, USGAAP untuk dirumuskan suatu kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk perusahaan.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.01 antara lain:

- H.01.01.01** Penyusunan/Monitoring & *Updating* Kebijakan/Pedoman/Juklak Akuntansi
- H.01.01.02** Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi untuk Significant Issues
- H.01.01.03** Penyusunan *Assessment* Kuantitatif untuk Significant Issues

4. 1. 2 Proses H.01.02: Pemeliharaan *General Ledger*

Di dalam proses ini akan dilakukan identifikasi, evaluasi, eksekusi, verifikasi, dan *monitoring* atas penambahan dan atau *blocking* akun-akun yang ada di SAP. SAP merupakan *software* utama yang dipakai TELKOM untuk input keseluruhan transaksinya. Di dalam proses ini juga dilakukan proses *update* atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam konsolidasi, seperti *offsetting*, eliminasi, dan reklasifikasi yang dilakukan secara manual. Pengendalian yang signifikan dilakukan pada proses ini ada melakukan peninjauan kembali atas kebutuhan *updating* akun dan peninjauan ulang pula antara laporan *updating* dengan form *GL account maintenance* secara 3 bulanan.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.02 antara lain:

H.01.02.01 *Updating Akun*

H.01.02.02 *Mapping Akun-akun Offsetting, Eliminasi, dan Reklasifikasi*

4. 1. 3 Proses H.01.03: Pra-Closing

Proses ini akan menganalisis dan menindaklanjuti perihal kewajaran saldo dan akun estimasi sampai dengan pembuatan Nota Kesiapan *Closing* Nasional dalam rangka pembentukan *Trial Balance* TELKOM yang belum dikonsolidasi (*unconsolidated*). Di dalamnya terdapat rekonsiliasi antara *Modul Loan* dan GL. Pengendalian yang signifikan dilakukan dalam proses ini berupa adanya verifikasi hasil *posting* jurnal penyesuaian di SAP dibandingkan dengan memo jurnal penyesuaian. Hal tersebut juga dilakukan pada jurnal koreksi. Terdapat beberapa pengendalian aplikasi di dalam proses ini

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.03 antara lain:

H.01.03.01 *Analisa Akun Pra Closing dan Penyesuaian*

H.01.03.02 *Rekonsiliasi Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo*

H.01.03.03 *Nota Kesiapan Closing*

4.1.4 Proses H.01.04: *Closing*

Proses *closing* berisi proses-proses yang mendukung sampai dilakukannya *closing* Nasional dalam rangka membentuk TB TELKOM *unconsolidated*. Dimulai dari pemberitahuan atas batas *closing* SAP, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan porsi TELKOM atas laba rugi laporan keuangan anak perusahaan dan pembagian dividen, sampai ke penyusunan TB TELKOM *unconsolidated* bulanan. Proses penyesuaian dan koreksi akan berjalan seiring dengan berjalannya transaksi. Proses ini juga merekonsiliasi piutang/pendapatan & beban/kewajiban TELKOM dan anak perusahaan. TB TELKOM *unconsolidated* juga dibuat secara triwulanan. Pengendalian yang signifikan dilakukan pada proses ini adalah peninjauan ulang hasil posting pada SAP lalu dibandingkan dengan Memo Jurnal. Peninjauan ulang juga dilakukan pada Berita Acara Rekonsiliasi.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.04 antara lain:

H.01.04.01 *Warning* Batas Akhir *Closing* SAP

H.01.04.02 Pengakuan Porsi Telkom atas Laba/Rugi Anak Perusahaan

H.01.04.03 *Closing* I

H.01.04.04 Penginputan Transaksi AJK dan Koreksi Lainnya

H.01.04.05 Rekonsiliasi Pra *Closing* II

H.01.04.06 *Closing* II

H.01.04.07 Perhitungan Penyusutan Aset Hasil *Fair Value* dan *Goodwill* - Manual

4.1.5 Proses H.01.05: **Konsolidasi**

Proses Konsolidasi ini terdiri dari proses-proses yang mendukung dalam rangka menyusun TB TELKOM *consolidated*. Proses dimulai dengan meninjau TB anak perusahaan untuk mengecek kesinambungan *Net Income* dengan ekuitas. Dilanjutkan dengan perbandingan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi anak perusahaan dengan TB anak perusahaan. Proses ini ditutup dengan penggabungan TB konsolidasi. Proses *offsetting*, eliminasi, dan reklasifikasi yang dilakukan pada saat konsolidasi dilakukan secara manual. Proses yang signifikan

dilakukan di dalam proses ini adalah meninjau ulang *offsetting*, eliminasi, memo jurnal penyesuaian, dan memo jurnal koreksi anak perusahaan.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.05 antara lain:

H.01.05.01 *Interfacing* TB

H.01.05.02 Penerimaan Neraca dan Laba/Rugi Anak Perusahaan

H.01.05.03 *Offsetting*, Eliminasi, dan Konsolidasi

4.1.6 Proses H.01.06: Penyesuaian

Dalam proses penyesuaian dibuatlah memo jurnal penyesuaian akibat adanya koreksi dari auditor baik internal maupun eksternal atas akun-akun tertentu. Pengendalian utamanya adalah *review* memo jurnal penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukungnya dilakukan oleh divisi terkait.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.06 antara lain:

H.01.06.01 Koreksi Audit

4.1.7 Proses H.01.07: Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (*Basic Financial Statement*)

Proses ini merupakan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Sumber laporan-laporan ini adalah TB TELKOM yang telah dikonsolidasi. Penyusunan ini dilakukan secara manual dengan Microsoft Excel. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan *review* kelengkapan laporan konsolidasian dengan sebuah *check list*.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.07 antara lain:

H.01.07.01 Penyusunan Laporan Pokok (*Basic Financial Statement*)

4.1.8 Proses H.01.08: Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (*Disclosure*)

Proses ini merupakan proses disusunnya catatan atas laporan keuangan dan rekonsiliasi antara IFRS dan PSAK. Yang dilakukan di dalam proses ini ada pengumpulan data-data dari unit terkait dalam rangka pengisian *disclosure*/catatan atas laporan keuangan baik untuk kepentingan PSAK maupun IFRS dan proses

review serta penyusunannya. Proses ini dilakukan secara manual dengan Microsoft Excel dan pengelompokannya dilakukan satu persatu dengan tenaga manusia. Pengendalian yang dilakukan mirip dengan proses H.01.07 yaitu memeriksa kelengkapannya dan akurasi data-data di dalamnya.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.08 antara lain:

H.01.08.01 Penyusunan *Disclosure* atas Laporan Keuangan

H.01.08.02 Rekonsiliasi USGAAP dan Indonesian GAAP

4.1.9 Proses H.01.09: Penyusunan Laporan Keuangan TELKOM ke Bapepam-LK

Laporan konsolidasian ini disusun dalam rangka pelaporan ke Bapepam-LK. Secara umum prosesnya berisi penggabungan data-data yang sebelumnya telah dibentuk pada proses H.01.07 dan H.01.08. Pengendalian yang dilakukan diantaranya *review* Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan *checklist* Bapepam-LK, standar format pelaporan, dan “*Disclosure objective review*” (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta *review draft* final Laporan Keuangan TELKOM Konsolidasian setelah AVP Financial Statemen melakukan verifikasi dan membandingkan dengan pembahasan/revisi eksternal auditor.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.09 antara lain:

H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam)

4.1.10 Proses H.01.10: Laporan SEC

Proses ini berisi *review* konsistensi Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM dalam rangka pelaporan ke SEC. Terdapat suatu format standar dari US SEC yang bernama “Form-20F” yang harus dilengkapi oleh TELKOM dalam rangka penyerahan laporan tersebut ke Amerika Serikat. Pengendalian yang dilakukan adalah *review* kelengkapan Form 20-F.

Subproses yang dilakukan pada proses H.01.10 antara lain:

H.01.10.01 *Review* Konsistensi Data Keuangan Form 20F

4.2 Laporan Manajemen

Sesuai dengan ketentuan SOX 404 yang mengacu pada *Security Exchange Act Section 13(a)* atau *15(d)*, disebutkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk membuat suatu laporan yang berisi bagaimana cara perusahaan melaksanakan prosedur dan pemeliharaan pengendalian internalnya sehingga mendukung kelangsungan perusahaan, termasuk di dalamnya melakukan *assessment* atas efektivitas pengendalian internal dalam rangka laporan keuangan. TELKOM sebagai perusahaan yang wajib patuh terhadap aturan tersebut dan membuat Laporan *Management Assessment* ini. Laporan ini hanya dibatasi pada penilaian efektivitas dan efisiensi ICOFR, bukan untuk tujuan efektivitas serta kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku pada operasional. Pelaksanaan *Management Assessment* TELKOM ini didasarkan pada PCAOB Auditing Standard (AS) No. 5 – *An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements. Assessment* atau audit SOX ini dilakukan oleh auditor eksternal dan auditor internal, apa yang menjadi temuan auditor internal akan pula menjadi bagian temuan auditor eksternal. *Assessment* ini menghasilkan penilaian berupa **defisiensi** yang pada akhirnya akan didiskusikan bersama manajemen. Hasil akhir diskusi inilah yang akan dimasukkan ke dalam Laporan *Management Assessment*. Analisis *assessment* yang dilakukan hanya akan dibatasi pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Tujuan dilakukannya *assessment* ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memastikan bahwa rancangan pengendalian internal pada tingkat entitas (*Entity-Level Control*) yang ada telah dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi secara efektif.
2. Untuk menentukan apakah rancangan pengendalian dapat memenuhi tujuan pengendalian dan dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan yang dapat menyebabkan salah saji material di dalam laporan keuangan.
3. Untuk memastikan bahwa rancangan pengendalian transaksional (*Transactional-Level Control*) yang ada telah dilaksanakan secara efektif di seluruh organisasi perusahaan.

4. Untuk memastikan bahwa rancangan pengendalian IT (*IT Control*) mampu memitigasi risiko IT yang terkait dengan pelaporan keuangan ke tingkat yang dapat diterima manajemen.
5. Untuk mengevaluasi defisiensi yang terjadi sebagai dasar pernyataan manajemen atas efektivitas ICOFR.

Pengujian pengendalian internal pada TLC meliputi seluruh rancangan pengendalian internal yang dinilai efektif secara desain, sehingga peninjauan hanya akan dilakukan pada efektivitas pengendalian (*Audit Standard* No. 5). Di dalam aktivitas ini termasuk pengendalian manual dan pengendalian aplikasi yang bertujuan untuk memitigasi/meredam risiko potensi salah saji material.

4. 2. 1 Defisiensi secara Agregat

Berdasarkan data laporan manajemen *assessment* pada tahun 2008, Siklus Pelaporan Keuanganlah yang memiliki tingkat salah saji yang paling material dibandingkan dengan siklus-siklus yang lain. Berikut adalah rekapitulasi secara agregat data-data hasil *management assessment* untuk siklus pelaporan keuangan pada tahun 2008, 2009, dan 2010.

Tabel 4.1 Defisiensi Agregat

AREA DEFISIENSI	RATING AGREGAT		
	2008	2009	2010
<i>Complex accounting/Accuracy of accounting policy and assessment on significant accounting issue</i>	CD	SD	CD
<i>GL maintenance/Accuracy of accounts grouping</i>	CD	CD	CLEAN
<i>Effectiveness of review over closing and consolidation process</i>	SD	SD	CD
<i>Accuracy and Completeness of consolidated financial statement presentation and disclosure</i>	SD	SD	SD
OVERALL	SD	SD	SD

Keterangan:

CD = *Control Deficiency*

SD = *Significant Deficiency*

CLEAN = Tidak Ada Temuan

Sumber: Laporan *Management Assessment* TELKOM 2008, 2009, 2010 (telah diolah)

Keterangan:

2008 (*antara lain terkait dengan dengan akun Pendapatan, Piutang Usaha, Aktiva Tetap, Aktiva dalam Konstruksi/Capital Expenditure*)

Perusahaan belum menjalankan pengendalian yang efektif untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan proses *closing* dan konsolidasi, serta penyajian & pengungkapan (*presentation disclosure*) dalam laporan keuangan, khususnya:

- Terdapat beberapa jurnal penyesuaian yang dikatakan tidak tepat waktu
- Terdapat beberapa transaksi *intercompany* yang belum dieliminasi sepenuhnya
- Terdapat beberapa pengungkapan yang belum disajikan secara lengkap dan akurat baik INDO GAAP maupun US GAAP

2009 (*antara lain terkait dengan akun Piutang Usaha, Beban Penyisihan Piutang Usaha, Beban Usaha*)

Perusahaan belum menjalankan pengendalian yang efektif untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan kebijakan akuntansi dan *assessment* isu akuntansi signifikan, proses *closing* dan konsolidasi, serta penyajian & pengungkapan (*presentation & disclosure*) dalam laporan keuangan, khususnya:

- Terdapat kebijakan akuntansi dan *assessment* pengakuan aset tetap yang belum akurat
- Terdapat beberapa *mapping account* anak perusahaan yang belum akurat
- Terdapat beberapa transaksi *intercompany* yang belum dieliminasi sepenuhnya
- Terdapat beberapa pengungkapan yang belum disajikan secara lengkap dan akurat baik INDO GAAP maupun US GAAP

2010 N/A

Berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh manajemen dan atas pertimbangan auditor eksternal, hasil evaluasi tahun 2008-2010 masih terdapat defisiensi, terutama pada siklus pelaporan keuangan. Secara agregat, defisiensi masih terlihat di beberapa area yang secara terperinci terdapat pada Lampiran 4.1.

1. ***Complex accounting***

Area *complex accounting* membahas mengenai akurasi pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang signifikan berpengaruh pada pelaporan keuangan. Area ini terdapat pada proses H.01.01 Siklus Pelaporan Keuangan. Asersi yang terkait pada area ini adalah *completeness, valuation/allocation, dan presentation & disclosure*. Pada tahun 2008 penilaian defisiensi menunjukkan hasil CD karena kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan jarang terjadi atau memiliki *likelihood: reasonably possible*, tidak terdapat risiko kerugian (*loss*) atau kecurangan (*fraud*) karena hanya masalah klasifikasi yang kurang akurat, ataupun defisiensi pada area ini tidak menyebabkan defisiensi di bagian lain sehingga tidak menyebabkan salah saji yang material. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan defisiensi ke SD karena belum efektifnya pengendalian untuk meyakinkan ketepatan Pedoman Akuntansi. Contoh yang terjadi adalah ketidaksesuaian pedoman yang disusun oleh TELKOM dengan PSAK yang ada, sehingga memiliki kemungkinan adanya peningkatan risiko ketidakakuratan yang material dalam penyajian laporan keuangan. Pada tahun 2010, defisiensi menurun kembali ke CD karena kesalahan yang terjadi pada 2009 tidak terjadi lagi dan hanya karena kesalahan-kesalahan seperti pada tahun 2008.

2. ***GL maintenance***

Area *GL maintenance* membahas mengenai akurasi pengelompokan akun-akun untuk pelaporan keuangan. Area ini terdapat pada proses H.01.02 Siklus Pelaporan Keuangan. Asersi yang terkait pada area ini adalah *presentation & disclosure*. Area ini memang mengindikasikan belum efektifnya pengelompokan akun-akun untuk pelaporan keuangan karena kesalahan

klasifikasi akun, tetapi dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan dilihat dari hasil evaluasi CD pada tahun 2008 dan 2009 dan tidak ada temuan sama sekali pada tahun 2010. Temuan-temuan yang ada adalah seputar kesalahan menggolongkan suatu transaksi ke dalam suatu akun, contohnya Pendapatan Instalasi yang tertera pada laporan keuangan seharusnya dicatat ke dalam Diskon pada Penjualan Voucher atau Pendapatan *Fixed Line* diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Abonemen Bulanan seharusnya sebagai Pendapatan Pemakaian.

3. *Closing & consolidation*

Area *closing & consolidation* membahas mengenai efektifitas proses *closing* dan konsolidasi laporan keuangan. Area ini terdapat pada proses H.01.03, H.01.04, H.01.05, dan H.01.06 Siklus Pelaporan Keuangan. Asersi yang terkait pada area ini adalah *completeness, valuation/allocation, rights & obligations*, dan *presentation & disclosure*. Ada beberapa aktivitas terdefisiensi yang terdapat dalam area ini. Pada tahun 2008, temuan terdapat pada aktivitas *closing* yang tidak secara jelas menetapkan waktu *closing* sehingga berpengaruh pada *subsequent event* di pelaporan keuangan seperti kemungkinan adanya transaksi tahun 2008 yang baru dicatat pada tahun 2009, sehingga temuan ini mendapatkan hasil SD. Temuan lain pada tahun ini berupa belum efektifnya pengendalian internal untuk menyakinkan proses rekonsiliasi transaksi *intercompany*, *review* memo jurnal, dan akurasi terhadap akun-akun dan konsolidasi TB anak perusahaan dengan TB Telkom sehingga berjalan sebagaimana seharusnya. Pada tahun 2009, ditemukan lagi permasalahan terkait akurasi transaksi *intercompany* tetap dengan defisiensi yang mengalami penurunan dari SD menjadi CD karena pada tahun ini masalah hanya terjadi pada penemuan jurnal *intercompany* yang tidak sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi. Akurasi terhadap akun-akun dan konsolidasi antara TB Anak Perusahaan dan TELKOM juga kembali terulang oleh karena itu penilaian tetap SD. Temuan lain berupa akurasi proses eliminasi dengan ditemukannya beberapa transaksi yang belum dieliminasi, di-*offset*, dan direklasifikasi sepenuhnya. Pada tahun 2010, terdapat beberapa

pendalian yang belum efektif dilakukan untuk aktivitas *review checklist* kesiapan *closing*, ketepatan waktu rekonsiliasi *loan*, *review* akurasi dan kelengkapan jurnal eliminasi, serta dalam hal akurasi jurnal penyesuaian. Akan tetapi terjadi perbaikan defisiensi dengan *likelihood* menjadi *reasonably possible* serta tidak terdapat risiko *fraud* karena kesalahan timbul karena *error* sehingga defisiensi tidak menimbulkan salah saji material. Oleh karena itu defisiensi turun pada tahun 2010 menjadi CD dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 yang memperoleh hasil SD.

4. ***Presentation & disclosure***

Area *presentation & disclosure* membahas mengenai akurasi dan kelengkapan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Area ini terdapat pada proses H.01.07, H.01.08, H.01.09, dan H.01.10 pada Siklus Pelaporan Keuangan. Asersi yang terkait pada area ini adalah *presentation & disclosure*. Apabila dilihat secara keseluruhan, area inilah yang paling tidak mengalami penurunan defisiensi pada setiap proses dan temuan dari tahun ke tahun. Jenis temuan memiliki persamaan dari tahun ke tahun walaupun halnya berbeda. Setiap tahun masih terjadi pengendalian yang belum efektif atas akurasi dan kelengkapan Kertas Kerja Pendukung (KKP) *disclosure* dan beberapa kesalahan dalam pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian pada saat rekonsiliasi sesuai dengan standar yang berlaku (PSAK & US GAAP). Masalah KKP yang kurang dipersiapkan terlihat dari pengungkapan komitmen CAPEX yang tidak diungkapkan dengan lengkap dan akurat serta permasalahan pengungkapan akun-akun pada Anak Perusahaan yang menggunakan mata uang asing, pada tahun 2008. Pada tahun 2009 terlihat dari klasifikasi akrual BHO Frekuensi yang tidak akurat dan seharusnya ada sebagai Beban Konsesi, tidak akuratnya dokumen pendukung untuk aset tetap TII yang dilindungi asuransi, serta KKP rekonsiliasi US GAAP yang tidak akurat terkait dengan mengenai *embedded derivative, feasurement* (SFAS 157 dan SFAS 107), *obligation under capital lease*, dan lain-lain. Pada tahun 2010 terlihat dari *usage charges* tahun 2008 yang disajikan sebagai Pendapatan Abonemen Bulanan. Sedangkan masalah

kesalahan dalam pengungkapan laporan keuangan pada saat rekonsiliasi sesuai standar, pada tahun 2008 terlihat dari kesalahan rumus menghitung *present value* sesuai FAS 107, kesalahan mengklasifikasikan *short term investment*, serta adanya *permanent difference* tidak terekonsiliasi yang seharusnya ada pada rekonsiliasi *income tax*. Terdapat pula kebijakan akuntansi signifikan yang tidak diperbaharui seperti PSAK 16 Revisi 2007 dan PSAK 30 Revisi 2007. Pada tahun 2009 terlihat dari defisiensi terkait pengungkapan sesuai aturan PSAK dan US GAAP. Pada tahun 2010 terdapat kesalahan klasifikasi penyajian hutang jangka panjang dan DTA – DTL serta ketidakakuratan penyajian suatu pendapatan yang *overpayment* ke investor di dalam beban operasional yang seharusnya dikapitalisasi sebagai *prepaid contingent rent*. Penilaian SD yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam menentukan hal-hal apa saja yang akan diungkapkan di dalam laporan keuangan membutuhkan *judgement*. Sedangkan *judgement* tersebut masih berpotensi menyebabkan perbedaan persepsi yang selanjutnya masih terdapat risiko ketidaklengkapan dan ketidakakuratan. Defisiensi yang terjadi di sini juga berpotensi menyebabkan defisiensi lainnya di area *presentation & disclosure*.

4. 2. 2 Defisiensi berdasarkan Kerangka COSO

TELKOM menggunakan **COSO *Internal Control Framework*** sebagai kerangka kerja rancangan pengendalian internal yang direkomendasikan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*). COSO digunakan sebagai pedoman yang telah diakui secara umum sebagai *best practice* yang menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Oleh karena itu, dalam menilai defisiensi secara agregat pada poin 4.2.1 perlu digambarkan lebih lanjut dalam kerangka COSO. Sehingga pada saat evaluasi dapat diketahui akar permasalahan mengapa masih ada penilaian defisiensi dan di mana letaknya. Berikut adalah hasil penilaian defisiensi per elemen COSO.

Tabel 4.2 Defisiensi COSO

AREA DEFISIENSI	ELEMEN COSO														
	CE			RA			CA			I&C			M		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
<i>Complex accounting</i>							CD	SD	CD				CD		
<i>GL maintenance</i>								CD					CD		
<i>Closing & Consolidation</i>	SD	CD						SD	CD		CD			CD	
<i>Presentation & Disclosure</i>	SD							SD			SD		SD	SD	SD

Keterangan:

CD = Control Deficiency

SD = Significant Deficiency

CE = Control Environment

RA = Risk Assessment

CA = Control Activities

IC = Information & Communication

M = Monitoring

Sumber: Laporan *Management Assessment* TELKOM 2008, 2009, 2010 (telah diolah)

Berdasarkan masing-masing elemen COSO, analisis yang didapat per area defisiensi adalah sebagai berikut:

1. ***Control Environment***

Control environment atau lingkungan pengendalian merupakan elemen yang menjadi payung bagi elemen-elemen lainnya dalam hal ini menjadi pedoman bagi dijalankannya elemen-elemen selanjutnya. Pada tahun 2008 lingkungan pengendalian pada area *closing & consolidation* serta *presentation & disclosure* masih dianggap belum efektif karena masih adanya penilaian SD di TLC. Lingkungan pengendalian pada tahun 2009 mengalami penurunan defisiensi menjadi CD dan hanya pada area *closing & consolidation* sedangkan untuk area lain sudah tidak ada defisiensi menurut elemen COSO. Begitupula pada tahun 2010, lingkungan pengendalian sudah dapat dijalankan secara efektif.

Dalam pelaksanaannya, lingkungan pengendalian sudah amat disadari di TELKOM. Dimulai dari pengendalian di tingkat entitas, level top manajemen telah menyadari pentingnya pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No. 13/HK000/COP-

D0051000/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan SOX *Section 302 & Section SOX 404* juga Keputusan Direksi No. 29/PS100/CA20/2007 tentang Pedoman Pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG). Berbeda dengan tingkat entitas, lingkungan pengendalian cenderung belum efektif di tingkat transaksional terutama pada area *presentation & disclosure* pada Siklus pelaporan keuangan. Ketidakefektifan dapat dilihat dari kurangnya kesadaran para karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya sehingga temuan-temuan yang berhubungan dengan ketidakakuratan dan ketidaklengkapan banyak muncul. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada subbab analisis.

2. ***Risk Assessment***

Risk assessment atau penilaian risiko merupakan elemen yang menjelaskan bagaimana cara perusahaan menyikapi risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Penilaian risiko TELKOM dalam menyusun laporan keuangannya sudah dinilai efektif pada tahun 2008, 2009, dan 2010 karena tidak terdapat defisiensi baik pada ELC, ITGC, maupun TLC terkait dengan elemen COSO ini.

Risk assessment TELKOM sudah efektif dilakukan karena TELKOM memiliki unit *Risk Assessment* khusus yang telah mampu melakukan indentifikasi risiko apa saja yang berpotensi terjadi pada proses pelaksanaan pengendalian internal berikut pengendaliannya yang signifikan. Unit ini bekerja berdasarkan KD 13/2009 yang dalam pengidentifikasian risikonya mencoba menjawab pertanyaan "*what can go wrong, how and where.*" Pada subbab analisis akan dijelaskan bahwa risiko yang diprediksi bisa terjadi akibat permasalahan *human error*. Akan tetapi pada dasarnya kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi dan menyikapi risiko telah efektif.

3. ***Control Activities***

Control activities atau aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan

perusahaan pada setiap level organisasi. Pada tahun 2008 hanya terdapat satu area yang masih belum dianggap efisien terkait dengan elemen ini, yaitu *complex accounting* dengan hasil penilaian defisiensi CD. Sedangkan pada tahun 2009, terjadi peningkatan defisiensi pada seluruh area defisiensi, yaitu *complex accounting* (SD), *GL maintenance* (CD), *closing & consolidation* (SD), serta *presentation & disclosure* (SD). Pada tahun 2010 terjadi penurunan defisien ke level CD dengan dua area yang tersisa, yaitu *complex accounting* dan *closing & consolidation*.

Berdasarkan analisis menurut Elder, et al. (2008), analisis terhadap aktivitas pengendalian di TELKOM adalah sebagai berikut.

a. *Adequate Separation of Duties*

Pemisahan tugas dalam Siklus pelaporan keuangan sudah memadai. Pembagian tugas penyusun dan *pe-review* sudah jelas tertera pada bisnis proses yang menyebutkan unit penanggung jawab dari masing-masing proses. Seluruh penyusunan pelaporan keuangan dilakukan pada unit yang terpisah dari unit-unit lainnya yang berkepentingan langsung dengan aset perusahaan. Sebagai contoh, walaupun terdapat dalam satu direktorat, akan tetapi fungsinya dipisahkan antara unit *Treasury Management* yang berfungsi sebagai bendahara, dengan unit *Financial Accounting* yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan.

b. *Proper Authorization of Transactions and Activities*

Otorisasi proses penyusunan laporan sudah dilakukan dengan baik, dengan dicantulkannya prosedur tersebut di dalam bisnis proses. Otorisasi dilakukan berlapis, dimulai dari masing-masing uni/Anak Perusahaan, AVP Financial Statement, VP Financial Accounting, hingga CEO dan CFO pada saat laporan akan diserahkan ke Bapepam. Walau begitu, masih terdapat identifikasi risiko yang menyatakan bahwa masih ada kemungkinan tidak diotorisasinya KKP oleh pejabat yang berwenang seperti pada saat proses pembuatan *disclosure* Laporan Keuangan Konsolidasian.

c. *Adequate Documents and Records*

Dokumentasi dan pencatatan yang memadai sangat efektif dilakukan pada masing-masing unit akan tetapi belum sepenuhnya efektif dilakukan dalam rangka efektifitas penyusunan laporan keuangan. Dokumen untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan ada pada satu sistem yaitu SAP. Tetapi pada saat proses konsolidasi dan penyusunan *disclosure* data yang ada pada SAP harus dicocokkan dengan bukti rekapitulasi fisik dari masing-masing unit/Anak Perusahaan. Risiko yang mungkin adalah keterlambatan waktu akibat kesalahan data yang seharusnya diserahkan ke unit Financial Accounting atau akibat masih adanya anak perusahaan yang belum menggunakan SAP juga sehingga membutuhkan waktu untuk menurunkan ke sistem yang sama dengan induk perusahaan.

d. *Physical Control over Assets and Records*

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, data transaksi yang ada di dalam SAP tidak secara otomatis tersusun menjadi suatu laporan keuangan sehingga manajemen harus menurunkannya ke Microsoft Excel untuk dilakukan proses penyusunan manual. Aktivitas pengendalian ini masih terbilang efektif karena *back-up* telah dilakukan walaupun masih perlu adanya pengamanan dari kehilangan.

e. *Independent Checks on Performance*

Fungsi evaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal efektif dilakukan oleh auditor internal. Sesuai *Internal Audit Charter* TELKOM, tugas dan tanggung jawab auditor internal di antaranya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan dan akuntansi serta melakukan *review* dan/atau audit atas laporan keuangan perusahaan secara periodik.

4. *Information & Communication*

Information & communication atau informasi & komunikasi berupa elemen yang berfungsi dalam pemberian informasi yang diperlukan untuk *stakeholders* dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian operasi

perusahaan, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan regulasi. Secara keseluruhan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 pengendalian pada elemen informasi dan komunikasi ini sudah terbilang efektif, kecuali pada tahun 2009 untuk area *closing & consolidation* serta *presentation & disclosure* yang mendapatkan penilaian CD dan SD masing-masingnya.

TELKOM cukup efektif dalam rangka mengungkapkan informasi perusahaan ke Publik. Hal tersebut memang mutlak harus dimiliki oleh TELKOM mengingat TELKOM adalah perusahaan publik baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Oleh karena itu, TELKOM wajib memberikan informasi yang memadai bagi investor. Perwujudannya adalah dengan dibuatnya suatu fungsi internal yang bernama Unit Hubungan Investor (*Investor Relationship Unit*). Tapi dalam prosesnya TELKOM mengalami kesulitan karena proses penyusunan informasi tersebut masih dilakukan secara manual dan rentan akan salah saji material.

5. **Monitoring**

Monitoring merupakan proses penilaian dan pemantauan terhadap seluruh fungsi dan pelaksanaan pengendalian internal pada setiap level organisasi termasuk di dalamnya fungsi internal audit untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2008 defisiensi di TLC yang terjadi pada siklus pelaporan keuangan adalah CD pada area *complex accounting*, CD pada area *GL maintenance*, serta SD pada area *presentation & disclosure*. Pada tahun 2009 efektifitas sudah mulai terlihat kecuali pada area *closing & consolidation* yang defisiensinya ada pada tingkat CD. Sedangkan area *presentation & disclosure* tetap pada level SD. Begitu pula pada tahun 2010, area *presentation & disclosure* masih mengalami defisiensi tetap pada level SD.

TELKOM memang sudah mampu mengidentifikasi risiko apa saja yang berpotensi muncul. Akan tetapi monitoring pada ICOFR TELKOM masih sangat perlu untuk ditingkatkan karena akan sangat disayangkan apabila

risiko yang sudah teridentifikasi sejak awal harus terjadi dan membuat suatu temuan bagi auditor eksternal. Pengendalian yang dirancang sebagian besar mengacu pada *review* dokumen terkait proses. Kegiatan ini juga sudah dilakukan dengan adanya paraf/tanda tangan pada setiap KKP. Akan tetapi hal yang belum secara jelas dapat diketahui adalah **kompetensi** dan **objektivitas** *reviewer/reviewer* dari pengendalian internal itu sendiri. Ketika prosedur pengendalian sudah dijalankan akan tetapi masih banyak temuan seputar akurasi dan kelengkapan seperti yang sedang dialami TELKOM ini, hal pertama yang seharusnya dipertanyakan adalah kompetensi dari *reviewer*. Sebagai contoh, sambil *me-review*, *reviewer* seharusnya juga ikut berpikir kesesuaian antara saldo suatu akun dengan materialitas akun yang bersangkutan, dan hal ini membutuhkan kompetensi akuntansi yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan ini sebaiknya perusahaan mengembangkan proses monitoring yang penilaian defisiensi pada 3 tahun terakhir ini masih menunjukkan *significant deficiency*, dengan meningkatkan supervisi dari pihak manajemen yang ada di tingkat yang lebih senior juga peningkatan kompetensi objektivitas pelaksana *review* dalam meninjau ulang dokumen-dokumen sehingga kesalahan yang timbul dapat diminimalisir sebelum Laporan Keuangan Konsolidasian diaudit secara imparial oleh auditor eksternal. Berdasarkan COSO *Guidance Monitoring Internal Control System*, “*Monitoring ensures that internal control continues to operate effectively. This process involves assessment by appropriate personnel of the design and operation of controls on a suitably timely basis, and the taking of necessary actions. It applies to all activities within an organization, and sometimes to outside contractors as well,*” yang berarti dengan adanya proses *monitoring* membantu untuk mewujudkan keberlanjutan pengendalian internal, tentunya dengan *reviewer* yang kompeten dan objektif.

Berikut matriks yang menunjukkan rekapitulasi temuan audit berdasarkan masing-masing elemen COSO yang belum efektif diterapkan dihubungkan

dengan *key control* pada proses terdapatnya temuan tersebut pada tahun 2008, 2009, dan 2010.

Tabel 4.3 Matriks *Key Control* – COSO Tahun 2008

NO	ID PROSES	ID KEY CONTROL	ELEMEN COSO				
			CE	RA	CA	IC	M
1	H.01.01	C2					<input type="checkbox"/>
2		C3					<input type="checkbox"/>
3		C5			<input type="checkbox"/>		
4		C6			<input type="checkbox"/>		
5		C11			<input type="checkbox"/>		
6		C12			<input type="checkbox"/>		
7		C13			<input type="checkbox"/>		
8		C14			<input type="checkbox"/>		
9		C15			<input type="checkbox"/>		
10	H.01.02	C1					<input type="checkbox"/>
11	H.01.03	C6	<input type="checkbox"/>				
12		C7	<input type="checkbox"/>				
13	H.01.04	C15	<input type="checkbox"/>				
14	H.01.05	C1					<input type="checkbox"/>
15		C10	<input type="checkbox"/>				
16		C14					<input type="checkbox"/>
17	H.01.07	C2					<input type="checkbox"/>
18		C3					<input type="checkbox"/>
19	H.01.08	C5	<input type="checkbox"/>				
20		C6	<input type="checkbox"/>				
21		C7	<input type="checkbox"/>				
22	H.01.09	C2	<input type="checkbox"/>				
23		C3	<input type="checkbox"/>				
24		C5	<input type="checkbox"/>				
25		C7	<input type="checkbox"/>				
TOTAL PER ELEMEN COSO			11		7		7

Sumber: Laporan *Management Assessment* TELKOM tahun 2008 (telah diolah)

Tabel 4.4 Matriks *Key Control* – COSO Tahun 2009

NO	ID PROSES	ID KEY CONTROL	ELEMEN COSO				
			CE	RA	CA	IC	M
1	H.01.01	C2			<input type="checkbox"/>		
2		C6			<input type="checkbox"/>		
3	H.01.02	C1			<input type="checkbox"/>		
4	H.01.03	C6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	H.01.04	C15			<input type="checkbox"/>		
6	H.01.05	C1			<input type="checkbox"/>		
7		C13			<input type="checkbox"/>		
8	H.01.08	C3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		C5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		C6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		C7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	H.01.09	C2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		C5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL PER ELEMEN COSO			1		13	7	7

Sumber: Laporan *Management Assessment* TELKOM tahun 2009 (telah diolah)

Tabel 4.5 Matriks *Key Control* – COSO Tahun 2010

NO	ID PROSES	ID KEY CONTROL	ELEMEN COSO				
			CE	RA	CA	IC	M
1	H.01.01	C5			□		
2		C7			□		
3	H.01.03	C6			□		
4		C14			□		
5	H.01.05	C7			□		
6	H.01.06	C1			□		
7	H.01.07	C2					□
8	H.01.08	C3					□
9		C5					□
10		C6					□
11	H.01.09	C2					□
12		C5					□
TOTAL PER ELEMEN COSO					6		6

Sumber: Laporan *Management Assessment* TELKOM tahun 2010 (telah diolah)

Matriks di atas sekaligus menunjukkan pada *key control* mana pengendalian belum secara efektif dilakukan. Dapat dilihat jumlah *key control* tempat terdapat temuan sudah berkurang tiap tahunnya. Akan tetapi ketika dilakukan pemusatan perhatian pada jumlah *key control* di masing-masing elemen COSO, terdapat 2 elemen yang setiap tahunnya masih mendominasi secara signifikan, yaitu elemen aktivitas pengendalian dan elemen pemantauan/monitoring. Elemen-elemen lainnya telah mengalami penurunan, seperti elemen lingkungan pengendalian pada tahun 2008. Ketidakefektifan elemen ini hanya terlihat pada satu *key control* saja pada tahun 2009 setelah mendominasi temuan pada 13 *key control* di tahun 2008. Begitu pula dengan elemen informasi dan komunikasi pada tahun 2009 ke 2010.

Terdapat kesesuaian antara matriks-matriks di atas dengan hasil *assessment* defisiensi per area berdasarkan kerangka COSO pada Tabel 4.2. Elemen aktivitas pengendalian sangat tidak efektif pada tahun 2009 akan tetapi dilihat dari perjalanan waktu, elemen ini mampu diturunkan ketidakefektifannya dan dilihat pula per area, masing-masing pun mengalami penurunan defisiensi dari SD ke CD sampai dengan akhir tahun 2010. Sedangkan elemen pemantauan/monitoring selalu tidak efektif dari tahun ke tahun dan baik dilihat dari perjalanan waktu maupun hasil defisiensi per areanya tidak mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2010.

Analisis akan pelaksanaan aktivitas pengendalian dan pemantauan/monitoring telah dilakukan pada masing-masing elemen COSO di atas. Sedangkan analisis akan dilanjutkan dengan melakukan pemantauan terhadap area *presentation & disclosure* Siklus Pelaporan Keuangan karena analisis COSO menunjukkan efektivitas yang belum optimal pada area ini serta hasil defisiensi selalu menunjukkan *significant deficiency* dari tahun ke tahun dan pada elemen-elemen COSO yang ada.

4.3 Area Presentation & Disclosure

Area *presentation & disclosure* terdiri dari 4 proses, yaitu Proses H.01.07, H.01.08, H.01.09, dan H.01.10. Tetapi hanya 3 proses awal yang memiliki pengendalian yang signifikan. Berikut adalah perincian pengendalian-pengendalian yang signifikan pada tiap subproses yang terdapat pada proses-proses yang memuat area *presentation & disclosure* (*key control* dan struktur *flowchart* dapat dilihat pada masing-masing Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3).

Tabel 4.6 Key Control Area Presentation & Disclosure

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
H.01.07 Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)	C1	Mereview draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta memberikan paraf	SO Financial Statement Presentation
	C2	Mereview Akurasi dan kelengkapan draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta menandatangani short form dan KKP/checklist	AVP Financial Statement
H.01.08 Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan	C3	Mereview hasil pengisian data/informasi dan dokumen pendukungnya serta menandatangani dan mengirimkannya kepada AVP Financial Statement	AVP, SM Unit/Divisi Terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Unit Terkait1)
	C5	Memverifikasi disclosure dibandingkan dengan dokumen pendukung serta memarafnya	SO Financial Statement Disclosure dan atau Tim yang ditunjuk

	C6	Mereview Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dibandingkan dengan jurnal rekonsiliasi US GAAP dan checklist serta mereview Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan dengan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dan memberikan paraf	SO Financial Statement Reconciliation GAAP
	C7	Mereview kelengkapan dan kepatuhan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan standar dan atau peraturan yang berlaku serta memberikan paraf	AVP Financial Statement
H.01.09 Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam)	C2	Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan checklist Bapepam, standar format pelaporan, dan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta menandatangani	AVP Financial Statement
	C4	Mereview Draft Final Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian - Hasil Revisi, serta menandatangani setelah direview dan diparaf AVP Financial Statement	VP Financial Accounting
	C5	Mereview Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian serta menandatangani setelah AVP Financial Statement memverifikasi dengan membandingkan Hasil Pembahasan/Revisi External Auditor dan memarafnya	VP Financial Accounting

Sumber: Direktorat *Compliance & Risk Management* TELKOM

Tidak semua pengendalian diaudit oleh eksternal auditor melainkan hanya *key controls* yang tertera pada tabel di atas.

4.3.1 Proses H.01.07: Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (*Basic Financial Statement*)

Pada proses H.01.07 terjadi proses penyusunan laporan pokok yang biasa disebut dengan *short form* pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan pokok terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Proses dimulai dengan menerima informasi bahwa konsolidasi (proses sebelumnya) telah selesai dilakukan. Lalu Bagian AVP Financial Statement mengunduh TB dari SAP ke Microsoft Excel, yang kemudian dilakukan penyusunan draft *short form* termasuk melakukan konversi mata uang apabila dibutuhkan. Risiko yang mungkin ada pada bagian ini adalah adanya ketidaklengkapan dan ketidakakuratan pada draft *short form* dan hasil konversi mata uang. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan review pada draft *short form* dan memberikan paraf. Proses selanjutnya adalah melakukan proses pengecekan akurasi dan kelengkapan draft *short form*, termasuk akurasi kurs dan perhitungan konversi mata uang serta menuangkan hasilnya dalam KKP/*checklist*. Potensi risiko ada pada kemungkinan draft *short form* tidak lengkap dan tidak akurat serta tidak sesuai dengan standar Dan kebijakan yang berlaku. Pengendalian yang dilakukan adalah mereview akurasi dan kelengkapan draft *short form* serta menandatangani serta *checklist*-nya. Kedua pengendalian ini dianggap signifikan untuk dijadikan sebagai *key control*.

4.3.2 Proses H.01.08: Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)

Proses selanjutnya yang berhubungan dengan area *presentation & disclosure* adalah proses H.01.08. Proses ini berisi penjelasan akan penyusunan catatan atas laporan keuangan (*disclosure*). Dimulai dengan rekonsiliasi perbedaan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap US GAAP, menyiapkan template pengisian data (lampiran 4.4), lalu membuat nota dinas yang ditujukan kepada divisi-divisi yang berkepentingan untuk dimintai informasinya terkait *disclosure*. Kemudian proses selanjutnya adalah pengumpulan data kembali ke AVP Financial Statement. Terdapat pengendalian utama pada proses ini yaitu review terhadap KKP oleh divisi terkait sebelum dikembalikan kepada AVP Financial Statement untuk menghindari risiko data yang tertuang tidak diotorisasi oleh pejabat berwenang. Selanjutnya adalah menerima dokumen, melakukan pemeriksaan ulang, dan melakukan *follow up* pada divisi yang belum mengumpulkan.

4.3.3 Proses H.01.09: Penyusunan Laporan Keuangan TELKOM ke Bapepam-LK

Proses H.01.09 dimulai dengan menggabungkan data *short form* dan disclosure dari proses-proses sebelumnya dan melakukan *update* apabila ada revisi. Draft ini kemudian di-*review* oleh AVP Financial Statement berdasarkan *checklist* Bapepam, standar format pelaporan, dan “*Disclosure objective review*” (*Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance*) serta menandatnganinya. Proses selanjutnya adalah *review* ulang draft tersebut oleh Komite *disclosure*. Kedua jenis *draft*, baik triwulanan maupun tahunan kemudian diserahkan kepada auditor eksternal untuk dilakukan proses pengauditan. Apabila ada revisi/koreksi dari auditor segera didiskusikan dengan auditee, yaitu pihak manajemen TELKOM dan segera dilakukan perbaikan. Terdapat potensi risiko dan prosedur ini yaitu masih adanya bagian yang tidak ter-*update* dan hasil revisi tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak divalidasi oleh pejabat yang berwenang. Pengendalian signifikan yang perlu dilakukan adalah verifikasi perbandingan revisi auditor eksternal dengan dokumen revisi. Apabila sudah tidak ada lagi yang diperlu diperbaiki, laporan keuangan dibawa ke CEO dan CFO untuk dilakukan proses *approval* kemudian siap untuk *submit* ke Bapepam dan US SEC.

4.4 Analisis

Berdasarkan perumusan masalah, analisis dilakukan terhadap dua hal, yaitu berdasarkan kerangka COSO dan berdasarkan peninjauan risiko dan *key control* dengan pelaksanaan di lapangan sehingga dapat diketahui penyebab dari adanya defisiensi. Sebelumnya analisis telah dilakukan kepada masing-masing elemen COSO dengan melihat kesinambungan hasil laporan manajemen dengan penerapan di lapangan sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa elemen *monitoring* masih harus diperbaiki efektivitasnya. Selanjutnya analisis akan dilakukan dengan meninjau efektivitas pengendalian yang dibandingkan dengan implementasi di lapangan. Hal ini juga sekaligus dapat menunjukkan keterkaitannya dengan hasil analisis COSO yang telah didapat kesimpulannya.

Berikut adalah rekapitulasi per tahun yang menunjukkan letak temuan auditor eksternal pada subproses di bisnis proses dilihat dari pengendalian umum/*key controls*.

**Tabel 4.7 Intensitas Temuan pada *Key Control*
Area *Presentation & Disclosure***

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	2008	2009	2010
H.01.07.01 Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)	C2	Mereview Akurasi dan kelengkapan draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta menandatangani short form dan KKP/checklist	AVP Financial Statement	□		□
H.01.08.01 Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages)	C3	Mereview hasil pengisian data/informasi dan dokumen pendukungnya serta menandatangani dan mengirimkannya kepada AVP Financial Statement	AVP, SM Unit/Divisi Terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Unit Terkait1)		□	□
	C5	Memverifikasi <i>disclosure</i> dibandingkan dengan dokumen pendukung serta memarafnya	SO Financial Statement Disclosure dan atau Tim yang ditunjuk	□	□	□
H.01.08.02 Rekonsiliasi USGAAP dan Indonesian GAAP	C6	Mereview Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dibandingkan dengan jurnal rekonsiliasi US GAAP dan checklist serta mereview Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan dengan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dan memberikan paraf	SO Financial Statement Reconciliation GAAP	□	□	□
	C7	Mereview kelengkapan dan kepatuhan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan	AVP Financial Statement	□	□	

		standar dan atau peraturan yang berlaku serta memberikan paraf				
H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam)	C2	Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan checklist Bapepam, standar format pelaporan, dan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta menanda-tanganinya	AVP Financial Statement	□	□	□
	C5	Mereview Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian serta menanda-tanganinya setelah AVP Financial Statement memverifikasi dengan membandingkan Hasil Pembahasan/ Revisi External Auditor dan memarafnya	VP Financial Accounting	□	□	□

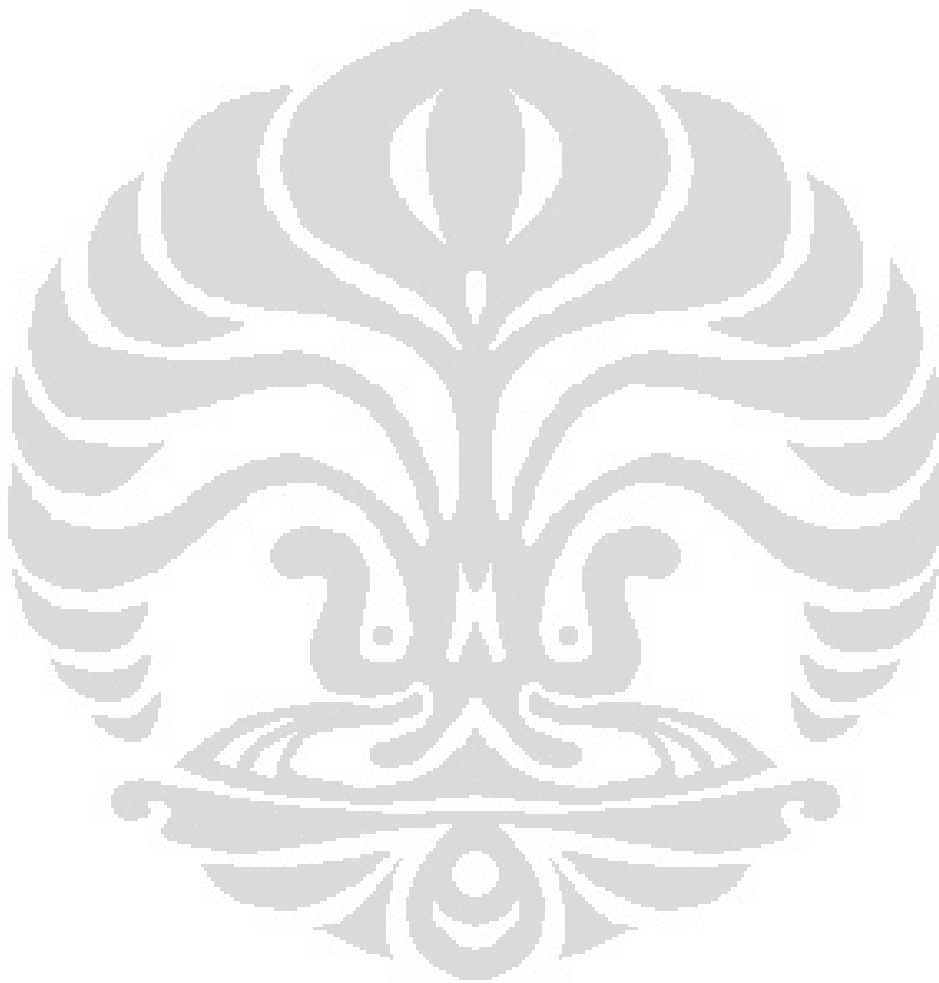
Sumber: Direktorat *Compliance & Risk Management* TELKOM (telah diolah)

Temuan-temuan ini berdasarkan hasil *intergrated audit* yang dilakukan oleh auditor eksternal TELKOM, yaitu PricewaterhouseCoopers, yang didapatkan sampai dengan akhir periode akuntansi, dalam kasus ini yaitu periode 31 Desember 2008, 31 Desember 2009, dan 31 Desember 2010. Temuan-temuan ini diperbaiki oleh TELKOM sebelum laporan keuangan di dalam laporan tahunan diberikan. Walaupun banyak terdapat temuan-temuan yang menyebabkan defisiensi pada hasil evaluasi ICOFR TELKOM, laporan keuangan tetap diterima oleh SEC karena PWC sebagai auditor eksternal telah memberikan sertifikasi atas laporan keuangan TELKOM yang menjamin kewajarannya.

Jika dipantau secara terperinci, temuan-temuan terlihat lebih banyak mengacu pada ketidaklengkapan dan ketidakakuratan atas dokumen-dokumen yang seharusnya dibutuhkan. Hal yang ditemukan berbeda dari tahun ke tahun, akan tetapi jenisnya sama, seputar ketidaklengkapan dan ketidakakuratan baik

short form, KKP, maupun kesesuaian antara pedoman yang telah dibuat oleh TELKOM dengan standar yang dipakai, dalam hal ini US GAAP, berupa kesalahan pengklasifikasian akun. Oleh karena itu, auditor eksternal memberikan penilaian SD setiap tahunnya dinilai dari materialitas salah saji.

Analisis didapat dari hasil wawancara dengan dan didukung oleh data-data terkait dari AVP Financial Statement pada Unit Financial Accounting, Direktorat Keuangan TELKOM sebagai berikut.



Tabel 4.8 Perbandingan Risiko & Pengendalian dengan Tinjauan Lapangan

NAMA SUBPROSES	RISIKO	KEY CONTROL YANG TERDAPAT TEMUAN	HASIL TEMUAN	PELAKSANAAN	
H.01.07.01 Penyusunan Laporan Pokok (<i>Basic Financial Statement</i>)	R2	Hasil konversi laporan keuangan dari IDR ke USD tidak Akurat	C2 Mereview Akurasi dan kelengkapan draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta menandatangani short form dan KKP/ <i>checklist</i>	Pengendalian untuk memastikan akurasi laporan pokok (laporan arus kas) belum efektif dilakukan, terkait akurasi penulisan nominal akun dan grouping akun yang kurang tepat	Penandatanganan <i>review draft short form</i> telah dilakukan akan tetapi potensi risiko salah saji masih terjadi karena hasil review pun masih menunjukkan kesalahan. PIC dan Reviewer hanya dilakukan oleh satu orang untuk masing-masing 4 elemen laporan pokok. Selain data yang didapat dari Siklus Perbendaharaan untuk kurs mata uang, data lain juga didapat dari Proses Konsolidasi Siklus Pelaporan Keuangan yang proses <i>offsetting</i> , eliminasi, dan reklasifikasinya masih dilakukan secara manual,
	R3	Draft laporan keuangan konsolidasian (<i>short form</i>) tidak lengkap dan atau tidak akurat dan tidak sesuai standar dan atau kebijakan yang berlaku			
H.01.08.01 Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (<i>F Pages</i>)	R3	Data/informasi yang tertuang dalam KKP dan/atau template tidak lengkap dan/atau tidak akurat dan/atau tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang	C3 Mereview hasil pengisian data/informasi dan dokumen pendukungnya serta menandatangani dan mengirimkannya kepada AVP Financial Statement	Pengendalian untuk memastikan akurasi dan kelengkapan KKP disclosure belum efektif dilakukan (contoh: <i>Usage Charge</i> disajikan sebagai Pendapatan Abonemen Bulanan dan kesalahan penyajian lainnya)	Penandatanganan review draft short form telah dilakukan akan tetapi potensi risiko salah saji masih terjadi karena hasil review pun masih menunjukkan kesalahan. Proses ini memiliki kendala dalam hal manajemen waktu. Proses-proses sebelum H.01.08 (Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan) seperti H.01.04 (Closing) dan H.01.06 (Konsolidasi) memakan waktu cukup lama dalam pelaksanaannya yang memiliki kemungkinan mengalami keterlambatan. Keterlambatan bukan hanya terjadi pada saat pelaksanaan proses itu sendiri, tetapi juga keterlambatan pada saat penyerahan KKP dari unit terkait/Anak Perusahaan ke AVP Financial Statement dan pengulangan-pengulangan <i>review</i> . Dengan batas waktu yang tetap sebelum Laporan Keuangan Konsolidasian diserahkan ke Bapepam, H.01.08 harus memanfaatkan sisa waktu untuk melakukan hal-hal yang dilaksanakan secara manual seperti mencocokkan apa yang tercantum di KKP dengan apa
	R5	Disclosure tidak sesuai dengan dokumen pendukung			

H.01.08.02 Rekonsiliasi USGAAP dan Indonesian GAAP	R6	Penyusunan KKP rekonsiliasi USGAAP tidak akurat dan tidak lengkap	C6	Mereview Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dibandingkan dengan jurnal rekonsiliasi US GAPP dan checklist serta mereview Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan dengan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dan memberikan paraf	<p>Pengendalian untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi belum efektif dilakukan (Contoh: Kesalahan pengklasifikasian Hutang Jangka Panjang yang seharusnya merupakan porsi Jangka Pendek, kesalahan klasifikasi DTA ke DTL, pedoman akuntansi yang tidak sesuai dengan PSAK, ketidakakuratan penyajian pendapatan sesuai US GAAP, dan lain-lain).</p> <p>yang ada pada Microsoft Excel hasil turunan dari SAP mengingat sistem yang dilakukan masih semi-manual¹. Seperti yang dapat dilihat pada proses H.01.08, keterlambatan ini bisa disebabkan karena kesalahan suatu unit terkait atau Anak Perusahaan untuk memberikan data yang seharusnya dibutuhkan. Manajemen waktu pada proses penyusunan catatan atas laporan keuangan didukung oleh kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan penyusunannya. Person In Charge dan Reviewer yang menjadi penanggung jawab atas pembuatan disclosure atas pelaporan keuangan hanya dikerjakan oleh satu orang untuk masing-masing note. Masing-masing dari mereka pun memiliki lebih dari satu note untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. (Tabel Perbandingan PIC tahun 2008, 2009, dan 2010 dapat dilihat pada lampiran 4.5). Hal-hal seperti ini menyebabkan review pada akhirnya dilakukan seadanya dan pada akhir tahun buku masih ada temuan-temuan dari eksternal auditor atas Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.</p>
	R7	Jurnal Rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan akurat			
	R8	Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan atau tidak akurat			
	R9	Laporan Neraca & R/L versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku	C7	Mereview kelengkapan dan kepatuhan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan standar dan atau peraturan yang berlaku serta memberikan paraf	

¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem yang masih manual, dapat dilihat pada halaman 93-95.

H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan (Baepem)	R5	Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian dan Disclosurenya tidak sesuai dengan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance)	C2	Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan checklist Baepem, standar format pelaporan, dan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta menanda-tanganinya	Selain karena permasalahan di atas, terdapat pula beberapa ketidaksepahaman standar yang berlaku antara pihak manajemen dengan pihak auditor eksternal mengenai pedoman yang telah disusun oleh TELKOM berdasarkan pertimbangan industri, lingkungan bisnis, peraturan pemerintah, dan standar-standar akuntansi yang ada (PSAK & US GAAP). Akan tetapi terkadang auditor eksternal melebih-lebihkan kenyataan yang ada dengan menggabungkan akun yang dianggap sejenis sehingga jumlah menjadi material. Bagi pihak auditor eksternal, TELKOM lah yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
	R7	Hasil revisi Laporan Keuangan Konsolidasian tidak lengkap dan atau tidak akurat dan atau tidak divalidasi oleh pejabat yang berwenang	C5	Mereview Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian serta menanda-tanganinya setelah AVP Financial Statement memverifikasi dengan membandingkan Hasil Pembahasan/ Revisi External Auditor	
	R8	Laporan Keuangan Konsolidasian tidak up date			

Sumber: Direktorat *Compliance & Risk Management* TELKOM dan Hasil Wawancara dengan Unit *Financial Accounting*

- ¹ Sistem yang diterapkan sekarang berupa hasil transaksi yang diinput melalui SAP. SAP sudah digunakan cukup lama di TELKOM sejak tahun 1995. SAP dianggap sangat memadai untuk memperoleh informasi keuangan di TELKOM yang ada di seluruh Indonesia. Data-data *masterfile* terkait transaksi sudah secara *online* terhubung dari cabang yang paling pelosok sampai dengan tingkat pusat. Sehingga pusat akan secara otomatis menerima data-data transaksi dari cabang. Terkadang ada hambatan sistem, seperti jaringan terputus, tetapi tidak sering terjadi. Hambatan juga terjadi ketika tidak seluruh anak perusahaan TELKOM menggunakan SAP. Sebagai contoh, TELKOMSEL, sebagai anak perusahaan terbesar TELKOM, sistem yang digunakan adalah ORACLE. Sehingga ketika akan melakukan proses konsolidasi dan selanjutnya, data-data dari ORACLE harus ditransfer ke sistem SAP satu per satu.

Selanjutnya, SAP akan mengelompokkan akun-akun sesuai dengan pos-posnya (contoh: akun kas dan setara kas, akun piutang, akun hutang, dan seterusnya). Namun SAP juga memiliki keterbatasan sehingga manajemen tidak mampu mengendalikan SAP untuk mengelompokkan akun-akun sesuai dengan yang manajemen inginkan. Sebagai contoh, pada pos kas dan setara kas. Pihak manajemen harus mencantumkan akun-akun bank ke dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti “Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa-IDR,” “Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa-Mata Uang Asing,” “Pihak yang Ketiga-IDR,” “Pihak Ketiga-Mata Uang Asing,” dan lain-lain. Sehingga hal yang terjadi adalah manajemen harus menerjemahkan data SAP ke Microsoft Excel, kemudian akun yang berjumlah ratusan tersebut harus dikelompokkan secara manual satu per satu oleh petugas yang berwenang (diilustrasikan pada Gambar 4.2). Sehingga untuk sistem yang masih berlaku sekarang, *back-up* data laporan keuangan di berbagai *storage* penting dilakukan untuk menghindari kehilangan data akibat virus. Sistem otorisasi khusus seperti *password* di setiap media penyimpanannya (komputer/laptop/hardisk) juga harus digunakan karena data penyusunan

laporan keuangan hanya berupa data Microsoft Excel yang tidak ada otorisasi khusus untuk masuk ke dalamnya sehingga rentan terhadap risiko pencurian.

Proses tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi berlanjut dengan review KKP oleh petugas yang sama dan *reviewer* lain. Kesalahan input data dan pengelompokan data rentan terjadi sehingga menimbulkan temuan di akhir tahun buku. Pos kas dan setara kas ini adalah pos yang paling rentan terjadi kesalahan karena banyaknya akun yang terkandung di dalamnya.

Kas dan Setera kas		4. KAS DAN SETARA KAS		2010	2009
10101001	10101001 Kas Besar IDR	Kas		4.213	6.730
10102001	10102001 Imprest Fund	Bank			
10102051	10102051 Imprest Fund	Phak yang mempunyai hubungan istimewa			
	Cash on hand	Rupiah			
10201001	10201001 BNI IDR	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	439.348	200.611	
	BNI - Rupiah	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	196.680	146.575	
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	6.405	15.096	
		PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	999	46	
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	450	5.581	
		PT Bank Pos Nusantara	-	7	
10202001	10202001 BNI USD		645.882	367.916	
10202007	10202007 BNI SGD	Mata uang asing			
	BNI - Valas	Bank Mandiri	169.132	81.131	
		BNI	57.005	35.942	
		BRI	891	377	
		BSM	165	242	
10203001	10203001 Mandiri IDR		227.193	117.692	
10230001	10230001 BANK Syariah Mandiri-IDR	Sub-jumlah	873.075	485.608	
	Mandiri - Rupiah				
10204001	10204001 Mandiri USD	Phak ketiga			
10204011	10204011 Mandiri JPY	Rupiah			
10204051	10204051 Mandiri EUR	ABN AMRO Bank ("AAB")	99.287	97.176	
	Mandiri - Valas	Deutsche Bank AG ("DB")	27.556	14.858	
		PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")	21.245	136	
		PT Bank Ekonomi Rakyat ("Bank Ekonomi")	15.018	29.940	
		PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	12.076	8.196	
		PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank GIMB Niaga")	8.369	5.570	
		PT Bank Permata Tbk	7.753	321	
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	2.607	1.004	
		PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	2.529	3.830	
		PT Bank Perkreditan Rakyat Karyasatika Sadaya	1.326	560	
		PT Bank ICB Bumiputera Tbk ("Bank Bumiputera")	1.169	776	
		Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	2.272	2.030	
			201.207	164.397	
10210061	10210061 CITIBANK IDR	Mata uang asing			
	Citibank - Rupiah	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	38.490	19.980	
		Bank Ekonomi	17.035	5.789	
		DB	8.758	10.265	
		Citibank, N.A. ("Citibank")	8.513	8.874	
		Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	2.369	1.313	
10211001	10211001 CITIBANK USD		75.165	46.221	
	Citibank - Valas	Sub-jumlah	276.372	210.618	
10212001	10212001 BUKOPIN IDR	Jumlah bank	1.149.447	696.226	

Gambar 4.2 Rekapitulasi Consolidated Trial Balance (Microsoft Excel) menjadi Catatan atas Laporan Keuangan pada Akun "Kas dan Setara Kas"

Sumber: Consolidated Trial Balance Unit FA & Laporan Keuangan TELKOM

Banyak bank yang terlibat dengan TELKOM dikarenakan setiap daerah memiliki banyak ragam bank yang dijadikan bank operasional dari cabang-cabang daerah masing-masing (contoh: BPD Papua, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan lain-lain) yang memiliki kebijakannya masing-masing. Akan tetapi nantinya tetap akan secara otomatis/autodebit ke bank operasional TELKOM. Bank operasional TELKOM adalah bank-bank yang telah diberi

kepercayaan oleh TELKOM untuk menyimpan hasil operasional. Bank operasional TELKOM adalah Bank Mandiri dan Bank BNI. TELKOM sebaiknya melakukan simplifikasi akun-akun terutama jumlah bank yang digunakan. Jalur transaksi yang terlebih dahulu harus melewati bank daerah, sebaiknya dipersingkat langsung ke bank operasional.

TELKOM sebaiknya meninjau ulang sampai sejauh mana perusahaan mengoptimalkan SAP, karena sampai saat ini SAP hanya berguna di TELKOM mulai dari proses *billing* hingga penciptaan *trial balance unconsolidated* saja. Sedangkan ketidakefektifan banyak disebabkan oleh masalah keakuratan dan kelengkapan mulai proses konsolidasi hingga akhir yang sekarang ini masih menggunakan proses manual. Sebagai contoh, ketika *disclosure* membahas mengenai transaksi *inter company* yang dilakukan antara TELKOM dengan Anak Perusahaan. Terdapat proses konsolidasi di antaranya yang dalam prosesnya akan membandingkan antara data yang dimiliki oleh TELKOM dengan data dari laporan keuangan Anak Perusahaan. Perbandingan tersebut harus menunjukkan suatu hubungan yang ekuivalen. Perbandingan dapat saja menunjukkan hasil yang salah mengingat sistem TELKOM dengan anak perusahaan tidak sama. Terdapat “akun resiprokal” yang memungkinkan adanya kesulitan dalam rekonsiliasi akun untuk konsolidasi karena terdapat lebih dari satu cabang akun untuk dieliminasi. Ribuan transaksi harus dikonsolidasi dari laporan keuangan Anak Perusahaan ke TELKOM. Contoh ini melibatkan kendala di dua proses sekaligus yaitu proses konsolidasi dan penyusunan catatan atas laporan keuangan.

ANAK PERUSAHAAN		TELKOM	
Piutang	xx	Beban A	xx
Pendapatan	xx	Beban B	xx
		Beban C	xx
		Hutang	xx

Gambar 4.3 Reciprocal Account

Pada dasarnya prosedur pengendalian, seperti penandatanganan review *draft short form* dan dokumen lainnya, telah dilakukan sesuai dengan yang tertera pada bisnis proses. Akan tetapi potensi risiko salah saji masih terjadi karena hasil review pun masih menunjukkan kesalahan. PIC dan *Reviewer* hanya dilakukan oleh satu orang untuk masing-masing 4 elemen laporan pokok. Proses ini memiliki kendala dalam hal manajemen waktu. Keterlambatan yang terjadi salah satunya disebabkan karena kesalahan suatu unit terkait atau Anak Perusahaan untuk memberikan data yang seharusnya dibutuhkan. TELKOM sebaiknya mengembangkan suatu sistem yang meminimalisir proses yang melibatkan tenaga manusia secara langsung, terutama pada proses konsolidasi, karena rentan terhadap *human error* dan risiko terlewat. Sistem juga sebaiknya dibuat tersentralisasi antara TELKOM dengan Anak Perusahaan agar proses konsolidasi tidak memakan waktu lama sehingga ketepatan waktu tetap terjaga. Dengan sistem yang tersentralisasi, *review* juga dapat diberikan secara *online* dengan masing-masing pejabat berwenang memiliki *password* masing-masing, sehingga akses hanya dapat dilakukan oleh pihak yang benar-benar berwenang. Hal ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai referensi *performance evaluation* apakah masing-masing karyawan menjalankan tugasnya atau tidak.

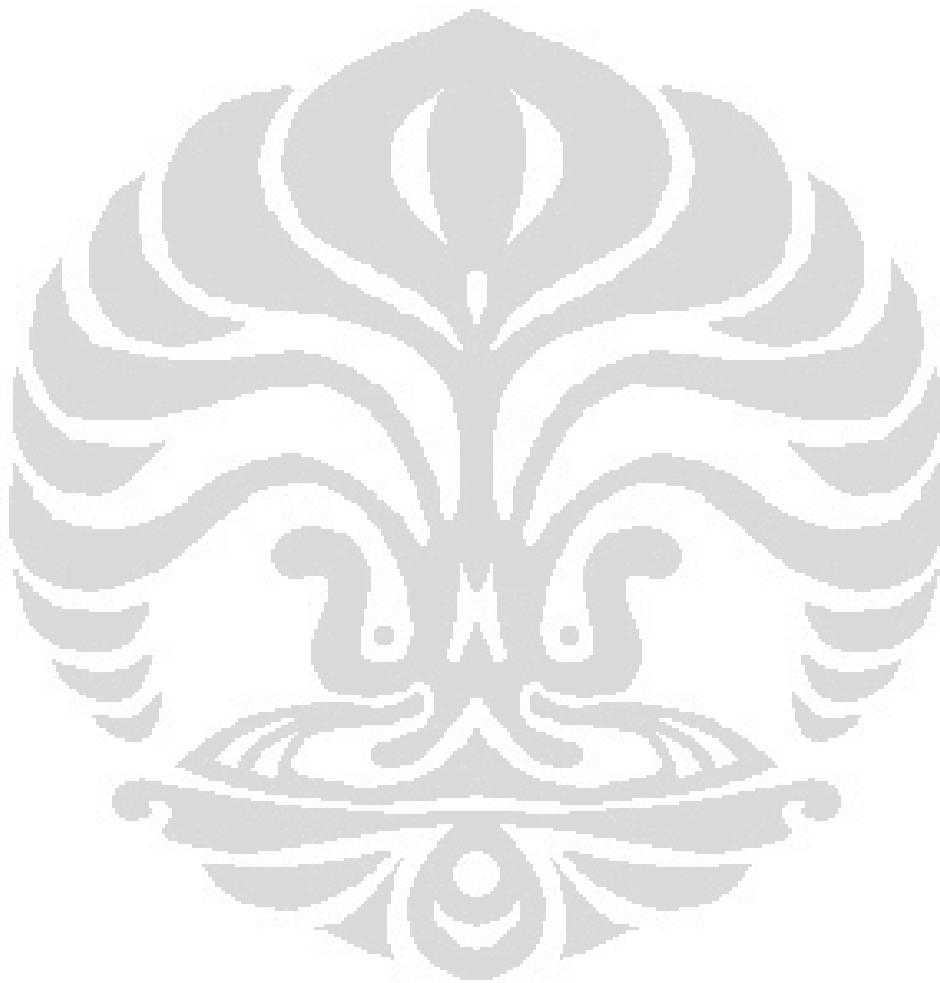
Manajemen waktu pada proses penyusunan catatan atas laporan keuangan didukung oleh kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan penyusunannya. *Person In Charge* dan *Reviewer* yang menjadi penanggung jawab atas pembuatan disclosure atas pelaporan keuangan hanya dikerjakan oleh satu orang untuk masing-masing note. Masing-masing dari mereka pun memiliki lebih dari satu note untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. (Tabel Perbandingan PIC tahun 2008, 2009, dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 4.5). Hal-hal seperti ini menyebabkan review pada akhirnya dilakukan seadanya dan pada akhir tahun buku masih ada temuan-temuan dari eksternal auditor atas Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM. Kelemahan-kelemahan terkait kelemahan manajemen waktu dan sumber daya manusia dapat diminimalisir dengan mempertegas sistem “*reward & punishment*” bagi keterlambatan atau kesalahan *review* dengan sistem *tracking* yang memadai. Telah disebutkan pada KD 29/2007 tentang GCG mengenai sistem “*reward & recognition*” yang rincian perlakuannya terdapat

pada KD 17/2004. Tetapi atas hasil wawancara dengan pihak manajemen, peraturan tersebut belum secara efektif diberlakukan.

Terkait dengan permasalahan sumber daya manusia, TELKOM merupakan perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar, yaitu sekitar 20.000 orang. Karyawan-karyawan dengan jumlah besar itu awalnya dibutuhkan untuk melayani pelanggan dalam rangka memenuhi *core business* TELKOM yaitu telepon tidak bergerak, seluler, dan multimedia. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, produk TELKOM terutama telepon tidak bergerak, menjadi ketinggalan zaman dan tenggelam dengan kehadiran teknologi baru kompetitor. Bukan hanya dalam hal produk, tapi juga sistem korporasi. Karyawan-karyawan lama akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang kurang *familiar* seiring berkembangnya teknologi. TELKOM sebaiknya memberikan arahan Pensiun Dini kepada sumber daya manusia yang kurang pengetahuan akan teknologi kemudian diganti dengan sumber daya manusia yang ahli bidang teknologi untuk mengembangkan sistem otomisasi pengendalian internal. Rotasi pegawai juga penting dilakukan, terutama pada PIC setiap poin Catatan atas Laporan Keuangan, untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan berulang kali oleh petugas dan *reviewer* yang sama. Cara ini juga bermanfaat karena pihak yang selalu ada pada posisi yang sama tidak akan menyadari apabila ada suatu hal yang bermasalah karena rutinitas kesehariannya yang telah dianggap normal atau dapat dimaklumi.

Oleh karena itu, pencocokan antara pelaksanaan dengan temuan eksternal auditor yang menyatakan bahwa pengendalian untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan dalam proses-proses signifikan yang dilakukan dalam area *presentation & disclosure* belum efektif, dapat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ketidakakuratan dan ketidaklengkapan bukan disebabkan oleh pengendalian yang sudah dirancang, melainkan disebabkan oleh *human error*. Penilaian *significant deficiency* yang diperoleh oleh TELKOM selama tiga tahun berturut-turut merupakan suatu hasil penilaian yang sangat wajar mengingat TELKOM merupakan perusahaan yang skalanya cukup besar bukan hanya berskala nasional tapi juga internasional. Begitupula dengan tingkat materialitas, *significant deficiency* berarti belum melewati *threshold* materialitas yang

ditetapkan oleh manajemen dan auditor eksternal. Akan tetapi perbaikan manajemen internal akan sangat penting untuk dilakukan agar operasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang lebih andal untuk kepentingan hubungan investor.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bermula dari kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh ENRON, US SEC mengeluarkan suatu peraturan yang bernama *Sarbanes-Oxley Act* (SOX). SOX yang memiliki kekuatan hukum ini berisi peraturan mengenai pengelolaan perusahaan beserta sanksinya apabila melanggar. Perusahaan yang *listing* di NYSE wajib patuh terhadap Undang-undang ini. Seksi 404 di dalamnya menjelaskan tentang pentingnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR). Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk merancang proses pengendalian internalnya, membuat *management assessment*, lalu kepada proses tersebut dilakukanlah atestasi asersi manajemen oleh auditor eksternal sesuai dengan kerangka COSO untuk menilai efektifitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan akan peraturan yang berlaku. Dengan serangkaian proses audit yang ada, didapatkanlah hasil akhir penilaian ketidakefektifan pengendalian internal perusahaan yang disebut dengan defisiensi. Defisiensi terbagi menjadi 3, yaitu *control deficiency*, *standard deficiency*, dan *material weakness*. Hasil penilaian ditentukan berdasarkan materialitas nominal salah saji dan beberapa faktor kualitatif lain.

Satu-satunya BUMN Indonesia yang wajib patuh terhadap ketentuan ICOFR ini adalah PT TELKOM. Setelah diberlakukan pada tahun 2006, penilaian menunjukkan penurunan defisiensi ke tingkat *significant deficiency* akan tetapi sampai tahun ini belum mengalami penurunan. Penilaian tersebut selalu didapat oleh TELKOM terutama pada area *presentation & disclosure* karena pengendalian berupa proses *monitoring* yang masih belum efektif dilakukan di area ini, sesuai dengan analisis kerangka COSO. Pengendalian telah dilakukan sesuai prosedur yang ada, akan tetapi pada saat pelaksanaan menjadi terlihat bahwa posisi *reviewer* kurang memadai dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemantau atau pemonitor. Hal ini mengakibatkan salah saji yang terdeteksi oleh auditor dan menjadi temuan sehingga evaluasi ICOFR masih belum memuaskan.

Analisis pertama dilakukan terhadap kerangka pengendalian internal COSO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal terkait masing-masing elemen COSO mengalami peningkatan sesuai dengan matriks yang digambarkan Tabel 4.3, 4.4, dan 4.5. Korelasi juga menunjukkan hubungan yang positif antara laporan manajemen dan pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, elemen lingkungan pengendalian masih belum efektif pada tahun 2008. Tahun selanjutnya temuan menjadi berkurang drastis karena pada tahun 2009 dikeluarkanlah Keputusan Direksi No. 13 Tahun 2009. Akan tetapi elemen *monitoring* masih belum mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2010 sesuai laporan manajemen. Hasil pemantauan lapangan membuktikan bahwa proses *monitoring* memang belum berjalan efektif karena hasil *review* catatan atas laporan keuangan menunjukkan kurangnya kompetensi PIC.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini menunjukkan bahwa defisiensi banyak terjadi akibat kesalahan yang dilakukan karena masih banyaknya campur tangan manusia atau pengendalian manual dalam prosedur pengendalian internal. *Human error* ini dapat terjadi karena permasalahan:

1. Proses penyusunan laporan keuangan masih dilakukan dengan cara manual terutama dimulai dari proses eliminasi, *offsetting*, dan reklasifikasi pada proses konsolidasi ribuan transaksi sampai proses-proses setelahnya, oleh tenaga manusia. Sistem SAP hanya sampai dibuatnya TB *unconsolidated*, selanjutnya dikerjakan secara manual pada Microsoft Excel.
2. Keterlambatan penyelesaian tugas pada proses-proses sebelum *presentation & disclosure* sehingga penyusunan laporan pokok dan *disclosure* dilakukan dengan waktu yang singkat tetapi dengan batas waktu yang tetap. Keterlambatan juga berasal dari kesalahan pengiriman data dari unit tertentu/Anak Perusahaan kepada AVP Financial Statement.
3. Sumber daya manusia untuk membuat laporan pokok dan per *note disclosure* masih sangat kurang.
4. *Judgement* yang berbeda antara manajemen dengan auditor eksternal mengenai pedoman akuntansi yang seharusnya digunakan.

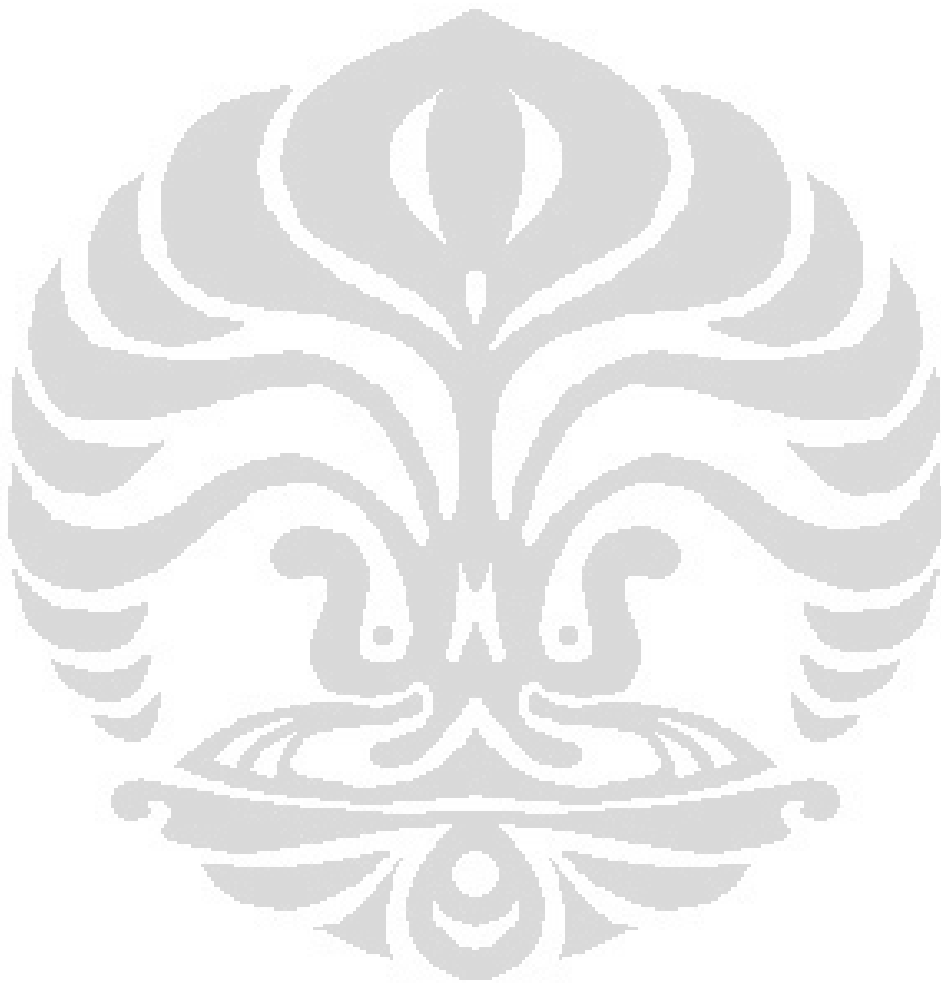
Analisis juga dilakukan dengan *review COSO framework* yang diperoleh kesimpulan bahwa TELKOM mengalami masalah dalam *monitoring*. Padahal elemen tersebut yang akan menjaga keberlangsungan efektivitas pengendalian internal. *Review* yang dilakukan sesuai dengan prosedur pengendalian yang tertera di bisnis proses belum dijalankan secara efektif karena *review* akhir masih menunjukkan kesalahan sehingga perlu peningkatan kompetensi *reviewer*.

5.2 Saran

Untuk perusahaan sebesar TELKOM akan sangat dimaklumi apabila ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan. Akan tetapi jangan sampai kesalahan tersebut bersifat material atau membudaya di kalangan pelaku pengendalian. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian internalnya, TELKOM seharusnya memperbaiki sistemnya dalam dua hal, yaitu:

1. Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian
 - a. Mengembangkan sistem automasi penyusunan pelaporan keuangan dan melakukan sentralisasi sistem dengan Anak Perusahaan.
 - b. Melakukan simplifikasi akun-akun terutama jumlah bank yang digunakan.
 - c. Melakukan *back-up data* karena sistem masih manual sehingga berisiko hilang dan terkena virus.
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Melakukan rotasi atas posisi masing-masing karyawan, terutama pada PIC setiap poin Catatan atas Laporan Keuangan, untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan berulang kali oleh petugas dan *reviewer* yang sama.
 - b. Meningkatkan proses monitoring dengan meningkatkan kompetensi dan objektivitas *reviewer* dengan melakukan *ongoing monitoring* dan *separate evaluations* dengan pelaporan defisiensi secara periodik.
 - c. Menambah jumlah karyawan yang kompeten di bidang akuntansi dan mengurangi karyawan yang sudah terlalu lama bertugas dan tidak *familiar* dengan teknologi baru.

- d. Mempertegas sistem “*reward & punishment*” bagi keterlambatan atau kesalahan *review* dengan sistem *tracking* yang memadai.



DAFTAR REFERENSI

- Alijoyo, A. & S. Zaini. (2004). *Komisaris independen: penggerak praktik GCG di perusahaan*. Jakarta: Indeks.
- Applegate, Lynda M., Austin, Robert D., & Soule, Deborah L. (2009). *Corporate information strategy and management: text and cases*. New York: McGraw-Hill.
- Archambeault, Deborah S. (2007). Auditing management assertions: the impact of SAS No. 106. *Tennessee CPA Journal*, 20-22.
- Arryman, Arif, dkk. (2010). *Mengurai benang kusut, merajut masa depan: transformasi tata kelola pelaporan keuangan Telkom pasca Sarbanes-Oxley Act (edisi revisi)*. Jakarta: PT Telkom Indonesia.
- Asbaugh-Skaife, Hollis, Collins, Daniel W., Kinney, William R., & Lafond, Ryan. (2008). The effect of SOX Internal Control Deficiencies on firm risk and cost equity. *Journal of Accounting Research Vol. 47 No. 1 March 2009*, 1-5.
- Benston, George J. (2003). The quality of corporate financial statements and their auditors before and after Enron. *Policy Analysis*. Washington D.C.: Cato Institute.
- Bratton, William W. (2002). Does corporate law protect the interests of shareholders and other stakeholders?: Enron and the dark side of shareholder value. *Tulane Law Review*. New Orleans: Tulane University Law School.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2008). *COSO internal control – integrated framework: guidance of monitoring internal control systems*.
- Elder, Randal J., Beasley, Mark S., & Arens, Alvin A. (2008). *Auditing and assurance services: an integrated approach*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ernst & Young. *Internal Control Assessment: evaluation of internal controls operation*.
- Ernst & Young. *Internal Control Assessment: evaluation of overall effectiveness*.

- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2009.
- Internal Audit PT Telekomunikasi Indonesia. (2009). *Laporan manajemen assessment efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan tahun 2008*.
- Internal Audit PT Telekomunikasi Indonesia. (2010). *Laporan management assessment efektivitas ICFR tahun 2009*.
- Internal Audit PT Telekomunikasi Indonesia. (2011). *Laporan management assessment efektivitas ICFR tahun 2010*.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Warfield, Terry D. (2011). *Intermediate accounting: IFRS edition (volume 1)*. New Jersey: Wiley.
- Laporan Tahunan 2008 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
- Laporan Tahunan 2009 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
- Laporan Tahunan 2010 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
- Moeller, Robert R. (1999). *Brink's Modern Internal Auditing* (5th ed.). New Jersey: John Wiley
- Moeller, Robert R. (2005). *Brink's Modern Internal Auditing* (6th ed.). New Jersey: John Wiley.
- OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publication Service.
- Public Company Accounting Oversight Board. (2007). *Auditing Standard No. 5: an audit of internal control over financial reporting that is integrated with an audit of financial statements*.
- Rado Bohinc. Choosing between the US Single Board or the European Two-Tier Board: a brief comparative corporate governance analysis. *University of California School of Law*.
- Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul J. (2011). *Accounting information system*. New Jersey: Pearson Global Edition.
- Sarbanes-Oxley Act of 2002.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research method for business: a skill-building approach*. New Jersey: Wiley.

The Institute of Internal Auditor. *Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*.

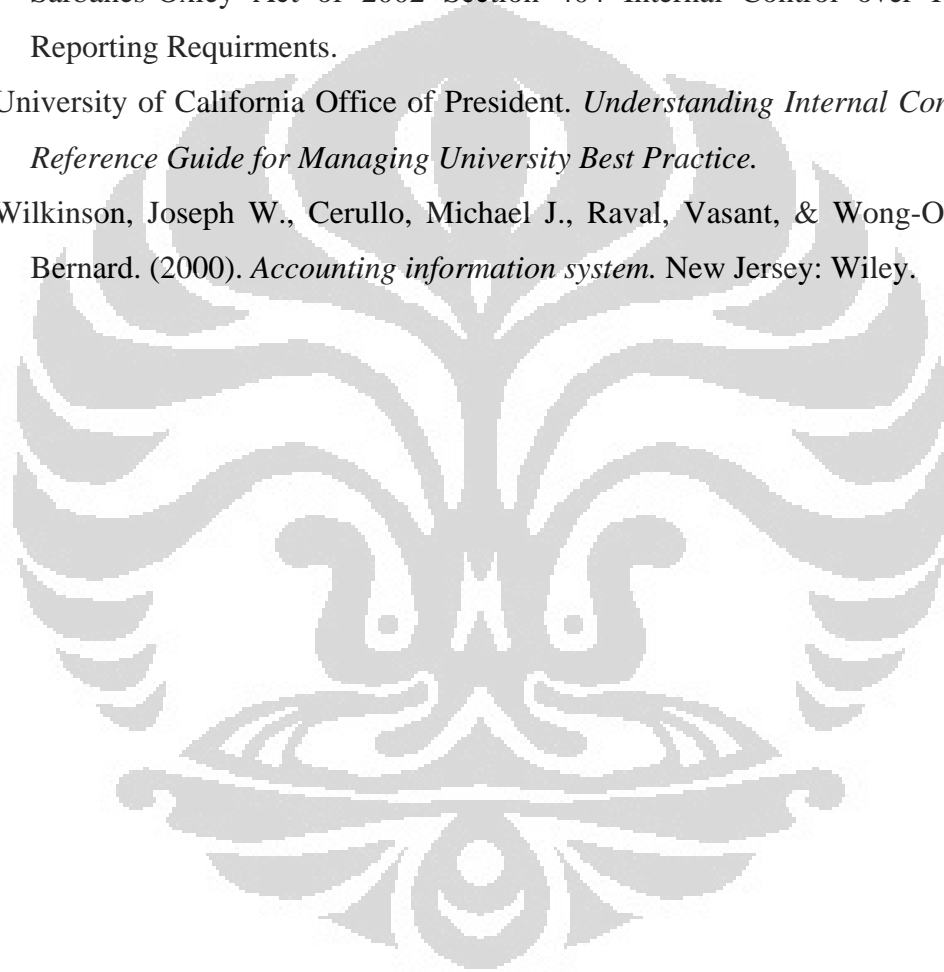
The SEC Institute, Inc. (2010). *2011 SEC handbook: rules and forms for financial statements and related disclosures*. Chicago: Wolters Kluwer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

United States Securities and Exchange Commission. (2009). Study of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 Internal Control over Financial Reporting Requirments.

University of California Office of President. *Understanding Internal Controls: A Reference Guide for Managing University Best Practice*.

Wilkinson, Joseph W., Cerullo, Michael J., Raval, Vasant, & Wong-On-Wing, Bernard. (2000). *Accounting information system*. New Jersey: Wiley.



SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

1. *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*

Bab ini mengatur pendirian sebuah dewan yang mengawasi kantor akuntan publik atau PCAOB. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa PCAOB memiliki wewenang untuk mengawasi KAP dengan menerbitkan standar audit yang berlaku umum. Bab ini terdiri dari:

- Sec. 101. Establishment; administrative provisions*
- Sec. 102. Registration with the Board*
- Sec. 103. Auditing, quality control, and independence standards and rules*
- Sec. 104. Inspections of registered public accounting firms*
- Sec. 105. Investigations and disciplinary proceedings*
- Sec. 106. Foreign public accounting firms.*
- Sec. 107. Commission oversight of the Board.*
- Sec. 108. Accounting standards.*
- Sec. 109. Funding.*

2. *Auditor Independence*

Bab ini menjelaskan bagaimana suatu KAP harus menjaga independensinya, salah satunya adalah larangan bagi KAP melakukan jasa non-audit tertentu untuk klien yang sama. Bab ini terdiri dari:

- Sec. 201. Services outside the scope of practice of auditors.*
- Sec. 202. Preapproval requirements.*
- Sec. 203. Audit partner rotation.*
- Sec. 204. Auditor reports to audit committees.*
- Sec. 205. Conforming amendments.*
- Sec. 206. Conflicts of interest.*
- Sec. 207. Study of mandatory rotation of registered public accounting firms.*
- Sec. 208. Commission authority.*

Lampiran 2. 1 (Lanjutan)

Sec. 209. Considerations by appropriate State regulatory authorities.

3. **Corporate Responsibility**

Bab ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan pelaporan keuangan, seperti komunikasi

Sec. 301. Public company audit committees.

Sec. 302. Corporate responsibility for financial reports.

Sec. 303. Improper influence on conduct of audits.

Sec. 304. Forfeiture of certain bonuses and profits.

Sec. 305. Officer and director bars and penalties.

Sec. 306. Insider trades during pension fund blackout periods.

Sec. 307. Rules of professional responsibility for attorneys.

Sec. 308. Fair funds for investors.

4. **Enhanced Financial Disclosures**

Bab ini menjelaskan peningkatan persyaratan dan kualitas pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan. Bab ini juga menuntut adanya pengendalian internal yang memadai untuk menjamin keakuratan pelaporan keuangan dan pengungkapan.

Sec. 401. Disclosures in periodic reports.

Sec. 402. Enhanced conflict of interest provisions.

Sec. 403. Disclosures of transactions involving management and principal stock-holders.

Sec. 404. Management assessment of internal controls.

Sec. 405. Exemption.

Sec. 406. Code of ethics for senior financial officers.

Sec. 407. Disclosure of audit committee financial expert.

Sec. 408. Enhanced review of periodic disclosures by issuers.

Sec. 409. Real time issuer disclosures.

Lampiran 2. 1 (Lanjutan)

5. *Analyst Conflicts of Interest*

Bab yang hanya terdiri dari seksi ini menjelaskan tentang langkah yang harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap laporan analisis terkait sekuritas.

Sec. 501. Treatment of securities analysts by registered securities associations and national securities exchanges.

6. *Commission Resources and Authority*

Bab ini menjelaskan langkah yang harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pelaporan analisis terkait surat berharga

Sec. 601. Authorization of appropriations.

Sec. 602. Appearance and practice before the Commission.

Sec. 603. Federal court authority to impose penny stock bars.

Sec. 604. Qualifications of associated persons of brokers and dealers.

7. *Studies and Reports*

Bab ini menjelaskan tentang bekerja samanya US SEC dengan *Comptroller General* (di Indonesia adalah BPK), untuk melakukan beberapa kajian dan melaporkan hasilnya.

Sec. 701. GAO study and report regarding consolidation of public accounting firms.

Sec. 702. Commission study and report regarding credit rating agencies.

Sec. 703. Study and report on violators and violations

Sec. 704. Study of enforcement actions.

Sec. 705. Study of investment banks.

8. *Corporate and Criminal Fraud Accountability*

Bab ini mengacu pada *Corporate and Criminal Fraud Act of 2002* yang mendeskripsikan mengenai hukuman spesifik bagi orang yang melakukan *fraud* dan menyediakan perlindungan tertentu pada *whistleblower*.

Lampiran 2. 1 (Lanjutan)

- Sec. 801. Short title.*
- Sec. 802. Criminal penalties for altering documents.*
- Sec. 803. Debts nondischargeable if incurred in violation of securities fraud laws.*
- Sec. 804. Statute of limitations for securities fraud.*
- Sec. 805. Review of Federal Sentencing Guidelines for obstruction of justice and extensive criminal fraud.*
- Sec. 806. Protection for employees of publicly traded companies who provide evidence of fraud.*
- Sec. 807. Criminal penalties for defrauding shareholders of publicly traded companies.*

9. **White-collar Crime Penalty Enhancements**

Bab ini juga mengacu pada sebuah peraturan, yaitu *White Collar Crime Penalty Enhancement Act of 2002*, yang secara jelas berisi tentang hukuman pidana yang terkait dengan kejahatan kerah putih dan konspirasi.

- Sec. 901. Short title.*
- Sec. 902. Attempts and conspiracies to commit criminal fraud offenses.*
- Sec. 903. Criminal penalties for mail and wire fraud.*
- Sec. 904. Criminal penalties for violations of the Employee Retirement Income Security Act of 1974.*
- Sec. 905. Amendment to sentencing guidelines relating to certain white-collar offenses.*
- Sec. 906. Corporate responsibility for financial reports.*

10. **Corporate Tax Returns**

Bab ini memberitahukan bahwa CEO harus menandatangani SPT Pajak.

- Sec. 1001. Sense of the Senate regarding the signing of corporate tax returns by chief executive officers.*

Lampiran 2. 1 (Lanjutan)

11. *Corporate Fraud and Accountability*

Bab ini mengidentifikasi apa saja yang disebut dengan kejahatan korporasi, merevisi panduan hukum dan memberatkan hukuman bagi pelakunya, juga memberi wewenang bagi SEC untuk membekukan transaksi perusahaan yang dianggap tidak biasa.

Sec. 1101. Short title.

Sec. 1102. Tampering with a record or otherwise impeding an official proceeding.

Sec. 1103. Temporary freeze authority for the Securities and Exchange Commission.

Sec. 1104. Amendment to the Federal Sentencing Guidelines.

Sec. 1105. Authority of the Commission to prohibit persons from serving as officers or directors.

Sec. 1106. Increased criminal penalties under Securities Exchange Act of 1934.

Sec. 1107. Retaliation against informants.

BISNIS PROSES SOX
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

ID SIKLUS	NAMA SIKLUS	ID PROSES	NAMA PROSES
A	PENDAPATAN		
A.01	POTS	A.01.01	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan Fixed Phone DCS Regional 1-6
		A.01.02	Aktivasi Warung Telkom DCS Regional 1-6
		A.01.03	Aktivasi DIVES UNER 1 - 6
		A.01.04	Aktivasi DBS (iSISKA)
		A.01.05	Pemeliharaan Data Pelanggan POTS & Speedy
		A.01.06	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter POTS & Speedy
		A.01.07	Pemrosesan CDR POTS
		A.01.08	Billing & Rating POTS dan Speedy Regional 1 - 6
		A.01.09	Pengakuan Pendapatan dan Piutang POTS, Flexi Classy, dan Speedy
		A.01.10	Penerimaan Pendapatan POTS, Flexi Classy, dan Speedy
		A.01.11	Penyisihan Penghapusan Piutang Usaha POTS, Flexi Classy, NON POTS, TIC-007, TG-01017, ITSL, dan Speedy
		A.01.12	Klaim & Restitusi POTS DCS
		A.01.13	Klaim & Restitusi DIVES
		A.01.14	Klaim dan Restitusi POTS DBS
		A.01.15	Isolir, Buka Isolir dan Cabut POTS DCS, DIVES, DBS
		A.01.16	Isolir, Buka Isolir, dan Cabut APS DIVES UNER 1-6
		A.01.17	Isolir, Buka Isolir, dan Cabut APS DBS (iSISKA)
		A.01.18	Billing & Rating POTS dan Speedy Regional 7
		A.01.19	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan Fixed Phone DCS Regional 7
		A.01.20	Aktivasi Warung Telkom_DCS Regional 7
		A.01.21	Aktivasi DIVES UNER 7
		A.01.22	Aktivasi DBS (CABINS)
		A.01.23	Isolir, Buka Isolir, dan Cabut POTS APS DCS Regional 7
		A.01.24	Isolir, Buka Isolir, dan Cabut APS DIVES UNER 7
		A.01.25	Isolir, Buka Isolir, dan Cabut APS DBS (CABINS)
A.02	Flexi	A.02.01	Pembuatan dan Perpanjangan PKS Authorized Dealer
		A.02.02	Aktivasi
		A.02.03	Pemeliharaan Data Pelanggan
		A.02.04	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter
		A.02.05	Pemrosesan CDR Classy
		A.02.06	Pemrosesan CDR Trendy
		A.02.07	Billing & Rating Classy
		A.02.08	Charging Trendy
		A.02.09	Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Trendy
		A.02.10	Penerimaan Pendapatan Flexi Trendy
		A.02.11	Klaim dan Restitusi Flexi
		A.02.12	Isolir, Buka Isolir dan Cabut
		A.02.13	Pembuatan PKS Bank Channel
		A.02.14	Penerimaan Kas dan Pencatatan PDD e-Flexi (Bank Channel)

A.03	Non POTS	A.03.01	Aktivasi
		A.03.02	Mutasi Layanan
		A.03.03	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter
		A.03.04	Billing dan Penagihan
		A.03.05	Pengakuan Pendapatan dan Piutang
		A.03.06	Penerimaan Pendapatan
		A.03.07	Klaim dan Restitusi
		A.03.08	Pemutusan Layanan
A.04	TG 017	A.04.01	Billing dan Rating
		A.04.02	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter
A.05	TG 007	A.05.01	Pemrosesan CDR dan Billing
		A.05.02	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter
A.06	ITSL	A.06.01	Pembentukan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, Transponder & SL
		A.06.02	Ordering dan Provisioning Interkoneksi
		A.06.03	Ordering & Provisioning Transponder & SL
		A.06.04	Pemrosesan CDR Interkoneksi & 007
		A.06.05	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter Interkoneksi, Transponder & SL
		A.06.06	Billing Interkoneksi
		A.06.07	Billing dan Penagihan Transponder & SL
		A.06.08	Settlement, Rekonsiliasi dan Penagihan Interkoneksi
		A.06.09	Pengakuan Pendapatan-Piutang dan Beban-Kewajiban Interkoneksi, Transponder, SL, 007 & 01017
		A.06.10	Penerimaan Pendapatan dan Pembayaran Interkoneksi, 007, 01017
		A.06.11	Klaim dan Restitusi Transponder & SL
		A.06.12	Pemutusan Layanan Transponder & SL
A.07	Speedy	A.07.01	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DCS Regional 1-6
		A.07.02	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DIVES UNER 1-6
		A.07.03	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DB (iSISKA)
		A.07.04	Pemrosesan Radius
		A.07.05	Klaim & Restitusi Speedy DCS
		A.07.06	Klaim & Restitusi Speedy DIVES
		A.07.07	Klaim & Restitusi Speedy DBS
		A.07.08	Isolir, Buka Isolir dan Cabut Speedy DCS, DIVES, & DBS
		A.07.09	Isolir, Buka Isolir dan Cabut APS DIVES UNER 1-6
		A.07.10	Isolir, Buka Isolir dan Cabut APS DBS (iSISKA)
		A.07.11	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DCS Regional 7
		A.07.12	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DIVES UNER 7
		A.07.13	Aktivasi dan Perubahan Data Pelanggan_DB (CABINS)
		A.07.14	Isolir, Buka Isolir dan Cabut APS DCS Regional 7
		A.07.15	Isolir, Buka Isolir dan Cabut APS DIVES UNER 7
		A.07.16	Isolir, Buka Isolir dan Cabut APS DBS (CABINS)
B	Beban	B.01.01	Pengadaan Barang dan atau Jasa Tanpa Melalui Proses PR/PO (Modul MM)
		B.01.02	Pengelolaan Data SDM
		B.01.03	Payroll
		B.01.04	Akrualisasi dan Penyesuaian
		B.01.05	Amortisasi BDD
C	Pengadaan & Aset Tetap	C.01.01	Pengajuan Pengadaan Barang dan atau Jasa (CAPEX)
		C.01.02	Pengadaan Barang dan atau Jasa
		C.01.03	Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa
		C.01.04	Monitoring Kontrak Pengadaan Barang dan atau Jasa yang Belum Diserahterimakan dan Di-Update ke SAP

		C.01.05	Penerimaan Barang dan atau Jasa dari Pengadaan Barang dan atau Jasa
		C.02.01	Pengakuan dan Pencatatan ADK, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud
		C.02.02	Kapitalisasi BOP dan BTLP
		C.02.03	Verifikasi Eksistensi Aset Tetap
		C.02.04	Mutasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud
		C.02.05	Pertukaran Aset Tetap
		C.02.06	Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud
		C.02.07	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud
		C.02.08	Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud
D	Persediaan	D.01.01	Penggantian & Perbaikan Modul
		D.01.02	Pengendalian Persediaan Modul
		D.02.01	Pengadaan Kartu
		D.02.02	Distribusi Kartu
		D.02.03	Pengendalian Persediaan
E	Pajak	E.01.01	PPh Badan
		E.01.02	PPh 21 Bulanan, 23, 4 (2), 25 (PBH) dan PPh 26
		E.02.01	PPN PK & PM
		E.03.01	Bea Materai
		E.04.01	PBB
		E.05.01	Perhitungan Pajak Kini
		E.05.02	Perhitungan Pajak Tangguhan
		E.06.01	Kebijakan Perpajakan
		E.07.01	Transaksi Hubungan Istimewa
F	Treasury	F.01.01	Penerimaan Kas dan Bank
		F.01.02	Penerimaan Piutang Pendapatan Terpusat
		F.01.03	Pengeluaran Kas dan Bank
		F.01.04	Imprest Fund
		F.01.05	Garansi Incoming
		F.01.06	Garansi Outgoing
		F.01.07	Manajemen Excess Fund
		F.01.08	Manajemen Valuta Asing
		F.01.09	Monitoring
		F.01.10	Share Buyback
		F.02.01	Pengajuan dan Persetujuan Instrumen Pendanaan
		F.02.02	Pendanaan Melalui Loan
		F.02.03	Pendanaan Melalui Bond
		F.02.04	Pendanaan Melalui Saham
		F.02.05	Pendanaan Melalui MTN
		F.03.01	Transaksi Palapa Ring
		F.04.01	Pemberian Pinjaman kepada Anak Perusahaan
G	Investasi/Divestasi	G.01.01	Perencanaan
		G.01.02	Pematangan Konsep
		G.01.03	Eksekusi dan Paska Eksekusi
		G.01.04	Monitoring
H	Pelaporan Keuangan	H.01.01	Kebijakan dan Pedoman Akuntansi
		H.01.02	Pemeliharaan GL
		H.01.03	Pra Closing
		H.01.04	Closing
		H.01.05	Konsolidasi
		H.01.06	Penyesuaian
		H.01.07	Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (Basic Financial Statement)
		H.01.08	Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)
		H.01.09	Penyusunan Laporan Keuangan Telkom
		H.01.10	Laporan SEC



Lampiran 4. 1

HASIL TEMUAN *INTEGRATED AUDIT*

TAHUN 2008, 2009, DAN 2010

No	Index Bispro	Nomor Kontrol	Lokasi	Area Defisiensi	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan	Ditemukan Dalam	COSO Component	Akun	Arsersi	Analisis	Hasil Evaluasi
1	H.01.01 - Kebijakan dan Pedoman Akuntansi	C2	FLP	Accuracy of Accounting Policy and Guidance	<p>Pengendalian untuk meyakinkan akurasi kebijakan akuntansi belum efektif dilakukan.</p> <p>Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa Pedoman Akuntansi terkait Kebijakan Aset Tetap (KD35/2009), khususnya 'Pedoman Akuntansi Aset Tetap' tanggal 2 Oktober 2009 (butir 3.7.3) tidak sesuai dengan PSAK 16R paragraf 58. Di dalam pedoman dinyatakan bahwa depresiasi aset berhenti ketika di reklasifikasi menjadi aset non operasional, sedangkan berdasarkan standar akuntansi (PSAK 16R) depresiasi tidak berhenti ketika aset <i>idle</i> atau dihentikan penggunaannya, kecuali aset <i>fully depreciated</i></p> <p>Sehingga, terdapat aset yang sudah usang dan rusak yang tidak didepresiasi dan diklasifikasikan sebagai aset non operasional, yang seharusnya sudah <i>fully depreciated</i> senilai Rp 52 Milyar (NBV) pada tanggal 31 Desember 2009</p>	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Beban Penyusutan; Aset Non Operasional	Valuation/Allocation, Presentation/Disclosure	<p>Defisiensi ini tingkat keterjadiannya <i>reasonably possible</i>, namun dengan pertimbangan:</p> <p>a) Kebijakan yang dibuat sudah benar, namun belum lengkap</p> <p>b) Kesalahan tidak berdampak material pada laporan keuangan</p> <p>Sehingga defisiensi ini dinilai sebagai CD</p>	CD
2	H.01.01 - Kebijakan dan Pedoman Akuntansi	C6	FLP	Accuracy of Accounting Policy and Guidance	<p>Pengendalian untuk meyakinkan ketepatan Pedoman Akuntansi belum efektif dilakukan.</p> <p>Pedoman Akuntansi (ND No. C Tel 243/KU 710/COP-A0012000/2009) tanggal 31 Juli 2009 perihal Pengakuan ADK untuk perolehan Ring JaKa2LaDeMa dan Satelit Telkom 3 tidak sesuai dengan PSAK 16R par.7. Di dalam pedoman akuntansi, Telkom mengakui setiap pembayaran yang dilakukan sebagai CIP, sedangkan berdasarkan PSA 16R aset dapat diakui ketika risiko sudah berpindah ke Telkom, misalnya: saat BAST-1 dikeluarkan untuk Ring JaKa2LaDeMa dan <i>launching date</i> untuk Staelit Telkom3. Hal ini mengakibatkan pengakuan yang tidak akurat di Q3 senilai Rp 255 Milyar</p> <p>Telkom sudah melakukan revisi Pedoman Akuntansi, dan mereklasifikasi ADK ke Uang Muka. Namun, pada tanggal 31 Desember 2009 terdapat uang muka yang belum dibayar senilai Rp 595 Miliar yang seharusnya tidak diakui sebagai uang muka. Hal ini terjadi dikarenakan revisi Pedoman Akuntansi terkait tidak mengatur mengenai pengakuan uang muka</p>	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Aset Tetap - Harga Perolehan; Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan; Hutang Usaha Non Afiliasi Pendapatan Jasa Jaringan; Uang Muka	Valuation/Allocation, Presentation/Disclosure	<p>Defisiensi ini tidak terkait dengan potensi <i>loss (fraud)</i> karena transaksi sudah tercatat, defisiensi berpotensi menyebabkan kesalahan penyajian di laporan keuangan. Defisiensi ini dinilai sebagai SD dengan pertimbangan bahwa:</p> <p>a) Defisiensi ini meningkatkan risiko ketidakakuratan penyajian laporan keuangan</p> <p>b) Defisiensi ini terkait dengan defisiensi lainnya di area Presentation & Disclosure</p> <p>c) Defisiensi ini terkait dengan akun - akun yang nilainya signifikan</p>	SD

No	Index Bispro	Nomor Kontrol	Lokasi	Area Defisiensi	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan	Ditemukan Dalam	COSO Component	Akun	Aseri	Analisis	Hasil Evaluasi
3	H.01.01 - Kebijakan dan Pedoman Akuntansi	C6	Corporate	Accuracy of Accounting Policy and Guidance	<p>Pengendalian untuk meyakinkan akurasi panduan kebijakan akuntansi belum efektif dilakukan</p> <p>Berdasarkan Nota Dinas No C. Tel 420/KU 840/COP-A0012000/2008 tanggal 26 November 2008 perihal pengakuan pendapatan, ditemukan bahwa di tetapkan beban-beban tersebut di bawah ini di <i>offset</i> dengan pendapatan yang terkait tanpa dilakukan <i>assessment</i> apakah Telkom bertindak sebagai <i>principal</i> atau <i>agent</i> dalam transaksi tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beban Kerjasama Jasa Informasi - Beban Kerjasama IPLC - Beban CPE Customer <p>Sehingga penyajian di laporan keuangan tidak akurat, dimana Telkom menyajikan beban tersebut <i>net</i> dengan pendapatannya, yang seharusnya disajikan <i>gross</i></p>	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Pendapatan Internet & Data - Komunikasi data; Pendapatan Internet & Data - Koneksi Internet; Pendapatan Jasa Jaringan - Sirkuit Langganan; Pendapatan Jasa Jaringan - Transponder	Valutaion/Allocation; Presentation/Disclosure	Defisiensi ini tidak terkait dengan potensi <i>loss (fraud)</i> karena transaksi sudah tercatat, defisiensi terjadi karena keterlambatan <i>assessment</i> yang berpotensi menyebabkan kesalahan penyajian di laporan keuangan. Defisiensi ini dinilai sebagai SD dengan pertimbangan bahwa: a) Defisiensi ini meningkatkan risiko ketidakakuratan penyajian laporan keuangan (<i>gross vs net</i>) b) Defisiensi ini terkait dengan defisiensi lainnya di area Presentation & Disclosure c) Defisiensi ini terkait dengan penyajian akun - akun yang nilainya signifikan	SD
4	H.01.02 - GL Maintenance	C1	FLP	Accuracy of new accounts grouping to financial statements	<p>Pengendalian atas <i>grouping</i> akun baru untuk pelaporan keuangan belum efektif dilakukan.</p> <p>a) Berdasarkan "Form GL Account Maintenance" pendapatan komitmen <i>fixed line</i> diklasifikasikan sebagai Pendapatan Abonemen Bulanan, yang seharusnya sebagai Pendapatan Pemakaian</p> <p>b) Manajemen mengklasifikasikan 'Beban Kerjasama IPLC' sebagai pengurang Pendapatan Transponder, namun di laporan keuangan adalah sebagai pengurang Pendapatan Sirkuit</p>	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Pendapatan Jasa Jaringan - Transponder	Presentation/Disclosure	Defisiensi ini tingkat keterjadiannya <i>reasonably possible</i> , namun dengan pertimbangan: a) Defisiensi yang terjadi bukan karena faktor kesengajaan, namun murni karena <i>error</i> b) Defisiensi tidak mengakibatkan potensi salah saji material pada laporan keuangan, melainkan klasifikasi penyajian Sehingga defisiensi ini dinilai sebagai CD	CD
5	H.01.03 - Analisa Pra Closing	C6	FC Corp, FC 00, FC 09	Accuracy of accounting issue assessment	<p>Pengendalian atas <i>quantitative assessment</i> belum efektif dilakukan;</p> <p>a) Multi Element Arrangement, manajemen melakukan <i>assessment</i> MEA tidak berdasarkan <i>relative fair value</i> sesuai dengan diatur di dalam Nota Dinas C.Tel.275/KU000/COP-A0014000/2009 tanggal 26 Agustus 2009, melainkan menggunakan analisa profitabilitas setiap proyek (<i>pricing</i>), sedangkan berdasarkan panduan kebijakan akuntansi alokasi dilakukan berdasarkan <i>basic tariff</i> setiap produk dan jasa</p> <p>b) <i>Assessment</i> klasifikasi <i>leasing (operating & finance lease)</i> PSAK 30R belum lengkap dan akurat</p>	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Environment, Control Activities, Information & Communication, Monitoring	Aset Tetap-Harga Perolehan; Aset Tetap-Akumulasi Penyusutan, Beban Ophar; Beban Penyusutan; KJPa-Capital Lease; KJPa yang akan jatuh tempo - Capital Lease Pendapatan Data & Internet - Komunikasi Data; Pendapatan Data & Internet - Koneksi; Pendapatan Jasa Jaringan Transponder; Pendapatan Jasa Jaringan-Sirkuit Langganan	Valuation/Allocation, Right & Obligation, Presentation/Disclosure	Defisiensi ini tingkat keterjadiannya <i>reasonably possible</i> , namun dengan pertimbangan: a) Manajemen sudah melakukan <i>improvement</i> signifikan dalam <i>assessment</i> MEA dan <i>Leasing</i> di tahun 2009 b) Defisiensi yang terjadi tidak mengakibatkan potensi salah saji material pada laporan keuangan c) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , karena kesalahan klasifikasi <i>leasing</i> merupakan ketidaksejajaran (<i>error</i>) Sehingga defisiensi ini dinilai sebagai CD	CD

No	Index Bispro	Nomor Kontrol	Lokasi	Area Defisiensi	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan	Ditemukan Dalam	COSO Component	Akun	Aseri	Analisis	Hasil Evaluasi
6	H.01.04 - Closing	C15	Finance Centre	Accuracy of intercompany reconciliation	Pengendalian untuk meyakinkan kelengkapan dan akurasi rekonsiliasi intercompany belum efektif dilakukan, ditemukan beberapa jurnal intercompany yang tidak sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Beban Ophar	Valuation/Allocation	Defisiensi ini dinilai sebagai CD, dengan pertimbangan bahwa: 1) Tidak terdapat risiko loss pada asset/liability karena defisiensi terjadi hanya karena kesalahan penggunaan akun disebabkan error. Tidak ada unsur kesengajaan 2) Transaksi ini tidak kompleks, dan tidak melibatkan judgement Sehingga defisiensi ini dinilai sebagai CD	CD
7	H.01.05 - Konsolidasi	C1	Corporate	Accuracy of subsidiary accounts mapping to Telkom group accounts	1) Pengendalian untuk meyakinkan akurasi mapping akun Anak Perusahaan ke Telkom Group belum efektif dilakukan. Telkomsel: Akun BDD jangka panjang senilai Rp 917 Milyar diklasifikasikan sebagai Uang Muka Investasi, seharusnya sebagai Uang Muka Eksploitasi. Kesalahan klasifikasi ini menyebabkan klasifikasi di dalam Laporan Arus Kas menjadi tidak akurat 2) Pengendalian untuk meyakinkan akurasi TB Anak Perusahaan belum efektif dilakukan. Ditemukan beberapa perbedaan antara TB (Audited) Anak Perusahaan dengan Laporan Keuangan (Audited) Anak Perusahaan: a) TII, di TB tercatat CIP senilai Rp 399 Milyar, namun di Laporan Keuangan (Audited) di klasifikasikan sebagai Aset Tetap b) Indonusa, di TB terdapat Penyisihan Putang Usaha Non Afiliasi senilai Rp 4,8 Milyar, namun di Laporan Keuangan (Audited) di klasifikasikan sebagai Penyisihan Piutang Usaha Afiliasi	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Neraca dan Laba Rugi	Valuation or Allocation	Defisiensi ini dinilai sebagai SD, dengan pertimbangan bahwa: a) Defisiensi ini dapat meningkatkan risiko ketidakakuratan klasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasi, khususnya laporan arus kas b) Defisiensi ini secara kuantitatif nilainya signifikan	SD
8	H.01.05 - Konsolidasi	C13	Corporate	Accuracy and Completeness of consolidation entries	Pengendalian untuk meyakinkan kelengkapan dan akurasi jurnal manual offsetting, eliminasi dan konsolidasi belum efektif dilakukan. Ditemukan transaksi/saldo yang belum di eliminasi, di offset, di reklasifikasi sepenuhnya di jurnal manual.	Operating Effectiveness	Update Testing	Control Activities	Neraca dan Laba Rugi	Valuation/Allocation; Presentation/Disclosure	Defisiensi ini dinilai sebagai SD, dengan pertimbangan bahwa: a) Defisiensi ini dapat meningkatkan risiko salah saji dalam laporan keuangan konsolidasi b) Defisiensi ini terkait dengan pencatatan ganda (double entries), penggunaan akun yang tidak tepat, kesalahan dalam pengambilan data, kesalahan reklasifikasi jurnal antara debit dan kredit yang secara kuantitatif nilainya signifikan	SD

No	Index Bispro	Nomor Kontrol	Lokasi	Area Defisiensi	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan	Ditemukan Dalam	COSO Component	Akun	Aseri	Analisis	Hasil Evaluasi
9	H.01.08 - Disclosure	C3	HR	<i>Completeness and Accuracy of supporting working papers (KKP) for disclosure under INDO GAAP and US GAAP</i>	Pengendalian untuk meyakinkan kelengkapan dan akurasi kertas kerja <i>disclosure</i> belum efektif dilaksanakan. Masih ditemukan beberapa defisiensi, diantaranya: a) Klasifikasi akrual BHP Frekuensi senilai Rp 853 Milyar tidak akurat, seharusnya diklasifikasikan sebagai Beban Konsesi, bukan sebagai Pembelian peralatan, material dan jasa b) Dokumen pendukung untuk aset tetap TII yang dilindungi asuransi senilai Rp 219 Milyar tidak akurat c) Kertas kerja pendukung rekonsiliasi US GAAP tidak akurat, terkait dengan <i>embedded derivative, fair value measurement</i> (SFAS 157 dan SFAS 107), <i>Obligation under capital lease</i> , dan lainnya	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testing</i>	<i>Control Activities, Information & Communication, Monitoring</i>	Neraca dan Laba Rugi	<i>Presentation/Disclosure</i>	Defisiensi ini tidak terkait dengan <i>loss</i> atau <i>fraud</i> pada <i>assets/liability</i> , karena pencatatan transaksi sudah dilakukan. Penyajian yang belum lengkap dan atau belum akurat disebabkan oleh <i>error</i> (ketidaksengajaan) Defisiensi ini dinilai sebagai SD dengan pertimbangan bahwa defisiensi ini berpotensi menjadi perhatian bagi pelaksana fungsi <i>oversight</i> Perusahaan, terkait dengan: a) Dalam menentukan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan membutuhkan <i>judgement, Judgement</i> berpotensi menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga masih terdapat risiko ketidaklengkapan pengungkapan. b) Defisiensi ini terkait dengan defisiensi lainnya di area <i>Presentation & Disclosure</i>	SD
10	H.01.08 - Disclosure H.01.09 - Laporan Bapepam	H.01.08 - C5, C6 & C7 H.01.09 - C2 & C5	FA	<i>Accuracy and Completeness of consolidated financial statements and disclosure under IND GAAP and US GAAP</i>	Pengendalian untuk meyakinkan kelengkapan dan akurasi laporan keuangan konsolidasi belum efektif dilakukan. Ditemukan beberapa defisiensi antara lain: INDO GAAP: a) Pengulangan paragraf pengungkapan kebijakan akuntansi perpajakan b) Pengungkapan jumlah lembar saham Infomedia tidak akurat c) Pengungkapan komitmen opex yang belum lengkap dan lainnya US GAAP: Pengungkapan <i>fair value</i> financial aset & liabilities tidak tied up dengan kertas kerja pendukungnya (kas dan setara kas, investasi sementara, piutang dan hutang derivative senilai Rp 16,4 Triliun), dan lainnya	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testing</i>	<i>Control Activities, Information & Communication, Monitoring</i>	Neraca dan Laba Rugi	<i>Presentation/Disclosure</i>	Defisiensi ini tidak terkait dengan <i>loss</i> atau <i>fraud</i> pada <i>assets/liability</i> , karena pencatatan transaksi sudah dilakukan. Penyajian yang belum lengkap dan atau belum akurat disebabkan oleh <i>error</i> (ketidaksengajaan) Defisiensi ini dinilai sebagai SD dengan pertimbangan bahwa defisiensi ini berpotensi menjadi perhatian bagi pelaksana fungsi <i>oversight</i> Perusahaan, terkait dengan: a) Dalam menentukan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan membutuhkan <i>judgement, Judgement</i> berpotensi menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga masih terdapat risiko ketidaklengkapan pengungkapan. b) Defisiensi ini terkait dengan defisiensi lainnya di area <i>Presentation & Disclosure</i>	SD

No	Control ID	Lokasi	Deskripsi Temuan	Area Defisiensi	Identified by	Kategori Temuan	Ditemukan dalam	COSO Component	Akun Terkait	Asersi	Analisa	Agregated Deficiency
1	H.01.01 - C5,C7 (Kebijakan dan Pedoman Akuntansi)	FLP, FBCC	Review atas kebijakan akuntansi dan isu akuntansi yang signifikan belum efektif dilakukan: 1) Sampai dengan Q3, FLP belum menerbitkan pedoman akuntansi - penyajian dan pengungkapan PSAK 50/55 sehingga tidak ada pengungkapan atas kebijakan akuntansi baru, credit risk 2) Assessment sewa usaha tidak lengkap, terdapat kontrak <i>back to back undergoing</i> yang masih menunggu penandatanganan yang tidak dilakukan <i>assessment</i>	<i>Accuracy of Accounting Policy and Guidance</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Interim & Update Testing</i>	<i>Control Activities</i>	Piutang Usaha - Net; Beban Umum dan Administrasi; Aset Tetap - Net; Beban Operasional dan Pemeliharaan; Beban Jasa Telekomunikasi	<i>Valuation/Allocation Completeness</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , dan kesalahan terjadi karena <i>error</i> bukan karena kesengajaan 3) Defisiensi tidak menimbulkan potensi salah saji yang signifikan pada laporan keuangan Berdasarkan hal-hal diatas, maka defisiensi ini dinilai sebagai <i>Control Deficiency</i>	CD
2	H.01.03 - C14 (Analisa Akun Pra Closing)	FC	Review atas Checklist Kesiapan Closing dan dokumen pendukungnya belum efektif dilakukan: 1) Terdapat interim devidend di bulan Des 2010 yang belum tercatat 2) Revaluasi setelah <i>closing</i> atas <i>monetary asset</i> dan <i>liability</i> tidak akurat	<i>Closing</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testing</i>	<i>Control Activities</i>	Hutang Dividen; Laba Ditahan; Beban non operasional	<i>Completeness</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , dan kesalahan terjadi karena <i>error</i> bukan karena kesengajaan 3) Defisiensi tidak menimbulkan potensi salah saji yang signifikan pada laporan keuangan Berdasarkan hal-hal diatas, maka defisiensi ini dinilai sebagai <i>Control Deficiency</i>	CD
3	H.01.03 - C6 (Analisa Akun Pra Closing)	Treasury Management	Rekonsiliasi Loan antara GL dan Modul Loan tidak dilakukan tepat waktu (setelah periode closing)	<i>Timeliness of Loan Reconciliation</i>	Management	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testing</i>	<i>Control Activities</i>	Bonds & Notes	<i>Completeness</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , dan kesalahan terjadi karena <i>error</i> bukan karena kesengajaan 3) Defisiensi tidak menimbulkan potensi salah saji yang signifikan pada laporan keuangan Berdasarkan hal-hal diatas, maka defisiensi ini dinilai sebagai <i>Control Deficiency</i>	CD
4	H.01.05 - C7 (Konsolidasi)	FA	Review untuk memastikan akurasi dan kelengkapan manual jurnal offsetting, eliminasi dan konsolidasi belum efektif dilakukan, misalnya: jurnal konsolidasi untuk aset ex KSO III	<i>Completeness and Accuracy of Consolidation Entries</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Interim Testing</i>	<i>Control Activities</i>	Aset Tetap - Net	<i>Valuation/Allocation</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , dan kesalahan terjadi karena <i>error</i> bukan karena kesengajaan 3) Defisiensi tidak menimbulkan potensi salah saji yang signifikan pada laporan keuangan Berdasarkan hal-hal diatas, maka defisiensi ini dinilai sebagai <i>Control Deficiency</i>	CD
5	H.01.06 - C1 (Penyesuaian)	FA	Pengendalian untuk memastikan akurasi CAJE 13 setelah closing belum efektif dilakukan: 1) Jurnal balik Uang Muka Pembelian Aset tidak akurat 2) Jurnal balik amortisasi goodwill tidak akurat	<i>Accuracy of adjustment entries</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testing</i>	<i>Control Activities</i>	Uang Muka; BDD dan aktiva tidak lancar lainnya; Goodwill dan Aset tidak berwujud lainnya; Beban Depresiasi dan Amortisasi	<i>Valuation/Allocation</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Tidak terdapat risiko <i>fraud</i> , dan kesalahan terjadi karena <i>error</i> bukan karena kesengajaan 3) Defisiensi tidak menimbulkan potensi salah saji yang signifikan pada laporan keuangan Berdasarkan hal-hal diatas, maka defisiensi ini dinilai sebagai <i>Control Deficiency</i>	CD

No	Control ID	Lokasi	Deskripsi Temuan	Area Defisiensi	Identified by	Kategori Temuan	Ditemukan dalam	COSO Component	Akun Terkait	Aseri	Analisa	Agregated Deficiency
6	H.01.07 - C2 (Laporan Keuangan Pokok)	FA	Pengendalian untuk memastikan akurasi Laporan Arus Kas belum efektif dilakukan: 1) Penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk pinjaman jangka panjang tidak akurat 2) Goruping penerimaan kas dari pendapatan operasi yang tidak tepat 3) dan lain - lain	<i>Accracy of Basic Financial Statements (Cash Flow)</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Interim Testing</i>	<i>Monitoring</i>	N/A	<i>Presentation & Disclosure</i>	1) <i>Likelihood: Reasonably Possible</i> 2) Defisiensi ini tidak terkait dengan <i>loss/fraud</i> pada <i>assets/liability</i> , karena pencatatan transaksi sudah dilakukan. Penyajian yang belum lengkap dan atau belum akurat disebabkan oleh <i>error/ketidaksengajaan</i> 3) Defisiensi ini dinilai signifikan, karena berpotensi meningkatkan risiko salah saji pada laporan keuangan konsolidasi	SD
7	H.01.08 - C3 (Catatan atas Laporan Keuangan)	FA, AMU	Pengendalian untuk memastikan akurasi dan kelengkapan KKP Disclosure belum efektif dilakukan: 1) Usage Charges tahun 2008 senilai Rp 446 M disajikan sebagai Pendapatan abonemen bulanan 2) dan lain - lain	<i>Completeness and Accuracy of supporting working papers for Financial Statement Disclosure</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testiing</i>	<i>Monitoring</i>	N/A	<i>Presentation & Disclosure</i>	3) Defisiensi ini secara kuantitatif nilainya signifikan dan terkait dengan defisiensi lainnya di area <i>Presentation & Disclosure</i> Berdasarkan hal-hal di atas, defisiensi ini dinilai sebagai <i>Significant Deficiency</i>	
8	H.01.08 - C5,C6 H.01.09 - C2,C5 (Catatan atas Laporan Keuangan; Laporan ke Bapepam)	FA	Pengendalian untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan belum efektif dilakukan: 1) Kesalahan klasifikasi penyajian hutang RSA jangka panjang, yang seharusnya merupakan porsi jangka pendek senilai Rp 65 M 2) Kesalahan klasifikasi DTA - Non Current dan DTL - Non Current senilai Rp 62 M 3) Ketidakakuratan penyajian pendapatan RSA (US GAAP), <i>overpayment</i> ke investor disajikan sebagai beban operasional (beban operasional & pemeliharaan dan jasa telekomunikasi), seharusnya dikapitalisasi sebagai <i>prepaid contingent rent</i> .	<i>Completeness and Accuracy of Financial Statement Disclosure under INDO GAAP & US GAAP</i>	PwC	<i>Operating Effectiveness</i>	<i>Update Testiing</i>	<i>Monitoring</i>	N/A	<i>Presentation & Disclosure</i>		



Lampiran 4.2

BISNIS PROSES

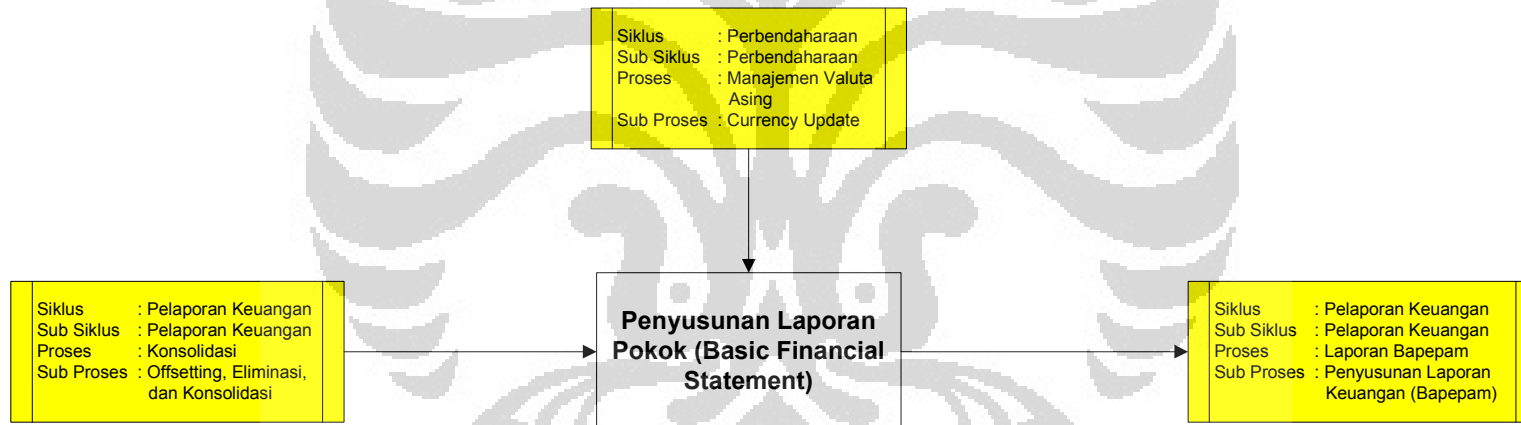
AREA PRESENTATION & DISCLOSURE

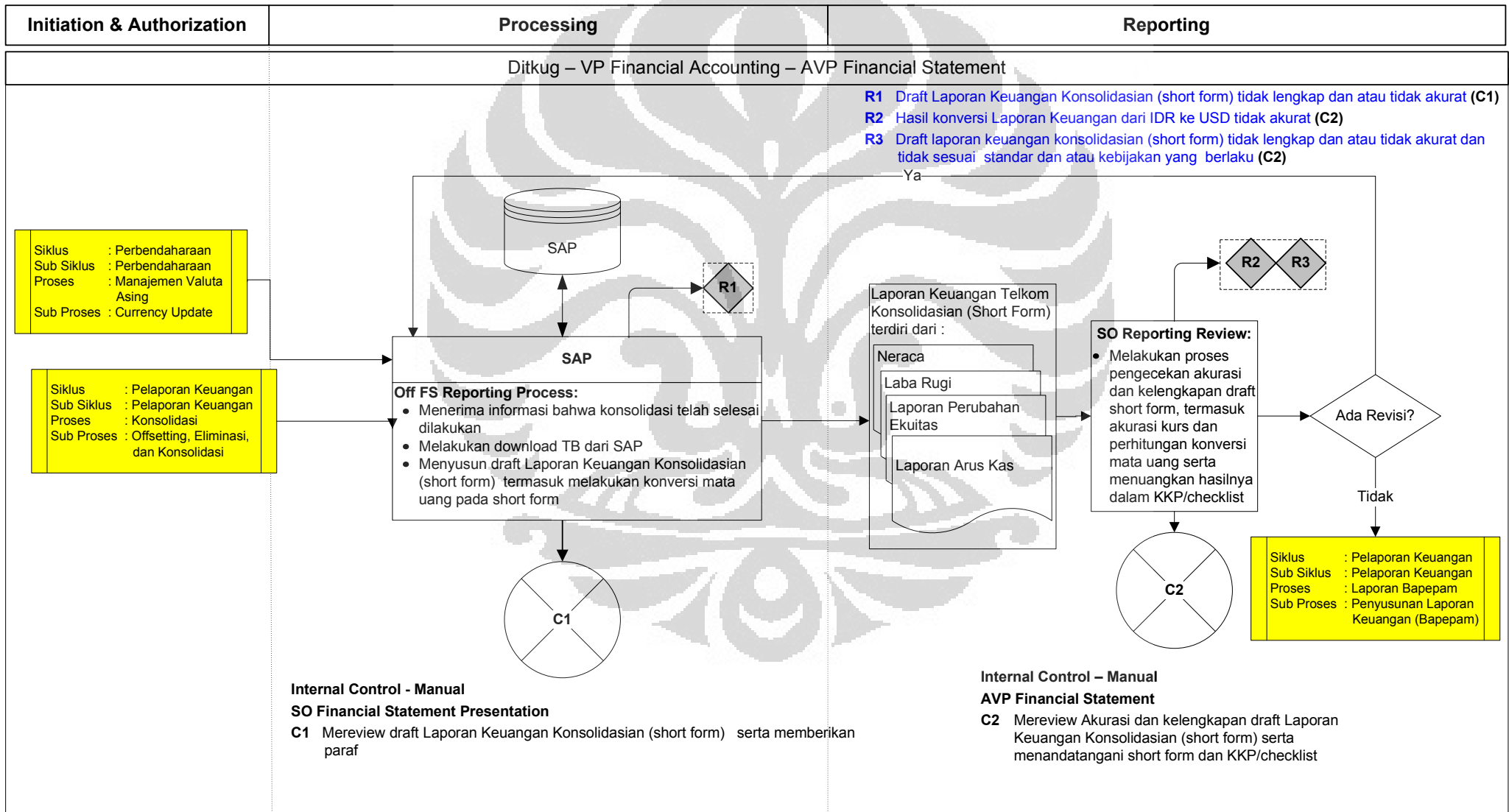


PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Proses Bisnis : Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)
Sub Proses Bisnis : Level 2 (Hal. 1/1)
Nama & Versi Dok. : H.01.07_Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 1/2)

Initiation & Authorization, Processing, Recording, Reporting





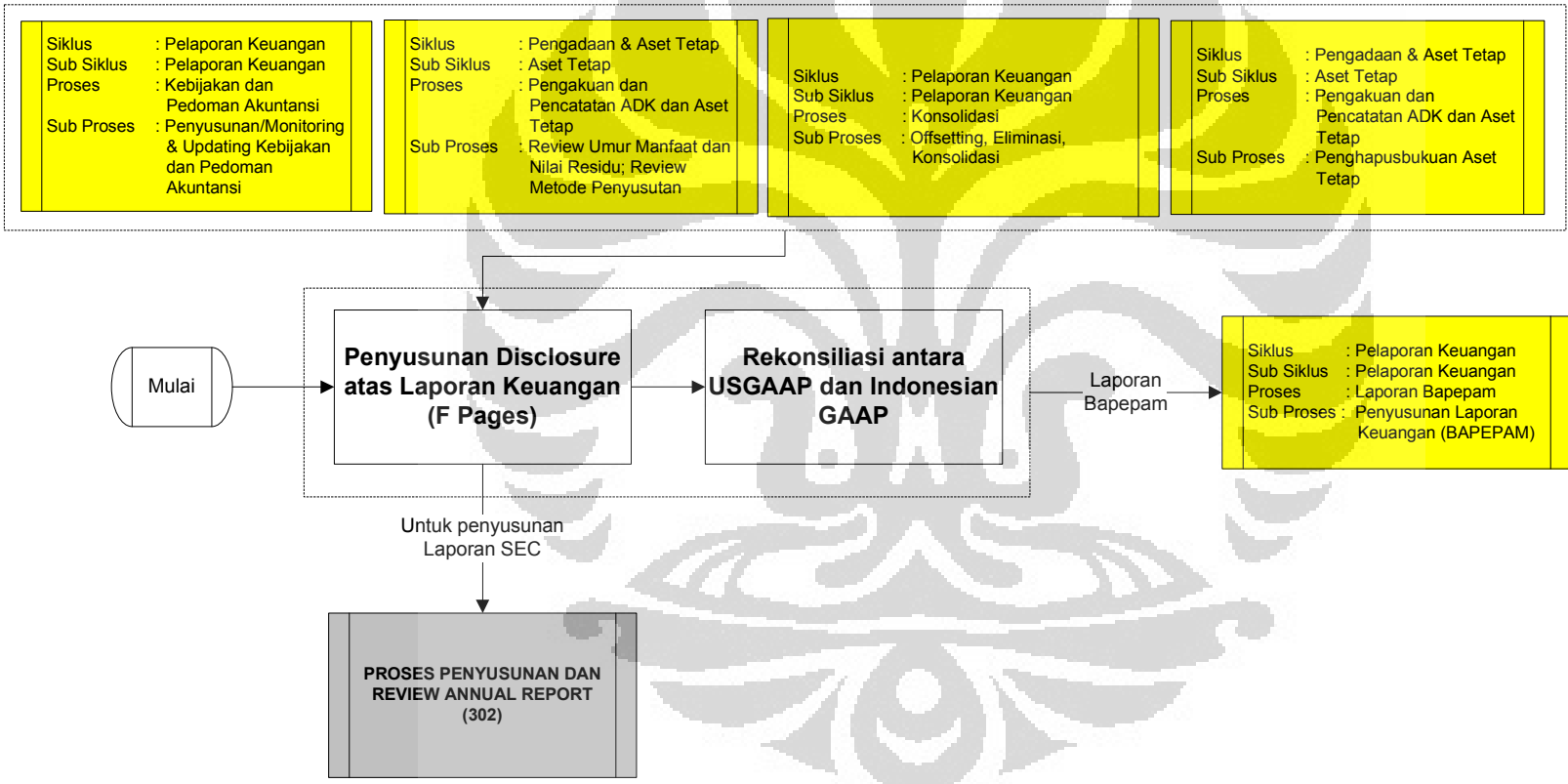
R1 Draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) tidak lengkap dan atau tidak akurat (**C1**)
R2 Hasil konversi Laporan Keuangan dari IDR ke USD tidak akurat (**C2**)
R3 Draft laporan keuangan konsolidasian (short form) tidak lengkap dan atau tidak akurat dan tidak sesuai standar dan atau kebijakan yang berlaku (**C2**)



PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Proses Bisnis : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (*Disclosure*)
Sub Proses Bisnis : Level 2 (Hal. 1/1)
Nama & Versi Dok. : H.01.08_Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 1/14)

Initiation & Authorization, Processing, Recording, Reporting



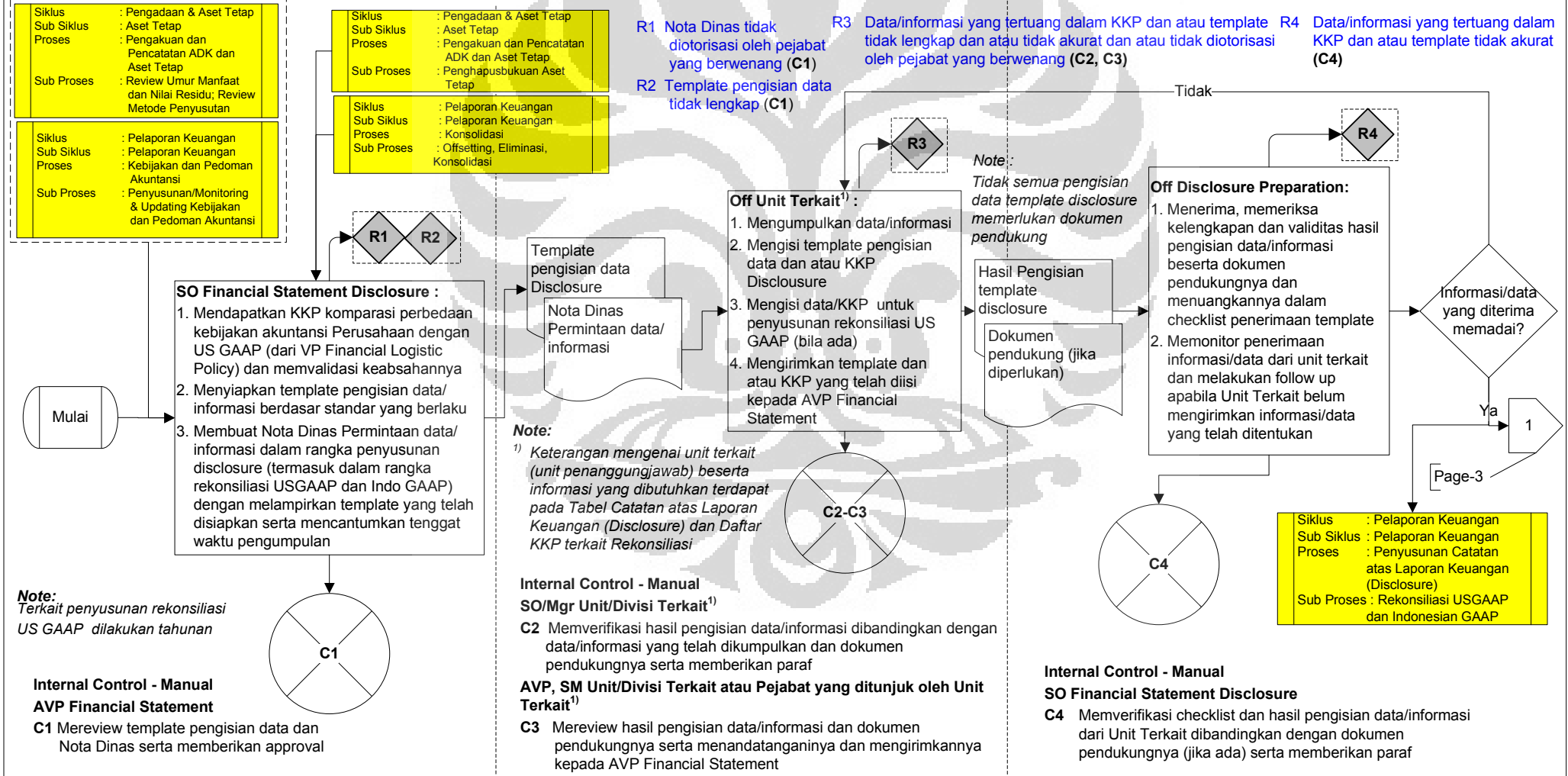


PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Proses Bisnis : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)
Sub Proses Bisnis : Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages) (Hal. 1/13)
Nama dan Versi Dok. : H.01.08_Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 2/14)

Initiation & Authorization | **Processing**

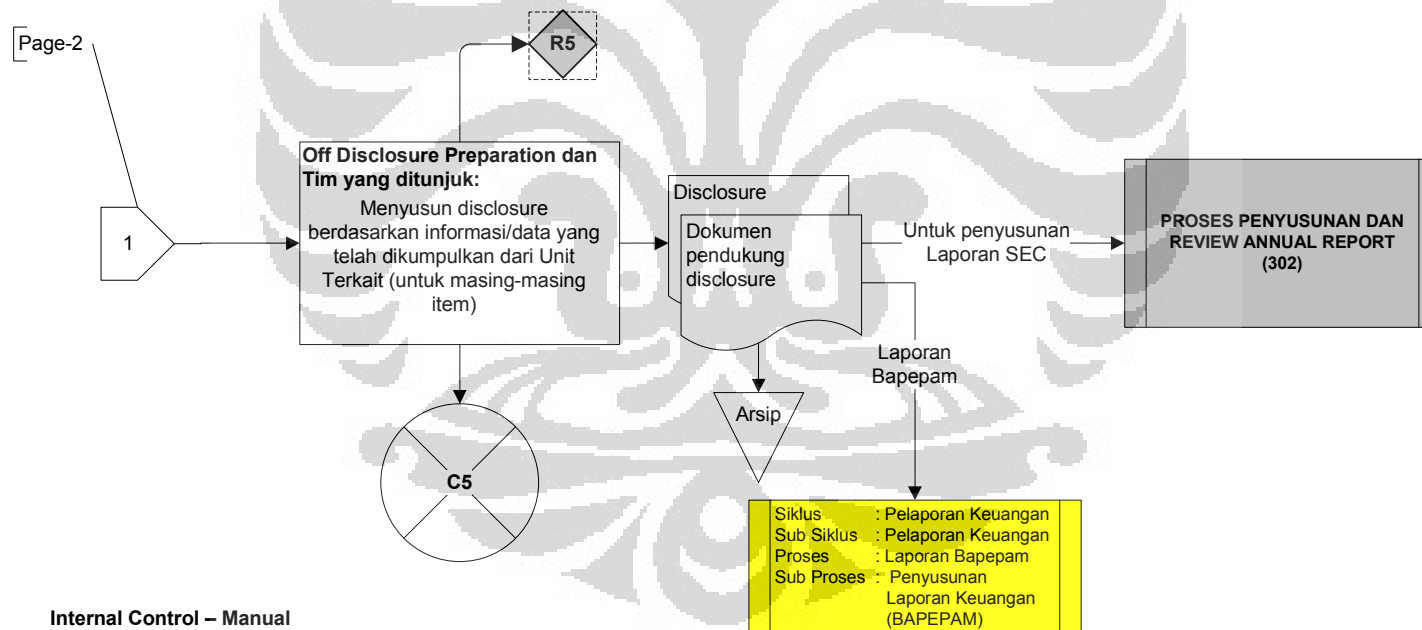
Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement | Unit Terkait (terlampir) | Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement



Reporting

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

R5 Disclosure tidak sesuai dengan dokumen pendukung (C5)



Internal Control – Manual

SO Financial Statement Disclosure dan atau Tim yang ditunjuk

C5 Memverifikasi disclosure dibandingkan dengan dokumen pendukung serta memarafnya

Processing

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

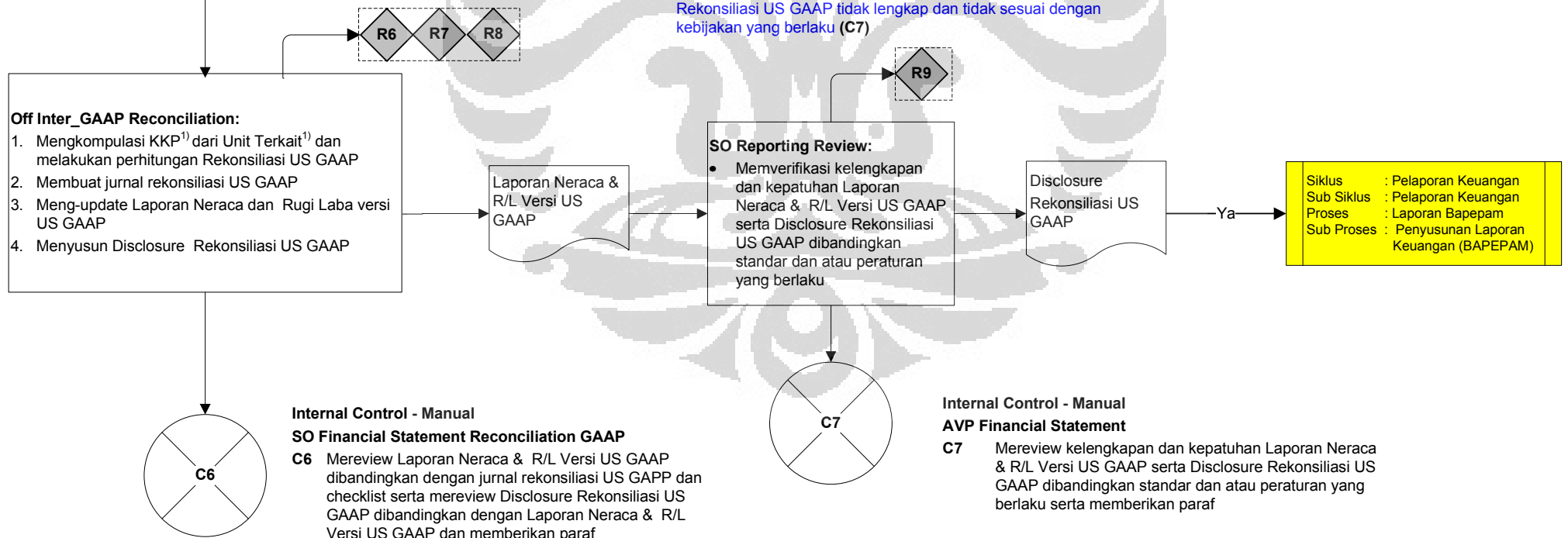
Siklus : Pelaporan Keuangan
 Sub Siklus : Pelaporan Keuangan
 Proses : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)
 Sub Proses : Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages)

- R6 Penyusunan KKP rekonsiliasi US GAAP tidak akurat dan atau tidak lengkap (C6)
- R7 Jurnal rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan atau tidak akurat (C6)
- R8 Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan atau tidak akurat (C6)

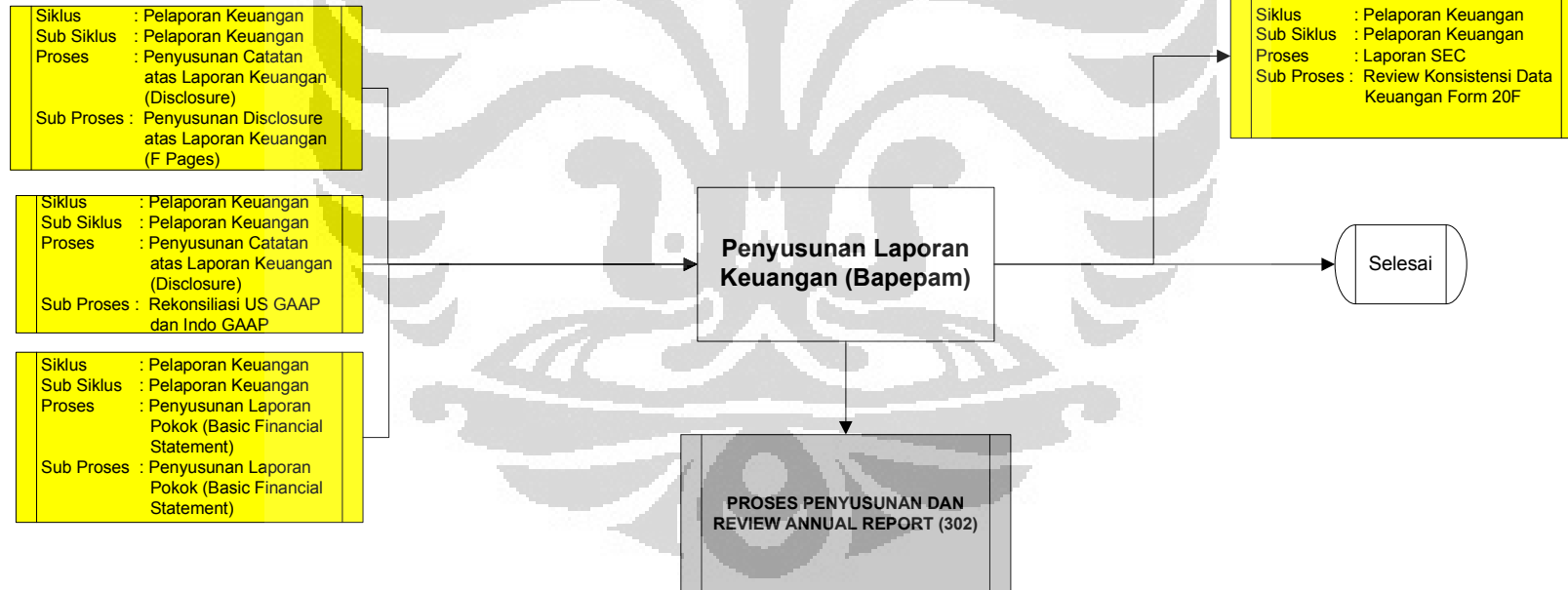
Note:

1. Daftar KKP dan Unit Terkait Rekonsiliasi US GAAP terdapat pada Tabel Daftar KKP Rekonsiliasi US GAAP
2. Untuk penyusunan rekonsiliasi US GAAP dan INDO GAAP dilakukan tahunan

R9 Laporan Neraca & R/L versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku (C7)



Initiation & Authorization, Processing, Recording, Reporting





PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Proses Bisnis : Laporan Bapepam
Sub Proses Bisnis : Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam) (Hal. 1/4)
Nama & Versi Dok. : H.01.09_Laporan Bapepam_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 2/5)

Initiation & Authorization

Processing

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

- R1 Angka di disclosure tidak tie up dengan angka di Laporan Neraca dan Laba Rugi (C1)
- R2 Disclosure tidak sesuai dengan standard/kebijakan yang berlaku (C1)
- R3 Disclosure yang disajikan tidak relevan untuk diungkapkan atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan saat ini (C1)
- R4 Disclosure yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak akurat (C1)

- R5 Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian dan Disclosuresnya tidak sesuai dengan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) (C2, C3)

Siklus : Pelaporan Keuangan
 Sub Siklus : Pelaporan Keuangan
 Proses : Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)
 Sub Proses : Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement)

Siklus : Pelaporan Keuangan
 Sub Siklus : Pelaporan Keuangan
 Proses : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)
 Sub Proses : Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages)

Siklus : Pelaporan Keuangan
 Sub Siklus : Pelaporan Keuangan
 Proses : Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Disclosure)
 Sub Proses : Rekonsiliasi US GAAP dan Indonesian GAAP

Off Longform FS Preparation :

- Penggabungan data shortform dan disclosure menjadi Laporan keuangan konsolidasian
- Mengupdate Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian (apabila ada revisi)

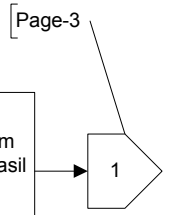
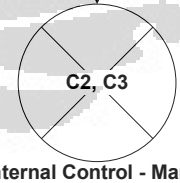
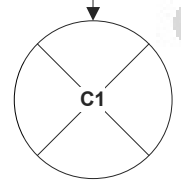
Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian

SO Reporting Review:
 Melakukan proses review terhadap Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian

Hasil Review

Ada Revisi ?

Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian - Hasil Revisi



Internal Control - Manual

SO Financial Statement Presentation

C1 Memverifikasi angka disclosure dengan angka Laporan Keuangan dan melakukan pengecekan kelengkapan disclosure terhadap checklist Bapepam dan memberikan paraf

**Internal Control - Manual
 AVP Financial Statement**

C2 Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan checklist Bapepam, standar format pelaporan, dan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta menandatangani

VP Financial Accounting (sekali sebagai anggota DC)

C3 Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) dan menandatangani



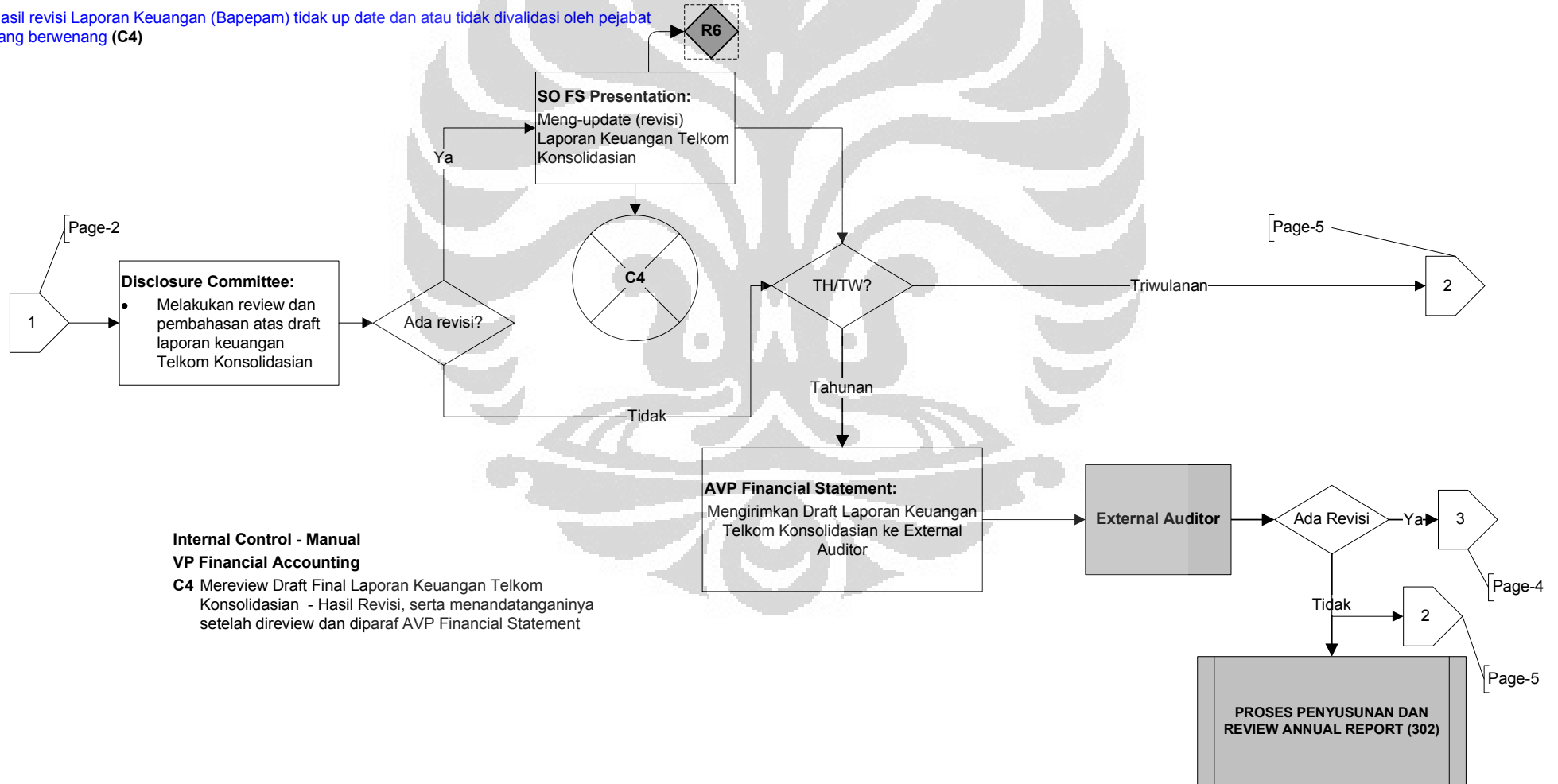
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan
Proses Bisnis : Laporan Bapepam
Sub Proses Bisnis : Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam) (Hal. 2/4)
Nama & Versi Dok. : H.01.09_Laporan Bapepam_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 3/5)

Processing

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

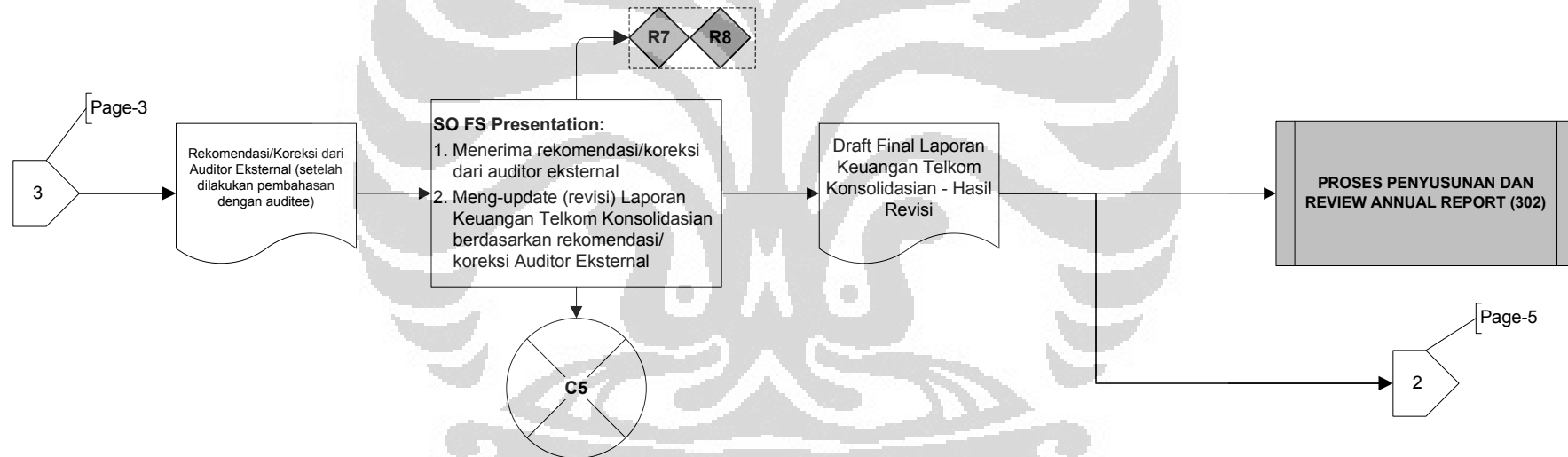
R6 Hasil revisi Laporan Keuangan (Bapepam) tidak up date dan atau tidak divalidasi oleh pejabat yang berwenang (C4)



Processing

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

- R7 Laporan Keuangan Konsolidasian tidak up date (C5)
- R8 Hasil revisi Laporan Keuangan Konsolidasian tidak lengkap dan atau tidak akurat dan atau tidak divalidasi oleh pejabat yang berwenang (C5)



Internal Control - Manual

VP Financial Accounting

C5 Mereview Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian serta menandatangani setelah AVP Financial Statement memverifikasi dengan membandingkan Hasil Pembahasan/Revisi External Auditor dan memarafnya

Note:

1. Review data-data keuangan di SEC dibandingkan dengan data pelaporan keuangan sudah didokumentasikan dalam proses bisnis laporan SEC



PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan

Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan

Proses Bisnis : Laporan Bapepam

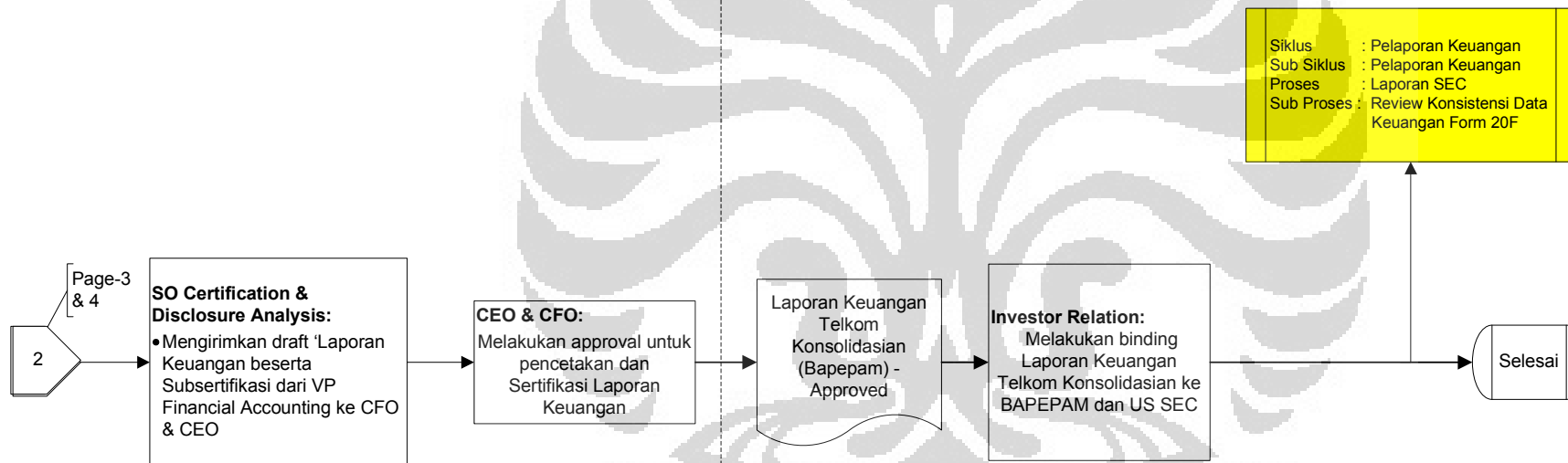
Sub Proses Bisnis : Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam) (Hal. 4/4)

Nama & Versi Dok. : H.01.09_Laporan Bapepam_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 5/5)

Reporting

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement, CEO, CFO

Ditkug – VP Investor Relation





PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan

Sub Siklus Bisnis : Pelaporan Keuangan

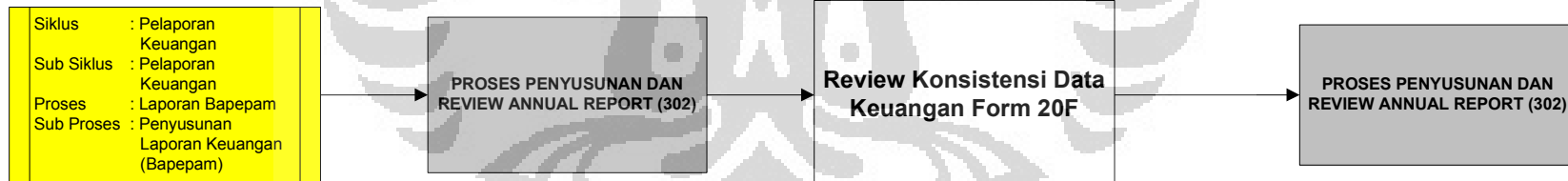
Proses Bisnis : Laporan SEC

Sub Proses Bisnis : Level 2 (Hal. 1/1)

Nama & Versi Dok. : H.01.10_Laporan SEC_R.2010_rev010910.vsd/ (Hal. 1/2)

Initiation & Authorization

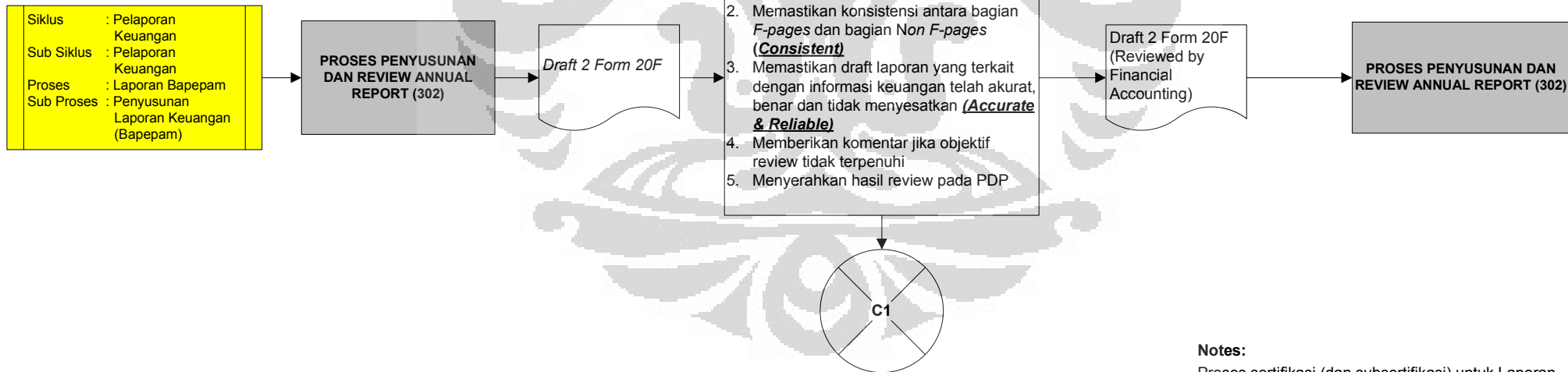
Processing



Reporting

Ditkug – VP Financial Accounting – AVP Financial Statement

R1 Data-data Keuangan dalam Draft 2 20F tidak konsisten dengan data-data keuangan dalam F Pages, tidak lengkap, dan atau tidak akurat (C1)



AVP Financial Statement

1. Menerima draft 2 Form 20F
2. Memastikan konsistensi antara bagian *F-pages* dan bagian *Non F-pages* (***Consistent***)
3. Memastikan draft laporan yang terkait dengan informasi keuangan telah akurat, benar dan tidak menyesatkan (***Accurate & Reliable***)
4. Memberikan komentar jika objektif review tidak terpenuhi
5. Menyerahkan hasil review pada PDP

**Internal Control - Manual
VP Financial Accounting**

C1 Mereview Draft 20F/Annual Report final dan memberikan paraf jika objek review telah terpenuhi

Notes:

Proses sertifikasi (dan subsertifikasi) untuk Laporan SEC ada pada **PROSES PENYUSUNAN DAN REVIEW ANNUAL REPORT (302)**

**RINCIAN SUBPROSES DAN PENGENDALIAN PADA
AREA PRESENTATION & DISCLOSURE**

PROSES H.01.07: Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pokok (*Basic Financial Statement*)

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
H.01.07.01 Penyusunan Laporan Pokok (Basic Financial Statement) (1/1)	C1	Mereview draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta memberikan paraf	SO Financial Statement Presentation
	C2	Mereview Akurasi dan kelengkapan draft Laporan Keuangan Konsolidasian (short form) serta menandatangani short form dan KKP/checklist	AVP Financial Statement

PROSES H.01.08: Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (*Disclosure*)

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
H.01.08.01 Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages) (1/13)	C1	Mereview template pengisian data dan Nota Dinas serta memberikan approval	AVP Financial Statement
	C2	Memverifikasi hasil pengisian data/informasi dibandingkan dengan data/informasi yang telah dikumpulkan dan dokumen pendukungnya serta memberikan paraf	SO/Mgr Unit/Divisi Terkait1)
	C3	Mereview hasil pengisian data/informasi dan dokumen pendukungnya serta menandatangani dan mengirimkannya kepada AVP Financial Statement	AVP, SM Unit/Divisi Terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Unit Terkait1)
	C4	Memverifikasi checklist dan hasil pengisian data/informasi dari Unit Terkait dibandingkan dengan dokumen pendukungnya (jika ada) serta memberikan paraf	SO Financial Statement Disclosure
H.01.08.01 Penyusunan Disclosure atas Laporan Keuangan (F Pages) (2/13)	C5	Memverifikasi disclosure dibandingkan dengan dokumen pendukung serta memarafnya	SO Financial Statement Disclosure dan atau Tim yang ditunjuk

H.01.08.02 Rekonsiliasi USGAAP dan Indonesian GAAP (1/2)	C6	Mereview Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dibandingkan dengan jurnal rekonsiliasi US GAPP dan checklist serta mereview Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan dengan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP dan memberikan paraf	SO Financial Statement Reconciliation GAAP
	C7	Mereview kelengkapan dan kepatuhan Laporan Neraca & R/L Versi US GAAP serta Disclosure Rekonsiliasi US GAAP dibandingkan standar dan atau peraturan yang berlaku serta memberikan paraf	AVP Financial Statement

PROSES H.01.09: Penyusunan Laporan Keuangan Telkom ke Bapepam-LK

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam) (1/4)	C1	Memverifikasi angka disclosure dengan angka Laporan Keuangan dan melakukan pengecekan kelengkapan disclosure terhadap checklist Bapepam dan memberikan paraf	SO Financial Statement Presentation
	C2	Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan checklist Bapepam, standar format pelaporan, dan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) serta menandatangani	AVP Financial Statement
	C3	Mereview Draft Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan "Disclosure objective review" (Completeness, Consistency, Accuracy & Reliability, Compliance) dan menandatangani	VP Financial Accounting (sekaligus sebagai anggota DC)
H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan (Bapepam) (2/4)	C4	Mereview Draft Final Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian - Hasil Revisi, serta menandatangani setelah direview dan diparaf AVP Financial Statemet	VP Financial Accounting

H.01.09.01 Penyusunan Laporan Keuangan Telkom (3/4)	C5	Mereview Draft Laporan Keuangan Telkom Konsolidasian serta menandatangani setelah AVP Financial Statement memverifikasi dengan membandingkan Hasil Pembahasan/Revisi External Auditor dan memarafnya	VP Financial Accounting
--	----	--	-------------------------

PROSES H.01.10: Laporan SEC

NAMA SUBPROSES	ID KONTROL	DESKRIPSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
H.01.10.01 Review Konsistensi Data Keuangan Form 20F (1/1)	C1	Mereview Draft 20F/Annual Report final dan memberikan paraf jika objek review telah terpenuhi	VP Financial Accounting

Keterangan:

 = Significant Control/Key Control

C = Control

Y = Yes

N = No

CHECKLIST TEMPLATE

4

KELENGKAPAN DOKUMEN
(Laporan Keuangan Triwulan IV/2010)

POS : KAS DAN SETARA KAS

DIKERJAKAN OLEH : FEBRINA INDIASTUTI PARAF: [Signature]

DIREVIEW OLEH : AGUS SUPRAYITNO PARAF: [Signature]

DOKUMEN :

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	CHECKLIST REVIEW	✓		
2	TEMPLATE DISCLOSURE LK KONSOLIDASI	✓		
3	KKP KONSOLIDASI	✓		
4	TEMPLATE DISCLOSURE DARI UNIT TERKAIT	✓		
5	COMPACT TELKOM		✓	
6	COMPACT ANAK PRS	✓		

CATATAN:
cek 27/11/11
lihat catatan. f. => selh OK

[Signature]

Lampiran 4. 4 (Lanjutan)

No	CHECK LIST KETERSAMBUNGAN DATA	PARAF PIC
1	2	3
4	KAS DAN SETARA KAS	
	<p>Penanggungjawab penyusunan KKP:</p> <p><u>Prosedur verifikasi ketersambungan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check kesesuaian saldo jumlah Kas dan Setara Kas dalam KKP rincian dengan saldo Kas dan Setara Kas dalam Neraca Konsolidasian, tindak lanjuti ke pemegang pos apabila terjadi perbedaan. 2. Check ketepatan penjumlahan matematis, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjumlahan ke bawah (footing) b. Penjumlahan ke samping (casting) c. Penjumlahan menyilang (cross footing) 3. Perhatikan pembulatan (rounding). Rounding bisa menyebabkan kesalahan, lakukanlah penjumlahan ulang secara manual. 	<p style="text-align: center;">f.</p> <p style="text-align: center;">f.</p> <p style="text-align: center;">f.</p>



Lampiran 4.5

PENANGGUNG JAWAB PER *DISCLOSURE*

LAPORAN KEUANGAN

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
DAFTAR PENANGGUNG JAWAB POS DAN DISCLOSURE LAPORAN KEUANGAN
POSISI 31 DESEMBER 2008

NO	KETERANGAN	TEMPLATE	TRIWUAN IV	
			PIC FA	REVIEWER
1	Neraca Konsolidasian		DN/BD	ASP
2	Laporan Laba Rugi Konsolidasian		DN/BD	ASP
3	Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian		DN/BD	ASP
4	Laporan Arus Kas Konsolidasian		DM/AA	ASP
5	Umum			
	a. Pendirian dan Informasi Umum	Template 1a.	BW	BB
	b. Dewan pengurus dan karyawan Perusahaan	Template 1b.	BW	BS
	c. Penawaran umum efek Perusahaan	Template 1c.	BW	BB
	d. Anak Perusahaan	Template 1d.	EF	BB
	e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian	Template 1e.	SU	SR
6	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	Template 2	MA	MK
7	Akuisisi Sigma	Template 3	DM	BB
8	Kas dan Setara Kas	Template 4	DN/HN	SR
9	Piutang Usaha	Template 5	ASP	ST
10	Persediaan	Template 6	JP	AT
11	Beban Dibayar Di Muka	Template 7	PI	AIR
12	Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	Template 8	PI	AIR
13	Penyertaan Jangka Panjang	Template 9	EF	AR
14	Aktiva Tetap			
	a-c. Aktiva Tetap	Template 10	AA	AD
	d. Sewa Pembiayaan	Template 10	SU	AIR
15	Aktiva Tetap PBH			
	a. Aktiva Tetap PBH	Template 11	AS	AD
	b. Pendapatan PBH ditangguhkan		AS	AD
16	Uang Muka dan Aktiva Tidak Lancar Lainnya	Template 12	PI	AIR
17	Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya	Template 13	AS	AD
18	Rekening Escrow	Template 14	TO	PT
19	Hutang Usaha	Template 15	AIY	ST
20	Beban yang Masih harus Dibayar	Template 16	TO	AIR
21	Pendapatan Diterima di Muka	Template 17	TO	AIR
22	Hutang Bank Jangka Pendek	Template 18	SK	BB
23	Jatuh tempo Hutang Jangka Panjang	Template 19	SK	BB
24	Pinjaman Penerusan (Two-Step Loans)	Template 20	SK	BB
25	Wesel Bayar dan Hutang Obligasi	Template 21	SK	BB
26	Hutang Bank	Template 22	SK	BB
27	Nilai Perolehan Penggabungan Usaha yang Ditangguhkan	Template 23	SK	BB
28	Hak Minoritas	Template 24	EF	AR
29	Modal Saham	Template 25	DN	BS
30	Tambahan Modal Disetor	Template 26	DN	BS
31	Modal Saham yang Diperoleh Kembali	Template 27	BS	DM
32	Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Template 28	DM	AD
33	Pendapatan Usaha	Template 29-33	BS	BB
34	Beban Usaha			
	a. Karyawan	Template 34	SU/BS	BB
	b. OPSAR	Template 35	TO	BS
	c. Umum dan Administrasi	Template 36	TO	BS
36	Perpajakan	Template 37	CE	HR
37	Laba Bersih per Saham Dasar	Template 38	BS	BB
38	Dividen Kas dan Cadangan Umum	Template 39	BS	BB
39	Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya	Template 40	LA	SD
40	Penghargaan Masa Kerja (Long Service Awards - LSA)	Template 41	LA	SD
41	Imbalan kesehatan Pasca Kerja	Template 42	LA	SD
42	Transaksi dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa			
	a. Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Template 43	HR	AIR
	b. Remunerasi komisaris dan Direktur	Template 43	EF	AR
	c. Indosat	Template 43	HR	AIR
	d. Lain-lain	Template 43	HR	AIR
43	Informasi Segmen	Template 44	DN	DR
44	Kerja Sama Operasi (KSO)	Template 45	YS	SD
45	Pola Bagi Hasil (PBH)	Template 46	YS	SD
46	Tarif Jasa Telekomunikasi	Template 47	BS	BB
47	Ikatan			
	a. Pembelian Barang Modal	Template 48a.	AS	AD
	b. Perjanjian Pinjaman dan Fasilitas Kredit Lainnya	Template 48b.	SK	BB
	c. Lainnya	Template 48c.	SU	BB
48	Kontinjensi	Template 49	BW	SR
49	Aset dan Kewajiban Moneter dalam Valuta Asing	Template 50	HR	AIR
50	Peristiwa setelah Tanggal Neraca	Template 51	BB	SR
51	Standar Akuntansi Baru di Indonesia	Template 52	MA	MK
52	Reklasifikasi Akun	Template 53	SD	SR
53	Ringkasan Perbedaan yang Signifikan (INDO GAAP vs US GAAP)	Template 54	NC/ER	DM
54	US GAAP - Fair Value Instrument Keuangan	Template 54	WK	BB

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
 DAFTAR PENANGGUNG JAWAB POS DAN DISCLOSURE LAPORAN KEUANGAN
 POSISI 31 DESEMBER 2009

NO	KETERANGAN	TEMPLATE	PIC FA		REVIEWER
			TRIWUAN IV		
1	Neraca Konsolidasian		DN	ASP	
2	Laporan Laba Rugi Konsolidasian		DN	ASP	
3	Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian		DN	ASP	
4	Laporan Arus Kas Konsolidasian		AA	DM	
5	Umum				
	a. Pendirian dan Informasi Umum	Template 1a.	SK	ASP	
	b. Dewan pengurus dan karyawan Perusahaan	Template 1b.	SK	ASP	
	c. Penawaran umum efek Perusahaan	Template 1c.	SK	ASP	
	d. Anak Perusahaan	Template 1d.	SK	ASP	
	e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian	Template 1e.	YS	SU	
6	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	Template 2	MA	MK	
7	Akuisisi Sigma	Template 3	YS	DR	
8	Kas dan Setara Kas	Template 4	AP/AL	ASP	
9	Piutang Usaha	Template 5	DN/RK	ASP	
10	Persediaan	Template 6	JP	ASP	
11	Beban Dibayar Di Muka	Template 7	PI/RK	ASP	
12	Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	Template 8	PI/RK	AIR	
13	Penyertaan Jangka Panjang	Template 9	SK	AR	
14	Aktiva Tetap				
	a-c. Aktiva Tetap	Template 10	AA	AD	
	d. Sewa Pembiayaan	Template 10	LA	SD	
15	Aktiva Tetap PBH				
	a. Aktiva Tetap PBH	Template 11	DN	AD	
	b. Pendapatan PBH ditangguhkan		DN	ASP	
16	Uang Muka dan Aktiva Tidak Lancar Lainnya	Template 12	AP	ASP	
17	Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya	Template 13	AS/BS	ASP	
18	Rekening Escrow	Template 14	CK	AE	
19	Hutang Usaha	Template 15	AIR	ASP	
20	Beban yang Masih harus Dibayar	Template 16	TO/RK	ASP	
21	Pendapatan Diterima di Muka	Template 17	TO/RK	ASP	
22	Hutang Bank Jangka Pendek	Template 18	SK	BB	
23	Jatuh tempo Hutang Jangka Panjang	Template 19	SK	BB	
24	Pinjaman Penerusan (Two-Step Loans)	Template 20	SK	BB	
25	Wesel Bayar dan Hutang Obligasi	Template 21	SK	BB	
26	Hutang Bank	Template 22	SK	BB	
27	Nilai Perolehan Penggabungan Usaha yang Ditangguhkan	Template 23	SK	BB	
28	Hak Minoritas	Template 24	SK	AR	
29	Modal Saham	Template 25	BS	ASP	
30	Tambahan Modal Disetor	Template 26	BS	ASP	
31	Modal Saham yang Diperoleh Kembali	Template 27	BS	DR	
32	Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Template 28	PI	ASP	
33	Pendapatan Usaha (Tlp, Interk, data&internet, Jaringan, PBH)	Template 29-33	BS/AL	ASP	
34	Beban Usaha				
	a. Karyawan	Template 34	BS/AL	ASP	
	b. OPSAR	Template 35	BS/AL	ASP	
	c. Umum dan Administrasi	Template 36	BS/AL	ASP	
36	Perpajakan	Template 37			
	a. Telkom		CE	MT	
	b. Anak Perusahaan		ER/RK	AIR	
37	Laba Bersih per Saham Dasar	Template 38	BS	ASP	
38	Dividen Kas dan Cadangan Umum	Template 39	BS	ASP	
39	Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya	Template 40	LA	SD	
40	Penghargaan Masa Kerja (Long Service Awards - LSA)	Template 41	LA	SD	
41	Imbalan kesehatan Pasca Kerja	Template 42	LA	SD	
42	Transaksi dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa				
	a. Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Template 43	AP	ASP	
	b. Remunerasi komisaris dan Direktur	Template 43	BS	ASP	
	c. Indosat	Template 43	AS	ASP	
	d. Lain-lain	Template 43	AS	ASP	
43	Informasi Segmen	Template 44	DN	DR	
44	Kerja Sama Operasi (KSO)	Template 45	YS	SD	
45	Pola Bagi Hasil (PBH)	Template 45	YS	SD	
46	Tarif Jasa Telekomunikasi	Template 46	BS	ASP	
47	Ikatan				
	a. Pembelian Barang Modal	Template 47a.	AS/DN	AD	
	b. Perjanjian Pinjaman dan Fasilitas Kredit Lainnya	Template 47b.	SK	BB	
	c. Lainnya	Template 47c.	YS	SD	
48	Kontinjensi	Template 48	BS	ASP	
49	Aset dan Kewajiban Moneter dalam Valuta Asing	Template 49	AIR/RK	ASP	
50	Peristiwa setelah Tanggal Neraca	Template 50	BB	SR	
51	Standar Akuntansi Baru di Indonesia	Template 51	MA	MK	
52	Reklasifikasi Akun	Template 52	YS	SD	
53	Ringkasan Perbedaan yang Signifikan (INDO GAAP vs US GAAP)	Template 53	NC/ER	DM	
54	US GAAP - Fair Value Instrument Keuangan	Template 53	WK	BB	

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
 DAFTAR PENANGGUNG JAWAB POS DAN DISCLOSURE LAPORAN KEUANGAN
 POSISI 31 DESEMBER 2010

NO	KETERANGAN	TEMPLATE	PIC FA REVIEWER	
			TRIWUAN IV	
1	Neraca Konsolidasian		DN	SU
2	Laporan Laba Rugi Konsolidasian		DN	SU
3	Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian		DN	SU
4	Laporan Arus Kas Konsolidasian		DN	DR
5	Umum			
	a. Pendirian dan Informasi Umum	Template 1a.	SK	ASP
	b. Dewan pengurus dan karyawan Perusahaan	Template 1b.	SK	ASP
	c. Penawaran umum efek Perusahaan	Template 1c.	SK	ASP
	d. Anak Perusahaan	Template 1d.	SK	ASP
	e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian	Template 1e.	YS	SD
6	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	Template 2	SM	DR
7	Akuisisi Sigma	Template 3	YS	DR
8	Kas dan Setara Kas	Template 4	FI	ASP
9	Piutang Usaha	Template 5	DN	ASP
10	Persediaan	Template 6	NE	ASP
11	Beban Dibayar Di Muka	Template 7	FI	ASP
12	Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	Template 8	NE	ASP
13	Penyertaan Jangka Panjang	Template 9	SK	AR
14	Aktiva Tetap			
	a-c. Aktiva Tetap	Template 10	BS	ASP
	d. Sewa Pembiayaan	Template 10	LA	SD
15	Aktiva Tetap PBH	Template 11	BS	ASP
16	Uang Muka dan Aktiva Tidak Lancar Lainnya	Template 12	FI	ASP
17	Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya	Template 13	BS	ASP
18	Rekening Escrow	Template 14	CK	ASP
19	Hutang Usaha	Template 15	NE	AIR
20	Beban yang Masih harus Dibayar	Template 16	TO	ASP
21	Pendapatan Diterima di Muka	Template 17	TO	ASP
22	Hutang Bank Jangka Pendek	Template 18	SK	BR
23	Jatuh tempo Hutang Jangka Panjang	Template 19	SK	BR
24	Pinjaman Penerusan (Two-Step Loans)	Template 20	SK	BR
25	Wesel Bayar	Template 21	SK	BR
26	Hutang Bank	Template 22	SK	BR
27	Nilai Perolehan Penggabungan Usaha yang Ditangguhkan	Template 23	SK	BR
28	Hak Minoritas	Template 24	NE	AR
29	Modal Saham	Template 25	BS	ASP
30	Tambahan Modal Disetor	Template 26	BS	ASP
31	Modal Saham yang Diperoleh Kembali	Template 27	BS	DR
32	Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Template 28	NE	PI
33	Pendapatan Usaha (Tlp, Interk, data&internet, Jaringan, PBH)	Template 29-33	MY	BS
34	Beban Usaha (Karyawan, OPHAR, Umum, & Adm, Interkonesi)			
	a. Karyawan	Template 34	MY	BS
	b. OPSAR	Template 35	MY	BS
	c. Umum dan Administrasi	Template 36	MY	BS
	d. Beban Interkoneksi	Template 37	MY	BS
36	Perpajakan	Template 38		
	a. Telkom		CE	MT
	b. Anak Perusahaan		ER	AIR
37	Labas Bersih per Saham Dasar	Template 39	BS	ASP
38	Dividen Kas dan Cadangan Umum	Template 40	BS	ASP
39	Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya	Template 41	LA	SD
40	Penghargaan Masa Kerja (Long Service Awards - LSA)	Template 42	LA	SD
41	Imbalan kesehatan Pasca Kerja	Template 43	LA	SD
42	Transaksi dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa	Template 44		
	a. Pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa		AP/FI	ASP
	b. Remunerasi komisaris dan Direktur		BS	ASP
	c. Indosat		AP/FI	ASP
	d. Lain-lain		AP/FI	ASP
43	Informasi Segmen	Template 45	DN	DR
44	Pola Bagi Hasil (PBH)	Template 46	YS	SD
45	Tarif Jasa Telekomunikasi	Template 47	BS	ASP
46	Ikatan			
	a. Pembelian Barang Modal	Template 48	BS	ASP
	b. Perjanjian Pinjaman dan Fasilitas Kredit Lainnya		SK	BR
	c. Lainnya		YS	SD
48	Kontinjensi	Template 49	BS	ASP
49	Aset dan Kewajiban Moneter dalam Valuta Asing	Template 50	NE	AIR
50	Aset dan Kewajiban Keuangan	Template 51	BS	SD
51	Peristiwa setelah Tanggal Neraca	Template 52	BR/BS	SR
52	Standar Akuntansi Baru di Indonesia	Template 53	SM	DM
53	Reklasifikasi Akun	Template 54	YS	SD
54	Ringkasan Perbedaan yang Signifikan (INDO GAAP vs US GAAP)	Template 55	NC/MY	DM
	US GAAP - Fair Value Instrument Keuangan	Template 55	AY	BR